

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barru merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barru selama tahun berjalan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barru telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah:

- a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barru.
- b. Membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

- b. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

- o. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 5); dan
- u. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 44).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

- Bab I Pendahuluan
 - 1) Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
 - 2) Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
 - 3) Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
- Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD
 - 1) Ekonomi makro
 - 2) Kebijakan keuangan
 - 3) Indikator pencapaian target kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
 - 1) Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
 - 2) Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 1) Entitas pelaporan keuangan daerah
 - 2) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 3) Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4) Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan
- Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan
 - 1) Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran



- 2) Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan SAL
- 3) Penjelasan pos-pos Laporan Neraca
- 4) Penjelasan pos-pos Laporan Operasional
- 5) Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 6) Penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab VII Penutup

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru, yaitu:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,46%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,89%;
- c. Gini Ratio sebesar 0,371%;
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,8%;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,51%;
- f. Tingkat Inflasi sebesar 2,22%;
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp 9427,11 milyar.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Tabel 7.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Barru

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/(turun) (%)
1	Kabupaten Barru (%)	8,57	8,26	8,68	8,40	8,46	(0,06)
2	Kabupaten Barru (Ribuan Orang)	14.920	14.440	15.180	14.730	14.880	(150)
3	Provinsi (%)	8,56	8,72	8,78	8,63	8,7	(0,07)
4	Nasional (%)	9,22	9,78	9,71	9,57	9,36	(0,18)
5	Peringkat Provinsi	14	15	14	11	14	(0)
6	Peringkat Nasional	312	331	323	313	305	(8)

Sumber Dokumen: BPS

Persentase penduduk miskin Kabupaten Barru pada Tahun 2022 sebesar 8,40% mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2023 persentase penduduk miskin meningkat menjadi 8,46% dan diharapkan pada tahun 2024 menurun hingga mencapai angka 5%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Barru berada sedikit dibawah provinsi sebesar 8,70%, dan nasional sebesar 9,36%, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 7.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Barru

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/(Turun) (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Barru	1,07	1,31	1,52	0,98	1,48	(0,5)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,45	1,53	1,49	1,36	1,57	(0,21)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,55	1,61	1,67	1,56	1,53	(0,06)
4	Peringkat Provinsi	17	12	11	17	10	(-7)
5	Peringkat Nasional	322	300	257	357	250	(108)

Sumber Dokumen: BPS

Tabel 7.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Barru

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/(Turun) (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Barru	0,21	0,36	0,39	0,15	0,45	(0,3)
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,34	0,39	0,37	0,32	0,41	(0,09)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,37	0,38	0,42	0,38	0,38	(0,01)
4	Peringkat Provinsi	17	10	8	22	8	(14)
5	Peringkat Nasional	334	223	219	433	179	(251)

Sumber Dokumen: BPS

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. **Pengangguran terbuka**, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2023 adalah sebesar 5,89%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 7.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/(Turun) (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru (%)	5,79	6,39	6,74	5,32	5,89	(0,57)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,97	6,31	5,72	4,51	4,33	(0,18)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,28	7,07	6,49	5,86	5,32	(0,54)
4	Peringkat Provinsi	21	5	3	4	3	(1)
5	Peringkat Nasional	378	212	262	157	113	(44)

Sumber Dokumen: BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Barru Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 5,89%, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 5,32% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2022. Pada dasarnya, TPT Kabupaten Barru tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4.33% dan lebih tinggi dibandingkan TPT Nasional sebesar 5,32%.

2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Barru Tahun 2023 adalah sebesar 0,371 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 7.5 Gini Ratio Kabupaten Barru

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/(turun) poin
1	Tingkat Kabupaten Barru	0,360	0,357	0,359	0,366	0,371	0,005
2	Tingkat Provinsi	0,389	0,389	0,382	0,377	0,377	(0)
3	Tingkat Nasional	0,382	0,381	0,381	0,381	0,388	(0,004)
4	Peringkat Provinsi	14	11	16	16	16	0
5	Peringkat Nasional	324	410	346	305		305

Sumber Dokumen: BPS



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Barru yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,371 poin. Angka ini naik sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2022 yang sebesar 0,366 poin dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru, Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Barru Tahun 2023 adalah sebesar 73,80 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7.6 Indeks Pembangunan Manusia

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/(turun) poin
1	Kabupaten Barru	70,60	71,00	71,13	71,53	73,80	0,84
2	Provinsi	71,66	71,93	72,24	72,82	74,60	0,64
3	Indonesia/Nasional	71,92	71,94	72,29	72,91	74,39	0,62
4	Peringkat Provinsi	8	8	8	8	8	0
5	Peringkat Nasional	198	188	167	200	195	(5)

Sumber Dokumen BPS

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Barru Tahun 2023 adalah sebesar 73,80 poin, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 71,53 poin mengalami kenaikan sebesar 0,84 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 69,35 tahun pada Tahun 2022, lebih lama 28 bulan dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 8,25 tahun dengan harapan lama sekolah 13,61 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp.11.275.000,00 atau meningkat sebesar Rp258.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM di Kabupaten Barru pada saat ini berada pada urutan ke 8 dari 24 Kab/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan berada pada urutan ke 195 untuk peringkat nasional (indonesia) dari 514 Kab/Kota yang ada di Indonesia.



2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 7.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru

No.	Uraian	Kabupaten/Kota					Provinsi	Nasional
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	4.797,43	4.839,12	5.069,99	5.329,31	5.516,25	377.162,17	12.301.393,6
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,41	0,87	4,77	5,11	3,51	4,51	5,05
3	Peringkat Provinsi	7	7	14	21	18		
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	29	153	83	265		26	

Sumber Dokumen: BPS

Selama kurun waktu Tahun 2019 - Tahun 2022, perekonomian Kabupaten Barru mengalami peningkatan rata-rata 0,50%. Namun, pada tahun 2023 menurun sebesar 3,51%. Pada periode Tahun 2019 – Tahun 2020 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Barru sebesar 6,54%, pada kurun waktu Tahun 2020 – Tahun 2021 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Barru menurun sebesar 3,9%, pada kurun waktu Tahun 2021 – Tahun 2022 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Barru meningkat sebesar 0,34% dan pada kurun waktu Tahun 2022 – Tahun 2023 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Barru menurun sebesar 1,60%. Dalam skala Provinsi, laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Barru menempati urutan ke 21 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan skala nasional laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru menempati urutan ke 26 dari laju pertumbuhan Prov/Kab/Kota di wilayah Indonesia.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Barru dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) **Inflasi ringan** (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang (Gallopung Inflation)** Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat (High Inflation)** kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) **Hiperinflasi (Hyper Inflation)** Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Tabel 7.8 Laju Inflasi Beberapa Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Kota	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/(Turun) (%)
1	Kab. Bulukumba	0,08	2,30	2,16	4,12	2,78	(1,34)
2	Kabupaten Bone	0,67	1,89	2,26	5,52	2,84	(2,68)
3	Kota Makassar	0,05	2,13	2,26	5,81	2,89	(2,92)
4	Kota Pare Pare	1,06	1,61	4,09	6,66	2,22	(4,44)
5	Kota Palopo	0,86	1,21	2,96	5,13	2,21	(2,92)

Sumber Dokumen: BPS

Tabel diatas menunjukkan laju inflasi lima kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan mulai Tahun 2019 sampai dengan 2023. Pada Tahun 2023 laju inflasi dihitung sampai dengan Bulan Desember. Tingkat inflasi perkotaan dan perdesaan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan diwakili oleh kelima kota diatas. Untuk Kabupaten Barru mengikuti Kota Parepare. Sulawesi Selatan mengalami inflasi sebesar 2,81 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 116,50 pada November 2023 menjadi 117,35 pada Desember 2023. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Makassar sebesar 2,89 persen dengan IHK 117,49 dan terendah di Kota Palopo sebesar 2,21 persen dengan IHK 115,60.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Barru

Struktur perekonomian Kabupaten Barru dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

No.	Uraian	Dalam jutaan rupiah				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.458,99	2.528,15	2.808,90	3.109,27	3.186,75
2	Pertambangan dan Penggalian	219,09	225,39	236,22	252,37	279,21
3	Industri Pengolahan	355,33	348,63	373,45	421,44	448,17
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,44	6,84	7,41	7,63	9,57
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,97	7,93	8,41	9,47	10,18
6	Konstruksi	1.411,25	1.428,09	1.556,42	1.690,44	1.847,54
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	686,75	688,31	740,99	827,12	898,12
8	Transportasi dan Pergudangan	197,97	181,39	206,40	268,68	319,65
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	73,22	75,78	80,59	96,93	109,27
10	Informasi dan Komunikasi	322,33	359,36	383,61	417,99	460,63



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	211,34	217,16	239,25	263,38	262,19
12	Real Estate	233,45	241,06	247,76	269,75	292,92
13	Jasa Perusahaan	1,74	1,67	1,79	2,18	2,44
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	612,01	616,47	630,94	665,62	674,22
15	Jasa Pendidikan	257,93	273,55	279,55	293,92	312,23
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	162,04	180,57	198,02	217,42	240,09
17	Jasa Lainnya	54,37	51,94	57,56	64,78	73,91
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	7.271,22	7.432,30	8.057,26	8.878,37	9.427,11
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	-	-	-	-	9.427,11
20	PDRB Provinsi	504.746,87	504.478,54	545.230,03	605.144,68	652.574,7
21	PDRB Nasional	472.919,32	464.284,66	16.970.789,20	19.588.445,60	20.892.376,7
22	Peringkat Provinsi	22	22	15	21	21
23	Peringkat Nasional	346	346	276		

Sumber Dokumen: BPS

2.2 Kebijakan Keuangan

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. RKPD tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2010 – 2025 Kabupaten Barru dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 – 2023 Kabupaten Barru.

RPJMD tahun 2018 - 2023 Kabupaten Barru sebagai tindak lanjut kebijakan program Strategis, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih. Penyusunan RKPD tahun 2023 sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan merupakan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat Kabupaten.

RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 sebagai landasan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023 menitikberatkan pada sinkronisasi kebijakan program strategis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan masyarakat untuk pembangunan nasional dan daerah, serta terciptanya pemerintahan yang baik.

Secara umum RKPD saat ini disusun dengan memperhatikan ketentuan yang ada, namun yang terpenting adalah rencana tersebut disusun berdasarkan analisis obyektif kinerja pembangunan saat ini yang secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut.

- Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan
- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta kependudukan
- Peningkatan produksi pertanian dan pengembangan potensi unggulan berbasis sumber daya sosial
- Pemantapan pembangunan infrastruktur ekonomi, social, dan pemerintahan



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

- e. Optimalisasi pengelolaan pemerintahan, pelayanan dan kapasitas aparatur
- f. Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja
- g. Penguatan partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan gender

Untuk mencapai RKPd yang dimaksud maka dibentuklah mandatory spending sebagai bentuk sinkronisasi kebijakan program strategis dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran yang sudah diatur oleh undang-undang. Setiap tahunnya, pemerintah daerah menganggarkan sejumlah belanja yang wajib dialokasikan dengan persentase tertentu. Alokasi Mandatory spending tahun 2023 antara lain:

1. Bidang Pendidikan sebesar 31,85% dari total Belanja Daerah.
2. Bidang Kesehatan sebesar 31,40 dari Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN.
3. Bidang Infrastruktur sebesar 26,44% dari Transfer Daerah yang penggunaannya bersifat umum.
4. Bidang Pemerintahan Desa sebesar 10% dari Dana Transfer Umum.
5. Bidang Pengawasan sebesar 0,60% dari Total Belanja Daerah.
6. Bidang Pengembangan Kompetensi sebesar 0,44% dari Total Belanja Daerah.

Adapun rincian alokasi mandatory spending setiap bidang dapat dilihat pada lampiran.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Secara umum pencapaian target APBD Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pencapaian target APBD tahun sebelumnya. Ini bisa dilihat dari realisasi pendapatan dalam Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp888.425.426.755,75 atau sebesar 97,98% dari target pendapatan sebesar Rp906.712.660.330,00. Sementara realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 senilai Rp906.753.762.122,58 atau sebesar 89,99% dari target belanja sebesar Rp1.007.608.922.840,00.

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023

Secara singkat realisasi APBD Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.10 Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	116.536.037.481,00	108.669.905.583,75	(7.866.131.897,25)	(6,75)
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	24.678.108.406,00	25.785.922.730,01	1.107.814.324,01	4,49
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	5.680.924.584,00	3.844.587.603,00	(1.836.336.981,00)	(32,32)
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.389.242.740,00	9.922.742.013,00	533.499.273,00	5,68
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	76.787.761.751,00	69.116.653.237,74	(7.671.108.513,26)	(9,99)



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	790.176.622.849,00	779.755.521.172,00	(10.421.101.677,00)	(1,32)
1.2.1.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	710.347.717.892,00	701.463.994.931,00	(8.883.722.961,00)	(1,32)
	DANA PERIMBANGAN	671.608.095.892,00	662.724.372.931,00	(8.883.722.961,00)	(1,32)
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	6.042.293.000,00	6.042.293.000,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	4.890.368.000,00	4.890.368.000,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	499.568.872.000,00	499.391.128.979,00	(177.743.021,00)	(0,04)
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	161.106.562.892,00	150.217.757.160,00	(10.888.805.732,00)	(6,76)
1.2.2.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA	38.739.622.000,00	38.739.622.000,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Dana Desa	38.739.622.000,00	38.739.622.000,00	0,00	0,00
1.2.3.	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	79.828.904.957,00	78.291.526.241,00	3.437.302.040,00	7,41
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	54.892.183.997,00	61.253.240.366,00	6.361.056.369,00	11,59
1.2.4.	BANTUAN KEUANGAN	24.936.720.960,00	17.038.285.875,00	(7.898.435.085,00)	(31,67)
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Provinsi Lainnya	24.936.720.960,00	17.038.285.875,00	(7.898.435.085,00)	(31,67)
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	906.712.660.330,00	888.425.426.755,75	(18.287.233.574,25)	(2,02)
2.	BELANJA				
2.1.	BELANJA OPERASI	730.275.965.899,00	665.057.375.056,10	(65.218.590.842,90)	(8,93)
2.1.1.	Belanja Pegawai	414.288.769.125,00	380.173.392.967,00	(34.115.376.158,00)	(8,23)
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	285.048.705.234,00	258.845.601.745,10	(26.203.103.488,90)	(9,19)
2.1.3.	Belanja Bunga	2.530.000.000,00	2.088.449.782,00	(441.550.218,00)	(17,45)
2.1.4.	Belanja Subsidi	1.200.000.000,00	313.026.525,00	(886.973.475,00)	(73,91)
2.1.5.	Belanja Hibah	27.208.491.540,00	23.636.904.037,00	(3.571.587.503,00)	(13,13)
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	BELANJA MODAL	181.612.170.854,00	148.016.364.234,00	(54.597.350.270,00)	(37,48)
2.2.1.	Belanja Tanah	7.101.200.000,00	7.100.823.000,00	(377.000,00)	(0,01)
2.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	26.218.791.036,00	21.357.154.752,00	(4.861.636.284,00)	(18,54)
2.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	62.991.386.339,00	53.248.357.339,00	(9.743.029.000,00)	(15,47)
2.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	84.875.814.679,00	65.926.169.143,00	(18.949.645.536,00)	(22,33)
2.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	424.978.800,00	383.860.000,00	(41.118.800,00)	(9,68)
2.2.6.	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.779.948.936,00	839.982.105,48	(1.939.966.830,52)	(69,78)
2.3.1.	Belanja Tidak Terduga	2.779.948.936,00	839.982.105,48	(1.939.966.830,52)	(69,78)
	Jumlah Belanja	920.471.674.396,00	813.913.721.396,00	(106.557.953.000,00)	(11,58)
2.4.	TRANSFER				
2.4.1.	Transfer Bantuan Keuangan	92.940.837.151,00	92.840.040.727,00	(100.796.424,00)	(0,11)
	Jumlah Transfer	92.940.837.151,00	92.840.040.727,00	(100.796.424,00)	(0,11)
	Jumlah Belanja dan Transfer	1.007.608.922.84,00	906.753.762.122,58	(100.855.160.717,42)	(10,01)
	Surplus/(Defisit)	(100.896.262.510,00)	(18.328.335.366,83)	82.567.927.143,17	81,83
3.	PEMBIAYAAN				
3.1.	PENERIMAAN DAERAH				
3.1.1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	103.949.293.775,00	113.804.956.323,65	9.855.662.548,65	9,48
3.1.1.1	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2	Penghematan Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	103.949.293.775,00	113.804.956.323,65	9.855.662.548,65	9,48



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	103.949.293.775,00	113.804.956.323,65	9.855.662.548,65	9,48
3.2.	PENGELUARAN DAERAH				
3.2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada BUMN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	3.053.031.265,00	3.053.031.264,52	0,48	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.053.031.265,00	3.053.031.264,52	0,48	0,00
	Pembiayaan Netto	100.896.262.510,00	110.751.925.059,13	9.855.662.549,13	9,48
	SILPA	0,00	92.423.589.692,30	113.815.417.240,35	0,00

3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan

a. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Pendapatan

Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Barru dalam pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya/rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi (WR) dalam menunaikan kewajibannya;
- 2) Terbatasnya tenaga operasional lapangan;
- 3) Adanya obyek pajak/retribusi yang belum terdata.

b. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Belanja

Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Barru dalam pencapaian target belanja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Dana kegiatan yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak dapat diserap 100% sehubungan dengan tingkat penyelesaian kegiatan tersebut tidak mencapai target yang diharapkan;
- 2) Pencairan dana terkait dengan kegiatan rutin SKPD di luar kegiatan belanja modal sangat dipengaruhi dengan dokumen SPJ SKPD.

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, pada tahun 2008 ini Pemerintah Kabupaten Barru sudah membentuk kelembagaan baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 menyangkut pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan Akuntansi umum juga memuat tentang prinsip-prinsip akuntansi yang menjadi pedoman dalam praktek akuntansi pemerintahan daerah. Prinsip ini akan menentukan dasar yang akan digunakan untuk mencatat pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana. Berdasarkan prinsip



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

ini akan ditentukan dalam periode mana/kapan pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana akan dilaporkan.

Basis AkruaI untuk Neraca berarti bahwa aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

a. Prinsip Nilai Historis (*Historical Cost*)

Prinsip ini menetapkan bahwa dasar pencatatan pertama kali terhadap aktiva dan kewajiban adalah menggunakan nilai perolehan pertama kali (nilai historis). Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Nilai perolehan (historis) lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal ini jika tidak terdapat nilai historis maka dapat digunakan nilai wajar aktiva atau kewajiban terkait.

b. Prinsip Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah daerah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip penandingan yang layak antara belanja dan pendapatan (*matching cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah daerah tidak mendapatkan penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

c. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Prinsip ini menetapkan bahwa jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonominya, bukan hanya memenuhi formalitasnya.

d. Prinsip Perioditas (*Accounting Period*)

Prinsip ini menetapkan bahwa kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun demikian, pelaporan keuangan pemerintah daerah juga dilakukan dalam periode triwulanan.

e. Prinsip Konsistensi (*Consistency*)

Prinsip ini menetapkan bahwa perlakuan akuntansi yang sama hendaknya ditetapkan pada kejadian yang serupa dari setiap periode oleh suatu entitas pelapor (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru ditetapkan mampu memberi informasi yang lebih baik dibanding metode



lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam laporan keuangan.

f. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Prinsip ini menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan Atas laporan Keuangan.

g. Prinsip Penyajian Wajar

Prinsip ini menekankan bahwa laporan keuangan hendaknya menyajikan secara wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip Kehati-hatian (*Conservatism*)

Prinsip ini perlu diperhatikan pada saat timbul ketidakpastian dan keraguan yang berkaitan dengan peristiwa dan keadaan tertentu. Sehubungan dengan hal ini, maka faktor pertimbangan sehat (*professional judgement*) perlu dilakukan oleh penyusun laporan keuangan. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan menggunakan hakikat serta dengan tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan yang sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aktiva atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aktiva atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak handal.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Kebijakan Pengakuan dan Pengukuran

Kebijakan pengakuan dan pengukuran merupakan pedoman untuk pencatatan kejadian-kejadian dan menetapkan pengaruh dari kejadian-kejadian tersebut terhadap posisi keuangan serta memberikan pedoman dalam menetapkan nilai atas akibat pengaruh kejadian-kejadian tersebut.

1) Kebijakan Pengakuan

Pengakuan (*recognition*) dalam akuntansi adalah proses penetapan apakah suatu kejadian atau peristiwa akan dicatat atau tidak dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aktiva, kewajiban ekuitas dana, pendapatan belanja, dan pembiayaan sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa agar dapat diakui/dicatat adalah.

- a) Terdapat kemungkinan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

- b) Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan handal.

Dalam menentukan apakah suatu kebijakan/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan perlu dipertimbangkan juga aspek materialitas. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun, ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang. Prinsip pengakuan untuk unsur-unsur utama laporan keuangan entitas pelaporan adalah.

- a) Prinsip Pengakuan Pendapatan, sesuai dengan basis yang digunakan yaitu basis kas yang dimodifikasi, maka pendapatan akan dicatat/diakui pada saat kas diterima oleh Kas Daerah.
- b) Prinsip Pengakuan Belanja, sesuai dengan basis yang digunakan yaitu basis kas yang dimodifikasi, maka belanja akan dicatat/diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Daerah telah dipertanggungjawabkan.
- c) Prinsip Pengakuan Pembiayaan, pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja dalam satu periode akuntansi. Pembiayaan meliputi sumber penerimaan dan sumber pengeluaran. Seperti halnya pendapatan dan belanja, pembiayaan akan diakui pada saat terdapat pengeluaran kas untuk sumber pengeluaran daerah selama periode akuntansi dan akhir periode akuntansi.
- d) Prinsip Pengakuan Aktiva, aktiva diakui jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau dilepas oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai dan biaya yang dapat diukur dengan andal, yaitu pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah. Dengan demikian, aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis tersebut adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan dasar laut, kandungan pertambangan, dan harta peninggalan sejarah seperti candi. Aktiva juga tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

berjalan/berkenaan. Aktiva dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah serta penerimaan pembiayaan. Proses penerimaan kas dari setiap jenis penerimaan sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau dinas/satker. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi akan diatur dalam kebijakan akuntansi terinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Kas Daerah. Aktiva diklasifikasikan menjadi aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dana cadangan, dan aktiva lain-lain. Kebijakan akuntansi untuk tiap-tiap klasifikasi aktiva diuraikan dalam Kebijakan Akuntansi Terinci.

- e) Prinsip Pengakuan Kewajiban, kewajiban merupakan pengorbanan sumber daya ekonomis yang harus dilakukan kepada pihak ketiga di masa mendatang sebagai akibat dari transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyesuaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyesuaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- f) Prinsip Pengakuan Ekuitas Dana, ekuitas dana merupakan jumlah kekayaan bersih antara jumlah aktiva dan kewajiban. Pengakuan ekuitas dana mengacu pada kebijakan pengakuan aktiva dan pengakuan kewajiban. Ekuitas dana dikelompokkan menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

2) Kebijakan Pengukuran

Pengukuran (*measurement*) adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan (nilai historis).

Aktiva diukur sebesar pengeluaran kas atau setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut. Kewajiban diukur sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah. Sedangkan transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Kebijakan pengukuran secara rinci untuk tiap-tiap rekening diuraikan pada kebijakan Akuntansi terinci.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

a. Kebijakan Akuntansi Neraca



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Neraca menyajikan informasi yang menggambarkan posisi keuangan daerah yang merupakan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana pada saat tertentu. Neraca menyajikan pos-pos.

1) Aset Lancar

- a) Kas adalah alat pembayaran yang sah setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah kabupaten.
- b) Kas di Pemegang Kas dinyatakan dalam nilai rupiah. Apabila di dalam kas terdapat valuta asing, maka pencatatannya terlebih dahulu dikonversi berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, Kas di Pemegang Kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal neraca (Kurs Tengah BI).
- c) Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil kas opname di masing-masing pemegang kas.

2) Piutang

- a) Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas dalam satu periode akuntansi.
- b) Piutang dapat berupa penjualan barang, kewajiban kepada Pemerintah Daerah yang belum dilunasi, misalnya piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana bergulir, dan pinjaman uang yang belum dilunasi per tanggal neraca.
- c) Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- d) Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.
- e) Piutang pajak/retribusi diakui sebagai piutang apabila telah ditertibkan ketetapanannya (Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah).

3) Persediaan

- a) Persediaan adalah barang yang dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi terdiri dari: bahan pakai habis kantor, obat-obatan, bibit tanaman, dan sebagainya.
- b) Persediaan bahan baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok aktiva lancar.
- c) Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.
- d) Persediaan pada akhir periode akuntansi dilaporkan berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara.
 - (1) Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian.
 - (2) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - (3) Harga/nilai wajar atau estimasi harga pasar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/hadiah/hibah.
- e) Jenis-jenis persediaan:



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

- (1) Barang pakai habis, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK, barang cetakan (karcis, buku, formulir).
- (2) Barang tak pakai habis, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misalnya sapu, kemoceng, dan lain-lain.
- (3) Barang bekas pakai, adalah persediaan yang diperoleh dari barang bekas akan tetapi masih bermanfaat dan mempunyai nilai materiil, misalnya spare part yang masih dapat digunakan.
- (4) Persediaan untuk dijual/diserahkan, misalnya aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit, benih ikan, dan lain-lain.

4) Investasi Jangka Panjang

- a) Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- b) Investasi jangka panjang antara lain terdiri dari.
 - (1) Penyertaan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lembaga keuangan daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah.
 - (2) Pinjaman kepada BUMD, lembaga keuangan daerah, pemerintah daerah otonom dan pihak lainnya yang dipinjamkan.
 - (3) Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.
- c) Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
 - (1) Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada saat kepemilikan.
 - (2) Investasi dalam saham BUMD yang dijual/ditukar dengan aktiva yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan rata-rata.

5) Aktiva Tetap

- a) Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.
- b) Aktiva tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aktiva lainnya.
- c) Aktiva tetap antara lain terdiri dari: tanah, jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, jaringan, bangunan gedung, monumen, alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan alat rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, buku perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan ternak, dan tanaman.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

- d) Aktiva tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aktiva tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan maka nilai aktiva tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.
- e) Aktiva tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
- f) Aktiva tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- g) Dalam pengakuan aktiva tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan, dan penggantian utama.
- h) Penambahan adalah peningkatan nilai aktiva tetap karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.
- i) Pengurangan adalah penurunan nilai aktiva tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aktiva tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.
- j) Pengembangan adalah peningkatan nilai aktiva tetap karena meningkatnya manfaat aktiva tetap. Pengembangan aktiva tetap diharapkan akan.
 - (1) Memperpanjang usia manfaat;
 - (2) Meningkatkan efisiensi, dan
 - (3) Menurunkan biaya pengoperasian sebuah aktiva tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aktiva tetap.
- k) Penggantian utama adalah memperbaharui bagian utama aktiva tetap. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga utama yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aktiva tetap.
- l) Aktiva tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- m) Aktiva tetap diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap sampai dengan siap digunakan.
- n) Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (disclosure) dalam pelaporan aktiva tetap antara lain penilaian, penyusutan (depresiasi), pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aktiva tetap.
- o) Pengungkapan nilai aktiva tetap menjelaskan dasar harga yang digunakan dalam penilaian aktiva tetap.
- p) Metode penyusutan (depresiasi) yang diterapkan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah.
- q) Pelepasan aktiva tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aktiva tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aktiva tetap yang diperoleh karena pertukaran



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

dinilai sebesar nilai wajar aktiva tetap yang diperoleh atau nilai wajar aktiva yang diserahkan, mana yang lebih mudah.

- r) Penghapusan aktiva tetap dilakukan jika aktiva tersebut rusak berat, usang, hilang, dan sebagainya. Penghapusan aktiva ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6) Dana Cadangan

- a) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.
- b) Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

7) Aktiva Lain-Lain

- a) Aktiva lain-lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan dana cadangan. Aktiva lain-lain terdiri dari piutang angsuran, Built Operate and Transfer (BOT), dan bangunan dalam pengerjaan.
- b) Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aktiva tetap yang lain, hak atau lainnya kepada pegawai daerah.
- c) Piutang angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aktiva.
- d) BOT adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aktiva tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.
- e) BOT diakui berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut selesai dibangun.
- f) Bangunan dalam pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.
- g) Bangunan dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

8) Hutang Lancar

- a) Hutang lancar merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b) Hutang lancar terdiri dari bagian lancar hutang jangka panjang, hutang bunga dan denda serta hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
- c) Bagian lancar hutang jangka panjang adalah bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- d) Hutang bunga dan denda adalah bunga dan denda yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

- e) Hutang PFK adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- f) Bagian lancar hutang jangka panjang diakui pada saat klasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar hutang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.
- g) Hutang PFK diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan atau jumlah penerimaan dan pembayaran hutang PFK yang telah diakui dalam periode berjalan.
- h) Hutang lancar diukur dan dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Hutang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

9) Hutang Jangka Panjang

- a) Hutang jangka panjang adalah hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
- b) Hutang jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.
- c) Hutang dalam negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri.
- d) Hutang dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.
- e) Hutang luar negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri.
- f) Hutang luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang luar negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.
- g) Hutang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Hutang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

10) Ekuitas Dana

- a) Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah hutang pemerintah.
- b) Ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana umum, ekuitas dana yang dicadangkan, dan ekuitas dana donasi.
- c) Ekuitas dana umum adalah jumlah kekayaan bersih tidak termasuk aktiva yang berasal dari donasi dan dana cadangan.
- d) Ekuitas dana umum diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa sisa lebih perhitunagn anggaran, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan jumlah surplus atau defisit.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

- e) Ekuitas dana dicadangkan jumlah kekayaan bersih berupa aktiva yang dicadangkan.
- f) Ekuitas dana dicadangkan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.
- g) Ekuitas dana donasi adalah kekayaan bersih berupa aktiva yang berasal dari donasi.
- h) Ekuitas dana donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan berupa penerimaan hibah, bantuan, atau sumbangan yang telah diakui dalam periode berjalan.

Penyajian neraca periode akuntansi belanja harus diperbandingkan dengan neraca periode akuntansi sebelumnya. Dalam penyajian neraca aktiva akan diklasifikasikan sebagai lancar atau non lancar, demikian juga dengan kewajiban akan dikelompokkan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Penyajian aktiva dalam neraca dilakukan menurut urutan likuiditasnya, sedangkan penyajian kewajiban dalam neraca dilakukan menurut urutan jatuh temponya. Suatu aktiva akan diklasifikasikan sebagai aktiva lancar jika aktiva tersebut berupa kas dan setara kas atau aktiva non kas yang diharapkan untuk direalisasi dalam, atau dimiliki untuk dijual atau dipakai dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Dengan demikian yang disajikan sebagai aktiva lancar meliputi kas dan setara kas, piutang, dan persediaan.

Suatu aktiva akan diklasifikasikan sebagai aktiva non lancar jika aktiva tersebut bersifat jangka panjang dan aktiva tidak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aktiva non lancar meliputi investasi permanen, aktiva tetap, dan dana cadangan.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk kewajiban jangka pendek adalah hutang kepada pegawai, bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang.

Semua kewajiban selain kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban jangka panjang yaitu kelompok kewajiban yang penyelesaiannya baru wajib dilakukan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas dana dikelompokkan menjadi ekuitas dana lancar yaitu selisih antara aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek, ekuitas dana investasi yang mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam aktiva non lancar dikurangi kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana cadangan yang mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran

- 1) Laporan Perhitungan APBD, sering juga disebut Laporan Realisasi Anggaran, adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan, melaksanakan kegiatan berdasarkan



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

anggaran belanja yang ditetapkan, dan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk mengalokasikan surplus atau menutup defisit.

- 2) Laporan Perhitungan APBD/realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut.
 - a) Pendapatan
 - b) Belanja
 - c) Transfer
 - d) Surplus/defisit
 - e) Penerimaan pembiayaan
 - f) Pengeluaran Pembiayaan
 - g) Pembiayaan Netto, dan
 - h) Selisih Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
 - 3) Laporan Perhitungan APBD menyajikan perbandingan antara Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dengan realisasinya dalam periode akuntansi berjalan serta dibandingkan dengan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan periode akuntansi sebelumnya.
 - 4) Laporan Perhitungan APBD harus disertai catatan dan informasi mengenai hal-hal yang menunjukkan pencapaian APBD yang merupakan persentase antara realisasi dengan anggarannya.
 - 5) Realisasi pendapatan dan belanja pada perhitungan realisasi APBD disajikan secara bruto.
 - 6) Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut kelompok dan jenis pendapatan pada laporan perhitungan APBD, dan rician lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 7) Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja pada Laporan Perhitungan APBD, klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 8) Penerimaan pembiayaan disajikan menurut sumber pembiayaan, sedangkan pengeluaran pembiayaan disajikan menurut sumber pengeluarannya.
- c. Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas (LAK)**
- 1) Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai kemampuan daerah dalam memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam suatu periode.
 - 2) Laporan arus kas menggambarkan saldo awal, penerimaan pengeluaran, dan saldo akhir kas daerah dalam suatu periode akuntansi yang baru.
 - 3) Isi dari laporan arus kas yang disajikan terdiri dari empat bagian pokok yaitu arus kas masuk (keluar) dari kegiatan operasi, kegiatan investasi aktiva non keuangan, kegiatan pembiayaan, dan kegiatan non anggaran.
 - 4) Yang disajikan sebagai aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Yang disajikan sebagai penerimaan operasi adalah penerimaan PAD. Penerimaan Dana Perimbangan baik dari pusat maupun provinsi, dan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan pengeluaran operasi meliputi pengeluaran untuk belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja bunga,



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

- belanja subsidi/hibah/bantuan, belanja tak tersangka, dan belanja bagi hasil ke desa/kecamatan.
- 5) Yang disajikan sebagai aktivitas investasi aktiva non keuangan adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aktiva tetap dan aktiva non keuangan lainnya.
 - 6) Yang disajikan sebagai aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi permanen, pemberian pinjaman jangka panjang, dan pinjaman (utang) pemerintah daerah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.
 - 7) Termasuk penerimaan dan aktivitas pembiayaan adalah penerimaan pinjaman, penjualan obligasi daerah, hasil privatisasi BUMD/Perusahaan Daerah, dan hasil penjualan investasi permanen lainnya. Sedangkan pengeluaran untuk aktivitas pembiayaan meliputi cicilan pokok pinjaman, pembayaran obligasi daerah, penyertaan modal pemerintah, dan pemberian pinjaman jangka panjang.
 - 8) Yang disajikan sebagai aktivitas non anggaran adalah penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pemerintah daerah (APBD). Termasuk dalam aktivitas non anggaran adalah perhitungan pihak ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan taspen, askes, atau pajak. Sedangkan kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening di kas daerah.
 - 9) Laporan arus kas disusun dan disajikan dengan metode langsung yaitu metode yang mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
 - 10) Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi atau kurs tengah BI.
 - 11) Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja bunga serta penerimaan pendapatan dan bagian laba BUMD harus disajikan secara terpisah. Setiap perkiraan yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
 - 12) Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas dikeluarkan dari laporan arus kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 13) Entitas pelaporan menyajikan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.
- d. Kebijakan Akuntansi Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**
- Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Perhitungan APBD, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

mempunyai referensi silang dan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan setidaknya mengungkapkan hal-hal:

- 1) Menyajikan penjelasan naratif atau rincian angka-angka dari pos-pos laporan keuangan sesuai dengan urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.
- 2) Menyajikan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- 3) Mengungkapkan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.
- 4) Informasi lainnya termasuk informasi non keuangan.

e. Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional

- 1) Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Laporan operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan daerah yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional.
- 3) Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.
- 4) Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- 5) Laporan operasional menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- 6) Laporan operasional menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
- 7) Yang disajikan dalam surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
- 8) Yang disajikan dalam surplus/defisit dari kegiatan non operasional adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

- 9) Yang disajikan dalam pos luar biasa adalah kejadian luar biasa yang menghasilkan pendapatan atau beban yang mempunyai karakteristik antara lain kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian di luar kendali entitas pemerintah.
 - 10) Yang disajikan dalam surplus/defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
 - 11) Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan ekuitas.
- f. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**
- 1) Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - 2) Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos antara lain saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan saldo anggaran lebih akhir.
 - 3) Entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam catatan atas laporan keuangan.
- g. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas**
- 1) Laporan perubahan ekuitas menyajikan perubahan ekuitas daerah selama satu periode.
 - 2) Laporan perubahan ekuitas menyajikan pos-pos antara lain ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada tahun berjalan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir.
 - 3) Entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan.

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Pembiayaan, disisi lain Laporan Realisasi Anggaran mencerminkan komparasi antara anggaran dan realisasinya serta perbandingan dengan tahun sebelumnya sehingga tingkat serapan anggaran pada kegiatan normal entitas dapat diukur secara nyata serta dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagai sumber pembiayaan utama keuangan Daerah memerlukan intervensi untuk optimalisasi



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

obyek-obyek pendapatan yang didukung dengan regulasi yang sehat, profesionalisme dan integritas pengelola, data yang akurat, serta sistem penerimaan yang simultan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Barru selalu berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan penerimaan pada sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Barru pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp906.712.660.330,00 dengan realisasi sebesar Rp888.425.426.755,75 atau 97,98%. Sedang pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp902.412.131.655,00 dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Barru mencapai target sebesar 98,95% atau Rp892.903.805.806,46 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.11 Daftar Rincian Pendapatan Daerah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan – LRA	906.712.660.330,00	888.425.426.755,75	97,98	892.903.805.806,46
Pendapatan Asli Daerah	116.536.037.481,00	108.669.905.583,75	93,25	95.625.586.779,76
Pendapatan Transfer	790.176.622.849,00	779.755.521.172,00	98,68	763.848.005.135,70
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	33.430.213.891,00

Belanja Daerah merupakan instrumen teknis dengan menyesuaikan arah kebijakan anggaran dan pelaksanaan anggaran oleh karena itu Belanja Daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran Belanja Daerah dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan Belanja Daerah, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan serta terselenggaranya agenda-agenda penting Daerah.

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan tanpa menimbulkan aset tetap. Belanja modal diaksentuasikan untuk mendukung kegiatan pembangunan berupa aset tetap. Belanja Tidak Terduga ditujukan untuk mengantisipasi kemungkinan diluar perencanaan Pemerintah Daerah. Belanja Transfer ditujukan untuk pemerataan pembangunan.

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barru pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp914.668.085.689,00 dengan realisasi sebesar Rp813.913.721.395,58 atau 88,98%. Sedangkan Transfer Daerah dianggarkan sebesar Rp92.940.837.151,00 dengan realisasi sebesar Rp92.840.040.727,00 atau 93,47%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.12 Daftar Rincian Belanja dan Transfer Daerah TA 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Belanja	914.668.085.689,00	813.913.721.395,58	88,98
Belanja Operasi	730.275.965.899,00	665.057.375.056,10	91,07



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Belanja Modal	181.612.170.854,00	148.016.364.234,00	81,50
Belanja Tak Terduga	2.779.948.936,00	839.982.105,48	30,22
Transfer	92.940.837.151,00	92.840.040.727,00	99,89

Sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Barru menganggarkan Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp1.016.302.634.896,00 dengan realisasi sebesar Rp893.989.998.349,00 atau 87,96%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.13 Daftar Rincian Belanja dan Transfer Daerah TA 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Belanja	920.471.674.396,00	798.333.607.711,00	86,73
Belanja Operasi	710.668.831.700,00	647.181.906.392,00	91,07
Belanja Modal	200.250.069.935,00	145.652.719.665,00	72,74
Belanja Tak Terduga	9.552.772.761,00	5.498.981.654,00	57,56
Transfer	95.830.960.500,00	95.656.390.638,00	99,82

Berdasarkan perbandingan realisasi Pendapatan Daerah, realisasi Belanja Daerah dan realisasi Transfer, maka surplus/(defisit) Realisasi Anggaran yang terjadi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp18.328.335.366,83). Sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 yang lalu surplus/(defisit) realisasi anggaran adalah sebesar (Rp1.086.192.542,54).

Realisasi Pembiayaan Netto pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp110.751.925.059,13, sedangkan pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp114.901.609.782,89, yang seluruhnya merupakan Penerimaan Pembiayaan Daerah berupa SiLPA Awal Tahun sebesar Rp113.815.417.240,35 dikurangi koreksi Silpa tahun 2022 sebesar Rp10.460.916,70 (Silpa Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp800.909,70, Silpa Puskesmas Padongko sebesar Rp60.007,00) dan Silpa Kas Lainnya PAUD sebesar Rp9.600.000) dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp3.053.031.264,52. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.14 Daftar Realisasi Pembiayaan Daerah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	103.949.293.775,00	113.804.956.323,65	109,49	118.954.641.046,89
Pengeluaran Pembiayaan	3.053.031.265,00	3.053.031.264,52	100,00	4.053.031.264,00
Pembiayaan Neto	100.896.262.510,00	110.751.925.059,13	109,78	114.901.609.782,89
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	0,00	92.423.589.692,30	0,00	113.815.417.240,35

Adapun akun-akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	TA 2023	TA 2022
	Rp108.669.905.583,75	Rp95.625.586.779,76

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp108.669.905.583,75 atau 93,25% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp116.536.037.481,00. Realisasi tersebut diperoleh dari jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.15 Daftar Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pajak Daerah	24.678.108.406,00	25.785.922.730,01	104,49	24.325.109.079,54
2	Retribusi Daerah	5.680.924.584,00	3.844.587.603,00	67,68	7.194.962.118,00
3	Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.389.242.740,00	9.922.742.013,00	105,68	10.027.692.032,00
4	Pendapatan lain-lain PAD yang Sah	76.787.761.751,00	69.116.653.237,74	90,01	54.077.823.550,22
Jumlah		116.536.037.481,00	108.669.905.583,75	93,25	95.625.586.779,76

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	TA 2023	TA 2022
	Rp25.785.922.730,01	Rp24.325.109.079,54

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2023 dan realisasi tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 7.16 Daftar Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel	156.000.000,00	66.787.000,00	42,81	69.060.500,00
2	Pajak Restoran	1.394.000.000,00	1.430.063.024,00	102,59	1.167.149.825,30
3	Pajak Hiburan	50.400.000,00	6.823.300,00	13,54	2.391.375,00
4	Pajak Reklame	360.000.000,00	588.235.790,00	163,40	425.247.528,00
5	Pajak Penerangan Jalan	7.480.000.000,00	9.198.143.190,00	122,97	8.174.371.524,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000.000,00	5.717.682.808,01	114,35	5.948.366.218,24



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
7	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.200.000.000,00	3.004.712.622,00	71,54	3.169.741.327,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan	5.920.108.406,00	5.683.876.264,00	96,01	5.299.051.813,00
9	Pajak Parkir	3.600.000,00	3.750.000,00	104,17	2.000.000,00
10	Pajak Air Tanah	18.000.000,00	56.229.932,00	312,39	23.698.969,00
11	Pajak Sarang Burung Walet	96.000.000,00	29.618.800,00	30,85	44.030.000,00
	Jumlah	24.678.108.406,00	25.785.922.730,01	104,49	24.325.109.079,54

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Pajak Daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp25.785.922.730,01 atau 104,49% dari anggaran sebesar Rp24.678.108.406,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp24.325.109.079,54 mengalami peningkatan sebesar Rp1.460.813.650,47. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan tersebut antara lain Pemerintah Kabupaten Barru telah membentuk Satuan Tugas PAD melalui SK Bupati Barru Nomor 33/BAPENDA/I/2023 yang beranggotakan lintas SKPD seperti Satpol PP dan Dinas Perizinan untuk memaksimalkan pemungutan PAD khususnya dari sektor pajak daerah. Tim ini secara kontinyu turun melakukan sosialisasi, pendekatan secara humanis sampai pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerahnya. Hasil positif dari pembentukan satgas PAD ini bisa dilihat dari meningkatnya penerimaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah.

Selain itu, Bapenda memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak daerah melalui digitalisasi pembayaran dengan memberikan beragam pilihan kanal pembayaran seperti *Mobile Banking*, QRIS dan kode billing melalui aplikasi SIMPADA. Sinergitas antar instansi dalam pengurusan pemberian Izin Usaha, IMB/PBG, maupun izin lainnya yang mempersyaratkan pelunasan pembayaran PBB-P2 dengan menggunakan sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD). Pajak MBLB juga meningkat cukup signifikan karena adanya Kerjasama dengan PT. Semen Tonasa terkait dengan vendor yang mensuplai tras, pajaknya langsung dipotong dan selanjutnya ditransfer ke rekening kas daerah Pemerintah Kabupaten Barru.

Peningkatan PPJ dipengaruhi oleh makin meningkatnya konsumsi tenaga listrik masyarakat serta adanya kegiatan di PLTU Bawasalo yang menggunakan konsumsi tenaga listrik yang cukup besar pada bulan September dan oktober 2023 sehingga penerimaan PPJ meningkat cukup signifikan pada bulan tersebut. Pajak Hotel tidak mencapai target akibat dari tingkat okupansi yang masih rendah karena tidak adanya event skala regional dan nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Barru sebagai



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

pemicu peningkatan hunian hotel secara signifikan. Demikian juga dengan Pajak Hiburan karena kurangnya event-event olahraga dan hiburan yang dilaksanakan di tahun 2023, serta tempat karaoke juga yang semakin minim pengunjung. Pajak Reklame juga mengalami peningkatan karena gencarnya penindakan terhadap obyek pajak reklame yang tidak melaksanakan kewajibannya serta sosialisasi yang dilakukan terhadap vendor reklame. Demikian juga dengan Pajak Air Tanah cukup gencarnya dilakukan sosialisasi pada wajib pajak khususnya yang bergerak di pembibitan udang dan pembuatan es balok. PBB-P2 walaupun tidak melampaui target yang ditetapkan, tetapi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, hal ini tidak terlepas dari pemberian *reward* atau penghargaan kepada para pembantu kolektor yang realisasinya mencapai diatas 90% dari target.

5.1.1.1.1 Pajak Hotel

Realisasi Pajak Hotel tahun anggaran 2023 sebesar Rp66.787.000,00 atau 42,81% dari nilai anggaran sebesar Rp156.000.000,00, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 3,29% dari realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp69.060.500,00. Dalam realisasi pajak hotel tersebut terdiri dari:

Tabel 7.17 Rincian Pajak Hotel

No	Rincian Objek	2023		2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel	156.000.000,00	66.787.000,00	69.060.500,00
	Jumlah	156.000.000,00	66.787.000,00	69.060.500,00

5.1.1.1.2 Pajak Restoran

Realisasi Pajak Restoran tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.430.063.024,00 atau 102,59% dari nilai anggaran sebesar Rp1.394.000.000,00, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 22,53% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp1.167.149.825,30. Dalam realisasi pajak restoran tersebut terdiri dari:

Tabel 7.18 Rincian Pajak Restoran

No	Rincian Objek	2023		2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Rumah Makan	480.000.000,00	168.210.212,00	101.983.795,00
2	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	95.000.000,00	106.614.420,00	71.167.572,00
3	Pajak Warung dan Sejenisnya	84.000.000,00	38.185.000,00	20.755.000,00
4	Pajak Jasa Boga/ Katering dan Sejenisnya	735.000.000,00	1.117.053.392,00	973.243.458,30



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Rincian Objek	2023		2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Jumlah		1.394.000.000,00	1.430.063.024,00	1.167.149.825,30

5.1.1.1.1.3 Pajak Hiburan

Realisasi Pajak Hiburan tahun anggaran 2023 sebesar Rp6.823.300,00 atau 13,54% dari nilai anggaran sebesar Rp50.400.000,00, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 185,33% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp2.391.375,00. Dalam realisasi pajak hiburan tersebut terdiri dari:

Tabel 7.19 Rincian Pajak Hiburan

No	Rincian Objek	2023		2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Diskotek, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	12.000.000,00	1.198.300,00	1.691.375,00
2	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	36.000.000,00	5.625.000,00	700.000,00
3	Pajak Pertandingan Olahraga	2.400.000,00	0,00	0,00
Jumlah		50.400.000,00	6.823.300,00	2.391.375,00

5.1.1.1.1.4 Pajak Reklame

Realisasi Pajak Reklame tahun anggaran 2023 sebesar Rp588.235.790,00 atau 163,40% dari nilai anggaran sebesar Rp360.000.000,00, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 38,33% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp425.247.528,00. Dalam realisasi pajak reklame tersebut terdiri dari:

Tabel 7.20 Rincian Pajak Reklame

No	Rincian Objek	2023		2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	240.000.000,00	208.365.540,00	220.897.000,00
2	Pajak Reklame Kain	120.000.000,00	379.870.250,00	204.350.528,00
Jumlah		360.000.000,00	588.235.790,00	425.247.528,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

5.1.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan tahun anggaran 2023 sebesar Rp9.198.143.190,00 atau 122,97% dari nilai anggaran sebesar Rp7.480.000.000,00, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 12,52% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp8.174.371.524,00. Dalam realisasi pajak penerangan jalan tersebut terdiri dari:

Tabel 7.21 Rincian Pajak Penerangan Jalan

No	Rincian Objek	2023		2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	7.480.000.000,00	9.198.143.190,00	8.174.371.524,00
Jumlah		7.480.000.000,00	9.198.143.190,00	8.174.371.524,00

5.1.1.1.1.6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.717.682.808,01 atau 114,35% dari nilai anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 3,88% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp5.948.366.218,24. Dalam realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut terdiri dari:

Tabel 7.22 Rincian Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan

No	Rincian Objek	2023		2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Batu Gunung/Kali	120.000.000,00	553.328.520,50	59.538.211,30
2	Sirtu	240.000.000,00	43.795.404,68	214.191.819,33
3	Pasir	600.000.000,00	64.150.991,80	60.772.885,25
4	Tanah Timbun	920.000.000,00	13.686.201,30	29.722.419,00
5	Batu Pecah	240.000.000,00	11.012.658,73	16.512.780,36
6	Trass	2.880.000.000,00	5.031.709.031,00	5.567.628.103,00
Jumlah		5.000.000.000,00	5.717.682.808,01	5.948.366.218,24

5.1.1.1.1.7 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.004.712.622,00 atau 71,54% dari nilai anggaran sebesar Rp4.200.000.000,00, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 5,21% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp3.169.741.327,00. Dalam realisasi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Tabel 7.23 Rincian Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan

No	Rincian Objek	2023		2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pemindahan Hak	3.600.000.000,00	2.129.395.154,00	2.751.893.477,00
2	Pemberian Hak Baru	600.000.000,00	875.317.468,00	417.847.850,00
Jumlah		4.200.000.000,00	3.004.712.622,00	3.169.741.327,00

5.1.1.1.1.8 Pajak Bumi dan Bangunan

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.683.876.264,00 atau 96,01% dari nilai anggaran sebesar Rp5.920.108.406,00, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,26% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp5.299.051.813,00. Dalam realisasi pajak bumi dan bangunan tersebut terdiri dari:

Tabel 7.24 Rincian Pajak Bumi Dan Bangunan

No	Rincian Objek	2023		2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	PBB-P2	5.920.108.406,00	5.683.876.264,00	5.299.051.813,00
Jumlah		5.920.108.406,00	5.683.876.264,00	5.299.051.813,00

5.1.1.1.1.9 Pajak Parkir

Realisasi Pajak Parkir tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.750.000,00 atau 104,17% dari nilai anggaran sebesar Rp3.600.000,00, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 87,50% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp2.000.000,00. Dalam realisasi pajak parkir tersebut terdiri dari:

Tabel 7.25 Rincian Pajak Parkir

No	Rincian Objek	2023		2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Parkir	3.600.000,00	3.750.000,00	2.000.000,00
Jumlah		3.600.000,00	3.750.000,00	2.000.000,00

5.1.1.1.1.10 Pajak Air Tanah

Realisasi Pajak Air Tanah tahun anggaran 2023 sebesar Rp56.229.932,00 atau 312,39% dari nilai anggaran sebesar Rp18.000.000,00, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 137,27% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp23.698.969,00. Dalam realisasi pajak air tanah tersebut terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Tabel 7.26 Rincian Pajak Air Tanah

No	Rincian Objek	2023		2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Air Tanah	18.000.000,00	56.229.932,00	23.698.969,00
Jumlah		18.000.000,00	56.229.932,00	23.698.969,00

5.1.1.1.11 Pajak Sarang Burung Walet

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet tahun anggaran 2023 sebesar Rp29.618.800,00 atau 30,85% dari nilai anggaran sebesar Rp96.000.000,00, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 32,73% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp44.030.000,00. Dalam realisasi pajak sarang burung walet tersebut terdiri dari:

Tabel 7.27 Rincian Pajak Sarang Burung Walet

No	Rincian Objek	2023		2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Sarang Burung Walet	96.000.000,00	29.618.800,00	44.030.000,00
Jumlah		96.000.000,00	29.618.800,00	44.030.000,00

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 TA 2022
Rp3.844.587.603,00 **Rp7.194.962.118,00**

Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Barru. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Barru tahun 2023 didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Tabel 7.28 Daftar Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Jasa Umum	1.982.075.109,00	1.223.360.314,00	61,72	3.772.314.580,00
2	Jasa Usaha	3.098.849.475,00	2.255.298.808,00	72,78	3.044.517.538,00
3	Perizinan	600.000.000,00	365.928.481,00	60,99	378.130.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
	Tertentu				
	Jumlah	5.680.924.584,00	3.844.587.603,00	67,68	7.194.962.118,00

Tabel diatas menunjukkan realisasi pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp3.844.587.603,00 atau 67,68% dari anggaran sebesar Rp5.680.924.584,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp7.194.962.118,00, mengalami penurunan sebesar Rp3.350.374.515,00. Salah satu faktor terjadinya penurunan ini karena Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak lagi dipungut karena perubahan status Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah serta realisasi Retribusi Pelayanan Pasar yang tidak maksimal. Masing-masing realisasi pendapatan Retribusi Daerah tahun 2023 dan 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Realisasi Retribusi Jasa Umum tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.223.360.314,00 atau lebih rendah 67,57% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp3.772.314.580,00. Dalam realisasi retribusi jasa umum tersebut terdiri dari:

Tabel 7.29 Daftar Pendapatan Retribusi Jasa Umum

No	Rincian Objek	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	2.391.421.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	90.000.000,00	126.577.000,00	140,64	105.691.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	1.696.397.250,00	874.169.050,00	51,53	1.080.283.900,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	52.307.859,00	0,00	0,00	0,00
5	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	13.370.000,00	14.605.000,00	109,24	13.411.000,00
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	100.000.000,00	196.489.264,00	196,49	170.082.180,00
7	Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus	30.000.000,00	11.520.000,00	38,40	11.425.000,00
	Jumlah	1.982.075.109,00	1.223.360.314,00	61,72	3.772.314.580,00

Tabel diatas menunjukkan anggaran pendapatan retribusi jasa umum tahun 2023 sebesar Rp1.982.075.109,00 terealisasi sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Rp1.223.360.314,00 atau 61,72%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp3.772.314.580,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.548.954.266,00. Untuk Retribusi Jasa Umum, ada yang mengalami peningkatan dan ada pula yang mengalami penurunan. Yang mengalami peningkatan realisasi penerimaan secara signifikan adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mampu mencapai target disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat melakukan pembayaran dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengelola Retribusi ini telah melakukan kerjasama dengan PT. Indonesia Power terkait pengangkutan sampah. etribusi Pelayanan Pasar mengalami penurunan dan tidak mencapai target karena masih rendahnya kesadaran para pedagang untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak atas fasilitas yang telah diberikan pemerintah di tambah lagi tidak adanya sanksi yang tegas terhadap wajib retribusi yang menunggak karena banyak pedagang yang mengeluhkan kelayakan sarana dan prasarana di lingkungan pasar. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak terealisasi karena alatnya mengalami kerusakan dan baru akan dilakukan pengadaan. Untuk Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, meningkat meskipun tidak signifikan karena sangat proaktif melakukan tera ulang ke pasar-pasar dan SPBU. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu, hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah tower yang terpasang di kabupaten Barru dan adanya penerimaan piutang dari provider. Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus tidak mencapai target karena sangat bergantung kepada permintaan masyarakat untuk melakukan penyedotan tinja, ditambah ada kecenderungan masyarakat membuat yang baru apabila bak wc penuh. Penyedotan dilakukan pada bak wc yang menggunakan fiber sehingga Dinas PUTRKP diharapkan lebih aktif melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang adanya layanan penyedotan kakus.

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah. Realisasi Retribusi Jasa Usaha tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.255.298.808,00 atau lebih rendah 25,92% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp3.044.517.538,00. Dalam realisasi retribusi jasa usaha tersebut terdiri dari:

Tabel 7.30 Daftar Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

No	Rincian Objek	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.325.792.000,00	1.154.700.000,00	87,10	1.622.425.500,00
2	Retribusi Terminal	150.000.000,00	78.628.000,00	52,42	84.230.250,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Rincian Objek	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
3	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pertokoan yang dikontrakkan	250.000.000,00	175.691.000,00	70,28	293.150.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	877.025.475,00	449.615.000,00	51,27	655.786.000,00
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	170.832.000,00	201.227.808,00	117,79	203.143.788,00
6	Retribusi Tempat Pariwisata	180.000.000,00	35.632.000,00	19,80	59.300.000,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	115.200.000,00	121.805.000,00	105,73	96.482.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	30.000.000,00	38.000.000,00	126,67	30.000.000,00
Jumlah		3.098.849.475,00	2.255.298.808,00	72,78	3.044.517.538,00

Tabel diatas menunjukkan anggaran pendapatan retribusi jasa usaha tahun 2023 sebesar Rp3.098.849.475,00 terealisasi sebesar Rp2.255.298.808,00 atau 72,78%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp3.044.517.538,00 mengalami penurunan sebesar Rp789.218.730,00. Realisasi Retribusi Jasa Usaha rata-rata mengalami penurunan yang cukup signifikan terutama pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Sewa Ruko masih banyak penghuni ruko yang belum melakukan pembayaran sewa dan Retribusi Fasilitas Pertokoan Yang Dikontrakkan berupa pemungutan Bea Pasar yang tidak maksimal. Retribusi Terminal mengalami penurunan disebabkan oleh maraknya mobil-mobil pribadi yang berubah menjadi mobil angkutan yang tidak perlu ke terminal sehingga tidak membayar retribusi.

Retribusi yang mengalami melampaui target antara lain Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga.

Retribusi Tempat Khusus Parkir, tidak mampu mencapai target disebabkan oleh pemungutan retribusi khususnya di kawasan pasar masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan portal atau *smart parking* sehingga banyak pengunjung pasar yang tidak membayar retribusi parkirnya.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan mampu mencapai target dan meningkat dibandingkan tahun lalu disebabkan oleh banyaknya kapal yang sandar dipelabuhan dan banyaknya penumpang kapal yang melakukan perjalanan.

Retribusi Tempat Pariwisata tidak mampu mencapai target akibat pemungutan retribusi tempat pariwisata hanya dilakukan di Lappalaona dan Ujungbatu dengan perjanjian bagi hasil dengan pihak ketiga.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penerimaan dari hasil penjualan bibit/gabah kering giling (GKG) yang diproduksi tahun 2022 yang baru dijual ditahun ini. Retribusi Tempat Olahraga juga mengalami peningkatan tahun ini akibat penambahan tarif sewa GOR.

5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp365.928.481,00 atau lebih rendah 3,23% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp378.130.000,00. Dalam realisasi retribusi perizinan tertentu tersebut terdiri dari:

Tabel 7.31 Daftar Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu

No	Rincian Objek	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	600.000.000,00	365.928.481,00	60,99	378.130.000,00
Jumlah		600.000.000,00	365.928.481,00	60,99	378.130.000,00

Tabel diatas menunjukkan anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu tahun 2023 sebesar Rp600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp365.928.481,00 atau 60,99%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp378.130.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.201.519,00. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan regulasi sehingga masyarakat akan membangun rumah harus melakukan pengajuan secara online melalui Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) yang belum terlalu familiar di Masyarakat.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil

Pengelolaan	TA 2023	TA 2022
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp9.922.742.013,00	Rp10.027.692.032,00

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp9.922.742.013,00 atau mencapai 105,68% dari anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp9.389.242.740,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp9.922.742.013,00 atau lebih rendah 1,05% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp10.027.692.032,00. Dalam realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Tabel 7.32 Daftar Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD	9.389.242.740,00	9.922.742.013,00	105,68	10.027.692.032,00
Jumlah		9.389.242.740,00	9.922.742.013,00	105,68	10.027.692.032,00

5.1.1.1.3.1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp9.922.742.013,00 atau lebih rendah 1,05% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp10.027.692.032,00. Dalam realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD tersebut terdiri dari:

Tabel 7.33 Daftar Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD

No.	Rincian Objek	2023		2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	9.389.242.740,00	9.922.742.013,00	10.027.692.032,00
Jumlah		9.389.242.740,00	9.922.742.013,00	10.027.692.032,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada BUMN atau Bank Sulselbar.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Pendapatan Hasil kekayaan Daerah yang dipisahkan bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal ke Perusahaan Daerah (PDAM) dan Bank Sulselbar. Karena mengalami kerugian, PDAM tidak memberikan laba sehingga bagian laba hanya diperoleh dari deviden Bank Sulselbar. Tabel diatas menunjukkan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp9.922.742.013,00 atau 105,68% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp9.389.242.740,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp10.027.692.032,00 mengalami penurunan sebesar Rp104.950.019,00. Penurunan ini sesuai dengan laba yang diperoleh melalui Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Pembangunan Daerah (BPD Sulselbar) Nomor SR/100/R/DKA/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023.

5.1.1.1.4 Pendapatan Lain- Lain PAD yang Sah	TA 2023	TA 2022
	Rp69.116.653.237,74	Rp54.077.823.550,22

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah untuk periode tahun anggaran 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 7.34 Daftar Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Jasa Giro	1.700.000.000,00	2.281.633.423,00	134,21	2.247.283.357,00
2	Pendapatan Bunga	2.500.000.000,00	3.554.310.457,93	142,17	5.042.945.185,00
3	Penerimaan Lain-lain	1.854.057.500,00	2.552.475.376,81	137,67	3.266.685.697,22
4	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	70.733.704.251,00	60.728.233.980,00	85,85	43.520.909.311,00
Jumlah		76.787.761.751,00	69.116.653.237,74	90,01	54.077.823.550,22

Tabel diatas menunjukkan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp69.116.653.237,74 atau 90,01% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp76.787.761.751,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp54.077.823.550,52 mengalami peningkatan sebesar Rp15.038.829.687,52.

5.1.1.1.4.1 Jasa Giro

Realisasi Jasa Giro tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.281.633.423,00 atau lebih tinggi 1,53% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp2.247.283.357,00. Dalam realisasi jasa giro tersebut terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Tabel 7.35 Rincian Jasa Giro

No	Rincian Objek	2023		2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.700.000.000,00	2.281.633.423,00	2.247.283.357,00
Jumlah		1.700.000.000,00	2.281.633.423,00	2.247.283.357,00

Penerimaan Jasa Giro berasal dari Rekening Giro OPD, Puskesmas, Kelurahan dan Desa. Rincian penerimaan Jasa Giro pada *Lampiran I*.

5.1.1.1.4.2 Pendapatan Bunga

Realisasi Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.554.310.457,93 atau lebih rendah 29,52,% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp5.042.945.185,00.

Pendapatan bunga diperoleh dari antara lain penempatan uang pemerintah daerah ke Bank Sulselbar berupa bunga deposito dan penempatan uang di Bank Umum Negara (BUN) berupa dana remunerasi Treasury Deposit Facility (TDF). TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI).

Tabel 7.36 Rincian Pendapatan Bunga

No	Rincian Objek	2023		2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Bunga Deposito	2.500.000.000,00	3.500.753.508,93	5.042.945.185,00
2	Remunerasi TDF	0,00	53.556.949,00	0,00
Jumlah		2.500.000.000,00	3.554.310.457,93	5.042.945.185,00

Pendapatan bunga deposito diperoleh dari deposito jangka 1 bulan yang diperpanjang secara otomatis jika pada saat jatuh tempo belum digunakan. Pembentukan deposito dilakukan pada rekening nomor 031-001-000000826-8 dan 031-001-000003424-2 masing-masing sebesar Rp60.000.000.000,00 dan Rp80.000.000.000,00. Suku bunga adalah 4,25% periode maret sampai juni dan 4,50% periode agustus sampai september. Penerimaan bunga deposito dimasukkan dalam rekening 031-001-000003424-2. Tahun 2023 ini, realisasi pendapatan bunga deposito sebesar Rp3.554.310.457,93 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp5.042.945.185,00 menurun sebesar Rp1.488.634.727,07. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah pembentukan deposito sebesar Rp140.000.000.000,00 sedangkan tahun 2022 hanya Rp160.000.000.000,00. Adapun rincian penerimaan bunga deposito dapat dilihat pada *lampiran Ia*.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Tabel 7.37 Daftar Pembentukan Deposito Pemda Barru pada Bank Sulselbar

No	Periode Pembentukan	Nomor Rekening	Suku Bunga	Kode Bilyet	Nominal
1	15 Mar 2023 s.d 15 Apr 2023	031-001-000000826-8	4,25%	B 050760	10.000.000.000,00
2	15 Mar 2023 s.d 15 Apr 2023	031-001-000003424-2	4,25%	B 050761	10.000.000.000,00
3	16 Mar 2023 s.d 16 Apr 2023	031-001-000000826-8	4,25%	B 050762	10.000.000.000,00
4	16 Mar 2023 s.d 16 Apr 2023	031-001-000003424-2	4,25%	B 050763	10.000.000.000,00
5	17 Mar 2023 s.d 17 Apr 2023	031-001-000003424-2	4,25%	B 050764	10.000.000.000,00
6	05 Mei 2023 s.d 05 Jun 2023	031-001-000003424-2	4,25%	B 050773	10.000.000.000,00
7	05 Mei 2023 s.d 05 Jun 2023	031-001-000000826-8	4,25%	B 050774	10.000.000.000,00
8	08 Mei 2023 s.d 08 Jun 2023	031-001-000003424-2	4,25%	B 050775	10.000.000.000,00
9	08 Mei 2023 s.d 08 Jun 2023	031-001-000000826-8	4,25%	B 050776	10.000.000.000,00
10	09 Mei 2023 s.d 09 Jun 2023	031-001-000000826-8	4,25%	B 050777	10.000.000.000,00
11	09 Mei 2023 s.d 09 Jun 2023	031-001-000003424-2	4,25%	B 050778	10.000.000.000,00
12	18 Ags 2023 s.d 18 Sep 2023	031-001-000003424-2	4,50%	DD 2030271	10.000.000.000,00
13	21 Ags 2023 s.d 21 Sep 2023	031-001-000003424-2	4,50%	DD 2030272	10.000.000.000,00
14	22 Ags 2023 s.d 22 Sep 2023	031-001-000000826-8	4,25%	DD 2030273	10.000.000.000,00
Total					140.000.000.000,00

5.1.1.1.4.3 Penerimaan Lain-Lain

Realisasi Penerimaan Lain-lain pada Tahun 2023 sebesar Rp2.552.475.376,81 atau 137,67% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi yang melampaui target disebabkan oleh antara lain pengembalian Denda Keterlambatan dan Setoran Dana Kelebihan Bayar (kekurangan volume pekerjaan). Adapun rincian dari Penerimaan Lain-Lain sebagai berikut:

Tabel 7.38 Daftar Rincian Penerimaan Lain-lain

No	Jenis Penerimaan	Realisasi 2023 (Rp)
	Penerimaan Lain-Lain terdiri dari:	
1	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjudian	61.834.350,00
2	Pengembalian kelebihan Bayar/ Kekurangan Volume Pekerjaan/ Denda Keterlambatan	2.232.176.849,31
3	Pengembalian Gaji/Tunjangan	58.147.300,00
4	Pendapatan Denda Pajak Daerah (PBB-P2)	6.590.524,00
5	Pendapatan Denda Retribusi Daerah (PBG)	270.162,00
6	Pengembalian Dana BOSDA	2.400.000,00
7	Potongan Kasda	23.055.521,59
8	Sanksi Administrasi Keterlambatan Penyetoran Pajak Restoran	17.209.405,70
9	Temuan KESRA	3.000.000,00
10	Pengembalian Tuntutan Ganti Rugi	9.995.000,00
11	Setoran PAD Getah Pinus	64.209.103,00
12	Pembayaran Pelayanan Kebersihan/Persampahan dari PLTU	64.280.000,00
13	Lain-Lain (Temuan, transfer, sisa GU)	9.307.161,21
	Jumlah	2.552.475.376,81

Penerimaan Lain-Lain sebesar 64.280.000 merupakan pembayaran dari PLTU atas pelayanan kebersihan/persampahan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru dengan PT. Indonesia Power PLTU Barru OMU tentang pengangkutan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dari PLTU Barru menuju tempat pemrosesan akhir sampah (TPA). Rincian Penerimaan Lain-Lain dapat dilihat pada *Lampiran 1b*.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

5.1.1.1.4.4 Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp60.728.233.980,00 atau lebih tinggi 39,54,% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp43.520.909.311,00.

5.1.1.2 Pendapatan	TA 2023	TA 2022
Transfer	Rp779.755.521.172,00	Rp763.848.005.135,70

Realisasi Pendapatan Transfer pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp779.755.521.172,00 atau mencapai 98,68% dari anggaran pendapatan transfer pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp790.176.622.849,00. Realisasi Pendapatan Transfer tahun anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp15.907.516.036,30 atau lebih tinggi 2,08% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp763.848.005.135,70. Dalam realisasi pendapatan transfer tersebut berasal dari:

Tabel 7.39 Daftar Pendapatan Transfer

No	Jenis	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	710.347.717.892,00	701.463.994.931,00	98,75	705.893.635.719,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	79.828.904.957,00	78.291.526.241,00	98,07	57.954.369.416,70
Jumlah		790.176.622.849,00	779.755.521.172,00	98,68	763.848.005.135,70

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp701.463.994.931,00 atau mencapai 98,75% dari anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp710.347.717.892,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp701.463.994.931,00 atau lebih rendah 0,63% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp705.893.635.719,00. Dalam realisasi pendapatan transfer Pemerintah Pusat tersebut berasal dari:

Tabel 7.40 Daftar Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	objek	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Dana Perimbangan	671.608.095.892,00	662.724.372.931,00	98,68	653.050.902.719,00
2	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	9.909.264.000,00
3	Dana Desa	38.739.622.000,00	38.739.622.000,00	100,00	42.933.469.000,00
Jumlah		710.347.717.892,00	701.463.994.931,00	98,75	705.893.635.719,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Realisasi Dana Perimbangan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp662.724.372.931,00 atau lebih tinggi 1,48% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp653.050.902.719,00. Dalam realisasi Dana Perimbangan tersebut berasal dari:

Tabel 7.41 Rincian Dana Perimbangan

No	Rincian Objek	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Dana Transfer Umum-DBH	10.932.661.000,00	13.115.486.792,00	119,97	25.029.785.533,00
2	Dana Transfer Umum-DAU	499.568.872.000,00	499.391.128.979,00	99,96	479.792.789.690,00
3	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	40.946.483.000,00	38.885.902.382,00	94,97	63.475.906.509,00
4	Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	120.160.079.892,00	111.331.854.778,00	92,65	84.752.420.987,00
Jumlah		671.608.095.892,00	662.724.372.931,00	98,68	653.050.902.719,00

5.1.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil

TA 2023 **TA 2022**
Rp13.115.486.792,00 **Rp25.029.785.533,00**

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp13.115.486.792,00 atau 119,97% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.932.661.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.42 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil

No.	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	DBH PBB	678.957.000,00	2.861.782.792,00	421,50	5.753.225.267,00
2	DBH PPh	5.050.646.000,00	5.050.646.000,00	100,00	6.439.159.724,00
3	DBH Cukai Tembakau	312.690.000,00	312.690.000,00	100,00	224.644.690,00
4	DBH SDA Minyak Bumi	0,00	3.000,00	0,00	150.287,00
5	DBH SDA Gas Bumi	221.814.000,00	221.811.000,00	100,00	729.644.000,00
6	DBH SDA Minerba	1.904.644.000,00	1.904.644.000,00	100,00	9.869.612.558,00
7	DBH SDA Kehutanan	1.023.635.000,00	1.023.635.000,00	100,00	55.038.007,00
8	DBH SDA Perikanan	1.740.275.000,00	1.740.275.000,00	100,00	1.958.311.000,00
Jumlah		10.932.661.000,00	13.115.486.792,00	119,97	25.029.785.533,00

Tabel diatas menunjukkan penurunan dana bagi hasil tahun 2023 dibanding tahun 2022 sebesar Rp11.914.298.741,00 atau sebesar 47,60%. Dana Bagi Hasil PBB sebesar Rp2.861.782.792,00 merupakan akumulasi dari realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil PBB sebesar Rp678.957.000,00 ditambah realisasi penerimaan dana Treasury Deposit Facility (TDF) pokok sebesar Rp2.182.825.792,00. TDF adalah fasilitas



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI).

5.1.1.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum	TA 2023	TA 2022
	Rp499.391.128.979,00	Rp479.792.789.690,00

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp499.568.872.000,00 dan terealisasi sebesar Rp499.391.128.979,00 atau 99,96%. Jika dibandingkan tahun 2022 DAU mengalami peningkatan sebesar Rp19.598.339.289,00. Peningkatan ini terjadi disebabkan oleh adanya penambahan biaya PPPK tahun 2023.

5.1.1.2.1.1.3 Dana Alokasi Khusus Fisik	TA 2023	TA 2022
	Rp38.885.902.382,00	Rp63.475.906.509,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik dan non fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK terdiri dari DAK fisik dan DAK non fisik. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp38.885.902.382,00 atau 94,97% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp40.946.483.000,00. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 7.43 Daftar Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik

No.	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	DAK Bidang Kesehatan	12.384.159.000,00	11.076.590.394,00	89,44	44.728.295.602,00
2	DAK Bidang Pendidikan	14.270.233.000,00	13.897.168.988,00	97,39	4.555.258.500,00
3	DAK Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00	4.094.389.769,00
4	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	14.292.091.000,00	13.912.143.000,00	97,34	0,00
5	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	0,00	0,00	0,00	5.036.945.638,00
6	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	0,00	0,00	0,00	4.012.416.000,00
7	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan	0,00	0,00	0,00	1.048.601.000,00
Jumlah		40.946.483.000,00	38.885.902.382,00	94,97	63.475.906.509,00

Adapun realisasi penyerapan Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2023 adalah sebesar Rp32.337.534.550,00, dapat dirinci pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Tabel 7.44 Daftar Realisasi Penyerapan DAK Fisik Tahun 2023

No	Bidang	Realisasi Penerimaan di RKUD (Rp)	Realisasi Pembayaran dari RKUD (melalui SP2D) (Rp)	%	Saldo di RKUD (Rp)
1	Bidang Kesehatan	11.076.590.394,00	10.048.905.101,00	90,72	1.027.685.293,00
2	DAK Bidang Pendidikan	13.897.168.988,00	12.967.494.199,00	93,31	929.674.789,00
3	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	13.912.143.000,00	9.321.135.250,00	67,00	4.591.007.750,00
Jumlah		38.885.902.382,00	32.337.534.550,00	83,16	6.548.367.832,00

5.1.1.2.1.1.4 Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2023 TA 2022
Rp111.331.854.778,00 **Rp84.752.420.987,00**

DAK non fisik terealisasi sebesar Rp111.331.854.778,00 atau sebesar 92,65% dari target yang ditetapkan sebesar Rp120.160.079.892,00. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 7.45 Daftar Pendapatan DAK Non Fisik Tahun 2023

No.	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Dana BOS Reguler	23.836.940.000,00	22.979.020.278,00	96,40	0,00
2	Dana BOS Kinerja	1.595.000.000,00	1.560.000.000,00	97,81	0,00
3	Dana Tunjangan Profesi Guru	65.959.118.000,00	65.959.116.000,00	100,00	63.453.031.520,00
4	Dana Tambahan Penghasilan Guru	1.639.500.000,00	1.639.500.000,00	100,00	1.620.000.000,00
5	Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	15.027.688.892,00	8.115.239.700,00	54,00	10.367.860.397,00
6	Dana Pengawasan Obat dan Makanan	402.648.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.748.840.000,00	2.210.411.950,00	80,41	1.414.728.600,00
8	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.127.400.000,00	4.102.422.000,00	99,39	4.068.000.000,00
9	Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	3.733.300.000,00	3.713.050.000,00	99,46	1.850.400.000,00
10	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	420.370.000,00	420.330.000,00	99,99	404.200.000,00
11	Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	669.152.082,00
12	Dana Fasilitas Penanaman Modal	438.200.000,00	422.885.000,00	96,51	265.348.388,00
13	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	231.075.000,00	209.879.850,00	90,83	639.700.000,00
Jumlah		120.160.079.892,00	111.331.854.778,00	92,65	84.752.420.987,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah

Realisasi Insentif Daerah tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau lebih rendah 100,00% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp9.909.264.000,00.

5.1.1.2.1.3 Dana Desa

Realisasi Dana Desa tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp38.739.622.000,00 atau lebih rendah 9,77% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp42.933.469.000,00.

5.1.1.2.2 Pendapatan	TA 2023	TA 2022
Transfer Antar Daerah	Rp78.291.526.241,00	Rp57.954.369.416,70

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah (Pemerintah Provinsi) pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp78.291.526.241,00 atau 98,07% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp79.828.904.957,00. Realisasi Pendapatan Transfer Antar daerah tahun anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp78.291.526.241,00 atau lebih tinggi 35,09% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp57.954.369.416,70.

Tabel 7.46 Daftar Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023

No	Objek	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	54.892.183.997,00	61.253.240.366,00	111,59	49.829.122.855,00
2	Bantuan Keuangan	24.936.720.960,00	17.038.285.875,00	68,33	8.125.246.561,70
Jumlah		79.828.904.957,00	78.291.526.241,00	98,07	57.954.369.416,70

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp61.253.240.366,00 atau lebih tinggi 22,93% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp49.829.122.855,00.

Pendapatan Bagi Hasil merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.47 Daftar Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Pemerintah Provinsi)

No.	Rincian Objek	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	10.972.238.704,00	12.790.520.355,00	116,57	9.853.900.391,00
2	Bagi Hasil		9.418.334.066,00		7.612.935.461,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Rincian Objek	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
	dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.221.053.025,00		130,43	
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.079.232.029,00	24.442.154.079,00	115,95	18.015.157.206,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	57.061.654,00	86.116.044,00	150,92	63.113.051,00
5	Pajak Rokok	15.562.598.585,00	14.516.115.822,00	93,28	14.284.016.746,00
Jumlah		54.892.183.997,00	61.253.240.366,00	111,59	49.829.122.855,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi tahun 2023 terdiri dari penerimaan transfer Bagi Hasil Pajak Kendaraan bulan agustus sampai dengan desember tahun 2022 dan Pajak Rokok triwulan 4 tahun 2022 yang dialokasikan di tahun 2023 dan penerimaan transfer Bagi Hasil Pajak Kendaraan bulan januari sampai dengan september 2023 serta penerimaan Pajak Rokok triwulan 1 sampai dengan triwulan 3 tahun 2023.

5.1.1.2.2.2 Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp17.038.285.875,00 atau 68,33% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp24.936.720.960,00. Realisasi Bantuan Keuangan tahun anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp17.038.285.875,00 atau lebih tinggi 109,70% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp8.125.246.561,70.

Tabel 7.48 Daftar Bantuan Keuangan Provinsi

No.	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Bantuan Keuangan Umum	24.936.720.960,00	17.038.285.875,00	68,33	5.442.192.000,00
2	Bantuan Keuangan Khusus	0,00	0,00	0,00	2.683.054.561,70
Jumlah		24.936.720.960,00	17.038.285.875,00	68,33	8.125.246.561,70

Bantuan keuangan merupakan upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan.

Bantuan Keuangan Umum antara lain Bantuan Kesehatan Gratis, Bantuan penanganan Stunting dan Gizi Buruk, Bantuan peningkatan jalan



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

dan Bantuan peningkatan UMKM dan Bantuan Subsidi Transportasi Darat.

Bantuan Kesehatan Gratis sebesar Rp4.322.556.000,00 yang merupakan program pelayanan kesehatan gratis dalam bentuk pembayaran Iuran BPJS kepada peserta penerima bantuan iuran (PBI). OPD yang menangani program ini adalah Dinas Kesehatan.

Bantuan penanganan Stunting merupakan upaya pemerintah dalam melakukan percepatan pencegahan stunting dan gizi buruk di desa dengan realisasi sebesar Rp200.000.000,00. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan (janin hingga anak berusia 23 bulan). DPMDPPKBP3A selaku OPD yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengawasan terhadap pemberdayaan dan pemerintahan desa khususnya terkait dengan Program Percepatan Pencegahan Stunting di desa.

Bantuan Peningkatan Jalan merupakan bantuan Pemerintah Provinsi yang ditujukan untuk peningkatan jalan ruas Parigi – Bungoro dan jalan ruas Lajoanging – Cappabenteng. Peningkatan jalan ruas Parigi – Bungoro (Bone-Barru-Pangkep/ jalan ruas Gattareng – Bulobulo) di Kabupaten Barru sebesar Rp9.815.019.000,00. Bantuan ini merupakan lanjutan dari tahun 2021. Peningkatan jalan ruas Lajoanging – Cappabenteng sebesar Rp1.879.000.000,00. OPD yang menangani bantuan ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Bantuan Peningkatan Kualitas UMKM sebesar Rp300.000.000,00 merupakan program Pemerintah Provinsi dalam rangka memajukan sektor UMKM di Kabupaten Barru sehingga meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha di tingkat lokal. Program ini menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Adapun jenis kegiatannya antara lain pelaksanaan pelatihan labelling sebanyak 60 orang yang merupakan pelaku usaha binaan PKK sekabupaten Barru, penyelenggaraan pameran Hari Kesatuan Gerak PKK dan pameran Pekan Raya Sulsel dengan memamerkan produk pelaku usaha binaan PKK.

Bantuan Subsidi Transportasi Darat sebesar Rp521.710.875,00 merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi untuk mendanai pengadaan jasa operator transportasi yang menghubungkan kabupaten Soppeng dan Barru untuk digunakan oleh masyarakat yang akan menggunakan kereta api. OPD yang menangani bantuan ini adalah Dinas Perhubungan.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

5.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	TA 2023	TA 2022
		Rp0,00	Rp33.430.213.891,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp33.430.213.891,00 atau lebih rendah 100,00% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp33.430.213.891,00. Dalam realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut berasal dari:

Tabel 7.49 Daftar lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah

No.	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan	0,00	0,00	0,00	33.430.213.891,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	33.430.213.891,00

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah tahun anggaran 2023 sebesar Rp0,00.

5.1.1.3.2 Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan

Realisasi Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau lebih rendah 100,00% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp33.430.213.891,00. Dalam realisasi Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan tersebut berasal dari:

Tabel 7.50 Daftar Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan

No	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Lain-Lain Pendapatan	0,00	0,00	0,00	24.063.860.031,00
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	9.366.353.860,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	33.430.213.891,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

5.1.1.3.1.1 Lain-Lain Pendapatan

Realisasi Lain-Lain Pendapatan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau lebih rendah 100,00% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp24.063.860.031,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan tahun 2022 merupakan pendapatan hibah dana BOS yang pada tahun 2023 berpindah numenklatur ke Pendapatan Dana Perimbangan rekening Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sehingga nilai realisasi Lain-Lain Pendapatan menjadi nol rupiah. Dalam realisasi Lain-Lain Pendapatan tersebut berasal dari:

Tabel 7.51 Daftar Lain-Lain Pendapatan

No	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	24.063.860.031,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	24.063.860.031,00

5.1.1.3.1.2 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau lebih rendah 100,00% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp9.366.353.860,00. Untuk Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tahun anggaran 2023 telah berpindah numenklatur ke Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah rekening Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan, sehingga nilai realisasinya menjadi nol rupiah.

5.1.2 BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah pada tahun 2023 berjumlah Rp906.753.762.122,58 atau sebesar 89,99% dari anggaran belanja sebesar Rp1.007.608.922.840,00. Realisasi tersebut lebih tinggi 1,43% dibandingkan dengan belanja tahun 2022 yang berjumlah Rp893.989.998.349,00. Belanja yang berkenaan dengan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.52 Daftar Rincian Realisasi Belanja

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Operasi	730.275.965.899,00	665.057.375.056,10	91,07	647.181.906.392,00
2	Belanja Modal	181.612.170.854,00	148.016.364.234,00	81,50	145.652.719.665,00
3	Belanja Tak Terduga	2.779.948.936,00	839.982.105,48	30,22	5.498.981.654,00
4	Belanja Transfer	92.940.837.151,00	92.840.040.727,00	99,89	95.656.390.638,00
Jumlah		1.007.608.922.840,00	906.753.762.122,58	89,99	893.989.998.349,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

5.1.2.1 Belanja Operasi TA 2023 TA 2022
Rp665.057.375.056,10 **Rp647.181.906.392,00**

Realisasi belanja operasi pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp665.057.375.056,10 atau 91,07% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp730.275.965.899,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.53 Daftar Rincian Belanja Operasi

No.	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	414.288.769.125,00	380.173.392.967,00	91,77	383.900.225.528,00
2	Belanja Barang dan Jasa	285.048.705.234,00	258.845.601.745,10	90,81	250.638.718.839,00
3	Belanja Bunga	2.530.000.000,00	2.088.449.782,00	82,55	1.374.006.968,00
4	Belanja Subsidi	1.200.000.000,00	313.026.525,00	26,09	0,00
5	Belanja Hibah	27.208.491.540,00	23.636.904.037,00	86,87	9.699.655.057,00
6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	1.569.300.000,00
Jumlah		730.275.965.899,00	665.057.375.056,10	91,07	647.181.906.392,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Operasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp730.275.965.899,00 terealisasi sebesar Rp665.057.375.056,10 atau 91,07% yang berarti mengalami penurunan atau tidak mencapai target sebesar Rp65.218.590.842,90. Realisasi tahun anggaran 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp647.181.906.392,00 mengalami peningkatan sebesar Rp17.875.468.664,10. Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai TA 2023 TA 2022
Rp380.173.392.967,00 **Rp383.900.225.528,00**

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya, Gaji dan Tunjangan DPRD, Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.54 Daftar Belanja Pegawai

No.	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan ASN	300.630.711.892,00	270.687.335.363,00	90,04	271.527.526.091,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	101.746.350.426,00	99.125.430.859,00	97,42	102.152.982.511,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					
3	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	724.949.709,00	475.897.189,00	65,65	308.963.990,00
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	163.961.108,00	7.532.052,00	4,59	80.194.601,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	10.350.000,00
4	Gaji dan Tunjangan DPRD	9.948.517.884,00	9.216.235.036,00	92,64	9.138.465.195,00
5	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	583.398.111,00	170.082.480,00	29,15	170.663.140,00
6	Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan KDH/WKDH	490.879.995,00	490.879.988,00	100,00	511.080.000,00
Jumlah		414.288.769.125,00	380.173.392.967,00	91,77	383.900.225.528,00

Tabel diatas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp414.288.769.125,00 terealisasi sebesar Rp380.173.392.967,00 atau 91,77% yang berarti mengalami penurunan atau tidak mencapai target sebesar Rp34.115.376.158,00. Realisasi tahun anggaran 2023 jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp383.900.225.528,00 mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh banyaknya ASN yang pensiun dan pindah keluar, realisasi penerimaan retribusi daerah yang tidak mencapai target dan tidak terealisasinya belanja honorarium pengadaan barang dan jasa. Dalam mengukur kinerja pegawai, indikator yang digunakan adalah kedisiplinan dan kinerja.

Insentif diberikan atas pemungutan pajak dan retribusi yang berlaku. Insentif diberikan apabila telah mencapai target pendapatan yang telah ditentukan. Target yang harus dicapai antara lain di triwulan pertama sebesar 15%, triwulan kedua 40%, triwulan ketiga 75% dan triwulan keempat 100%. Insentif akan dibayarkan secara pertriwulan.

5.1.2.1.2 Belanja	TA 2023	TA 2022
Barang dan Jasa	Rp258.845.601.745,10	Rp250.638.718.839,00

Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Bahan Material, Jasa Pihak Ketiga, Cetak dan Penggandaan, Sewa-Sewa, Makanan dan Minuman, Pakaian Dinas dan Perjalanan Dinas, dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 7.55 Daftar Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Barang Habis Pakai	42.270.753.837,00	36.492.666.970,00	86,33	41.682.617.870,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	4.700.000,00	4.650.000,00	98,94	284.000,00
3	Belanja Jasa Kantor	46.740.674.902,00	43.429.066.145,00	92,91	58.264.782.899,00
4	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	38.811.694.344,00	38.673.771.844,00	99,64	34.246.416.490,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.494.278.840,00	1.391.853.034,00	93,15	674.620.412,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	771.705.000,00	511.487.062,00	66,28	935.126.120,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.000.000,00	0,00	0,00	19.557.491,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	158.316.000,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	995.490.000,00	888.465.000,00	89,25	2.484.314.750,00
11	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
12	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.213.417.750,00	2.040.155.005,00	92,17	2.426.279.193,00
13	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.209.508.065,00	1.111.047.186,00	91,86	2.196.588.187,00
14	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.563.400.000,00	2.280.416.750,00	88,96	1.816.502.948,00
15	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	13.000.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.504.166.750,00	34.063.010.977,00	78,30	31.165.254.281,00
17	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	3.367.410.000,00	2.904.191.000,00	86,24	4.265.629.350,00
18	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	18.632.326.750,00	17.429.136.315,00	93,54	7.173.254.019,00
19	Belanja Barang dan Jasa BOS	21.196.980.000,00	20.002.018.804,00	94,36	19.544.276.871,00
20	Belanja Barang dan Jasa BLUD	61.256.948.996,00	57.621.415.653,10	94,07	43.559.897.958,00
Jumlah		285.048.705.234,00	258.845.601.745,10	90,81	250.638.718.839,00

Tabel diatas menunjukkan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp258.845.601.745,10 atau 90,81% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp285.048.705.234,00. Dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp250.638.718.839,00 mengalami peningkatan sebesar Rp8.206.882.906,10. Belanja Barang Habis Pakai sebesar Rp36.492.666.970,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.56 Daftar Belanja Barang Habis Pakai

No.	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	223.950.512,00	201.945.875,00	90,17	83.063.250,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	17.771.325,00	16.551.321,00	93,13	25.254.500,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.428.296.350,00	1.329.532.811,00	93,09	1.209.070.176,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	299.846.900,00	271.830.900,00	90,66	407.756.550,00
6	Belanja Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00
7	Belanja Bahan Isi Tabung Gas	23.438.000,00	20.859.000,00	89,00	21.987.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.777.382.501,00	2.250.245.848,00	81,02	1.465.605.532,00
10	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan	423.988.000,00	410.556.000,00	96,83	72.760.191,00
11	Belanja Suku Cadang Alat Besar	147.257.400,00	140.541.000,00	95,44	800.000,00
12	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00
13	Belanja Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
14	Belanja Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Suku Cadang Alat Bengkel	710.000,00	710.000,00	100,00	24.370.000,00
16	Belanja Suku Cadang Lainnya	3.553.500,00	2.616.632,00	73,64	235.425.000,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.440.345.675,00	1.977.974.530,00	81,05	1.500.813.543,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	599.738.650,00	538.760.424,00	89,83	374.193.000,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.658.098.331,00	2.257.466.352,00	84,93	2.182.872.484,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	14.978.000,00	11.925.000,00	79,62	12.670.000,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	50.000,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	539.124.850,00	501.897.631,00	93,09	53.390.730,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	96.256.350,00	83.314.880,00	86,56	399.722.466,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	866.546.950,00	817.102.000,00	94,29	1.095.584.550,00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	473.879.500,00	445.681.040,00	94,05	191.647.000,00
26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	104.190.000,00	102.247.000,00	98,14	145.749.860,00
27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	1.800.000,00
28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	178.612.850,00	171.304.986,00	95,91	6.534.815.155,00
29	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.706.760.213,00	4.766.013.635,00	83,52	1.840.758.856,00
30	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.056.741.266,00	784.785.893,00	74,26	147.359.933,00
31	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.700.549.850,00	4.571.237.050,00	97,25	10.424.066.797,00
32	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk	953.528.164,00	582.859.920,00	61,13	945.626.236,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
	Dijual/Diserahkan Lainnya				
33	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.769.219.750,00	3.347.625.625,00	120,89	2.565.125.619,00
34	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	625.000,00	625.000,00	100,00	2.100.000,00
35	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.977.900,00	1.826.800,00	92,36	1.400.000,00
36	Belanja Persediaan Penelitian-Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
37	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.743.851.000,00	4.684.880.105,00	81,56	4.095.076.748,00
38	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.395.053.500,00	3.344.772.345,00	98,52	2.728.423.495,00
39	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	317.200.000,00	313.674.617,00	98,89	260.730.350,00
40	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.246.032.000,00	65.457.600,00	5,25	267.345.690,00
42	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.533.278.050,00	1.055.638.150,00	68,85	1.469.691.646,00
43	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	69.380.000,00
44	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	75.000.000,00	74.860.000,00	99,81	104.092.500,00
45	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	70.000.000,00	69.500.000,00	99,29	87.000.000,00
46	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	44.160.000,00
47	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	719.440.000,00	718.070.000,00	99,81	0,00
48	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	77.500.000,00	75.625.000,00	97,58	78.985.750,00
49	Belanja Pakaian Siaga	0,00	0,00	0,00	10.550.000,00
50	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
51	Belanja Pakaian KORPRI	3.000.000,00	2.715.000,00	90,50	3.000.000,00
52	Belanja Pakaian Adat Daerah	128.600.000,00	128.550.000,00	99,96	92.146.250,00
53	Belanja Pakaian Olahraga	167.335.000,00	69.275.000,00	41,40	113.591.150,00
54	Belanja Pakaian Paskibraka	149.196.500,00	144.712.000,00	96,99	181.085.863,00
55	Belanja Pakaian Jas/Safari	40.000.000,00	39.000.000,00	97,50	100.000.000,00
	Jumlah	42.270.753.837,00	36.492.666.970,00	86,33	41.682.617.870,00

Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat tahun 2023 adalah sebesar Rp4.571.237.050,00 dan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya tahun 2023 sebesar Rp582.859.920,00 merupakan Belanja Barang Habis Pakai dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Tabel 7.57 Daftar Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

No	SKPD	Kegiatan	Keterangan	Jumlah
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya				
1	Dinas Pendidikan	Pengembangan TK dan PAUD	Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya TK Kartini Madello	107.884.704,00
			Perencanaan Pembangunan Ruang UKS dan Area Alar Bermain PAUD Disdikbud	11.800.000,00
			Pembangunan PAUD Nurul Asa Kuru-Kuru	189.736.280,00
			Pembangunan Area Bermain Beserta Perabotnya TK Kartini Madello	156.562.186,00
			Pengawasan Pembangunan PAUD Kuru-Kuru	14.901.750,00
2	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga		Pengadaan Bahan Pameran Pekan Raya Sulsel (sarung)	600.000,00
3	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		Cetak Buku Statistik Sektoral (DDA, KCA, PDRB) Tahun 2023	52.625.000,00
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian	Pgdn Benih Jagung, Benih Jagung Hibrida Umum I sebesar 390 kg	48.750.000,00
Jumlah				582.859.920,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				
1	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana dengan Nilai Honor PPK @2.400.000,00 dan pembayaran pekerjaan @1.248.400.000,00	1.250.800.000,00
		Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembayaran tahap I dan II pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan Desa Palakka Kec. Barru	123.923.500,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyediaan Logistik penyelamatan dan Evakuasi korban bencana kabupaten/Kota	Pengadaan Terpal lipat untuk penyediaan Logistik penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	5.000.000,00
3	Dinas Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis dan ODGJ	Penyediaan Bahan Sandang	4.075.000,00
		Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Penyediaan Bahan Pangan dan Sandang	31.400.000,00
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar dan Lansia	Penyediaan Bahan Sandang	18.360.000,00
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti	Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.600.000,00
4	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang menjadi	Pengadaan Bola	18.888.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Kegiatan	Keterangan	Jumlah
		kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi pemberhentian	penyerahan cendramata pensiun	4.410.000,00
6	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Pemberdayaan Usaha Mikro yg Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dg para pemangku	Pengadaan Bantuan Alat Pertukangan Kayu dan Mesin Jahit	87.584.550,00
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pengadaan Telur	Pengadaan Telur untuk tujuh orang dari kelompok sadar stunting antara lain: Safriati 37 rak, Rosdiana 136 rak, Irma 100 rak, Gustina 120 rak, Mila 122 rak, Rizanti 125 rak, Amila 160 rak	40.000.000,00
		Pengadaan Ternak Sapi Bali Betina	Pengadaan Ternak Sapi Bali Betina untuk satu Klp Tani MamminasaE @ 14 ekor	112.000.000,00
		Pengadaan Ternak Itik	Pengadaan bibit Ternak Itik untuk 14 Klp Tani antara lain itik jantan sebanyak 423 ekor dan itik betina sebanyak 3.962 ekor	82.000.000,00
		Pengadaan Ternak Itik	Pengadaan itik untuk Sembilan Klp Tani antara lain: 3.870 ekor itik betina dan 430 ekor itik jantan	595.410.000,00
		Pengadaan Traktor Roda 2 dan Cultivator	Pengadaan untuk Delapan Klp Tani masing-masing Traktor Roda 2 sebanyak 7 unit untuk tujuh kelompok dan Cultivator 1 unit untuk 1 kelompok	166.130.000,00
		Pengadaan Handsprayer Elektrik	Pengadaan untuk Dua puluh Klp Tani masing-masing 10 unit	197.000.000,00
		Pengadaan Handsprayer Plastik	Pengadaan Handsprayer Plastik sebanyak 930 unit untuk 94 Klp Tani	734.000.000,00
		Pengadaan Pupuk Organik Cair	Pengadaan Pupuk Organik Cair sebanyak 14.495,5 liter untuk 127 Klp Tani	1.094.400.000,00
8	Kecamatan Soppeng Riaja	Pemberian Makanan Tambahan untuk Penurunan Stunting	Pengadaan Susu Bayi dan Telur Ayam Ras untuk Kelurahan Mangkoso dan Kuru-Kuru	4.256.000,00
Jumlah				4.571.237.050,00

Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2023 adalah sebesar Rp2.904.191.000,00 merupakan Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Tabel 7.58 Daftar Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat

No	SKPD	Kegiatan	Keterangan	Jumlah
Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan				
1	Dinas Pendidikan	Kegiatan Festival Budaya	Salempang untuk pemilihan duta Budaya tahun 2023	4.000.000,00
		Kegiatan Permainan Rakyat	Hadiah Piala/Trophy	3.450.000,00
		Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SD dan SMP	Honorarium Juri dan Panitia	28.041.000,00
		Kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Tingkat Kabupaten Barru	Honorarium Juri dan Panitia, trophy, serta Transpor Peserta dan Pendamping	15.000.000,00
		Kegiatan Olimpiade Sains Nasional Tingkat SD	Dana pembinaan OSN SD	5.000.000,00
2	Dinas PMD, PP dan KB, PP dan PA	Jambore Dasawisma	Hadiah Piala/Trophy	2.100.000,00
		Pemilihan Duta Anak Tahun 2023	Hadiah Piala/Trophy dan Salempang	2.250.000,00
		Pemilihan Duta Genre Tahun 2023	Hadiah Piala/Trophy dan Salempang	4.000.000,00
		Hari Anak Nasional (HAN) Tk. Kab. Barru Tahun 2023	Hadiah lomba, bingkisan dan Trophy	6.250.000,00
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.	Hadiah lomba desa	20.000.000,00
3	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Promosi Pariwisata	Hadiah berupa Uang dan Piala/trophy untuk Juara 1, 2 dan 3 Lomba Duta Wisata	17.000.000,00
4	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Hadiah Juara Lomba Cerdas Cermat dan Pidato "Mpok Darti Awards 2023"	6.000.000,00
5	Dinas Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian dan Petani di Kecamatan dan Desa	Hadiah berupa Uang untuk Lomba Klp Tani Rp1.800.000,00, hadiah bagi BPP berprestasi senilai Rp3.550.000,00 dan hadiah bagi PPL Teladan senilai Rp2.000.000,00	7.350.000,00
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Uang Saku Peserta Festival Pangan Lokal Tk Provinsi di Baruga Karaeng Pattingalloang Kota Makassar	3.600.000,00
6	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Hadiah berupa Uang untuk Juara 1, 2 dan 3 dan Trophy pada Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Hadits (STQH) Tingkat Kabupaten Barru	78.000.000,00
			Uang Saku Peserta dan Official Kegiatan STQH Tingkat Provinsi Tahun 2023	192.000.000,00
Jumlah				394.041.000,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi				
1	Dinas Pariwisata	Pengembangan	Hadiah berupa medali pada	11.750.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

	Pemuda dan Olahraga	Olahraga	Kejuaraan Daerah	
Jumlah				11.750.000,00
Belanja Beasiswa				
1	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Beasiswa bagi Mahasiswa yang berprestasi dan miskin	2.498.400.000,00
Jumlah				2.498.400.000,00
Total				2.904.191.000,00

5.1.2.1.3 Belanja Bunga	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2022</u>
	Rp2.088.449.782,00	Rp1.374.006.968,00

Belanja Bunga adalah belanja yang terkait dengan biaya bunga pinjaman kepada Pemerintah Pusat (Departemen Keuangan) berupa *Sub Loan Agreement* (SLA). Adapun Belanja Bunga adalah sebagai berikut:

Tabel 7.59 Daftar Belanja Bunga

No	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	SLA-1224/DSMI/2009 tanggal 12 Oktober 2010	2.530.000.000,00	2.088.449.782,00	82,55	1.374.006.968,00
Jumlah		2.530.000.000,00	2.088.449.782,00	82,55	1.374.006.968,00

Realisasi Belanja Bunga pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.088.449.782,00 atau 82,55% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.530.000.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Bunga tahun 2022 sebesar Rp1.374.006.968,00, mengalami peningkatan sebesar Rp714.442.814,00 dikarenakan naiknya tingkat suku bunga.

5.1.2.1.4 Belanja Subsidi	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2022</u>
	Rp313.026.525,00	Rp0,00

Realisasi Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp313.026.525,00 atau 26,09% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.200.000.000,00. Belanja Subsidi ini merupakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi untuk mendanai uang muka 30% sewa Bus yang menghubungkan antara kabupaten Soppeng dengan Barru yang digunakan oleh masyarakat yang akan berkereta api. Bus yang di kontrak sebanyak 2 unit sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor 02/JOT/PPK/DISHUB/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023. Ditengah perjalanan pihak yang menyewakan bus tidak dapat meneruskan



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Kegiatan	Keterangan	Jumlah
Belanja Hibah kepada BUMD				
1	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa Lalabata dan Lipukasi ButtuE Kec. Tanete Rilau dan Desa Madello Kec. Balusu	1.068.606.633,00
Memiliki Surat Keterangan Terdaftar				
6	Dinas Perikanan	Pengadaan sarana Kelompok Pembudidaya dan perbenihan	Pengadaan untuk 7 klp masing-masing Blower ring 15 unit untuk 5 klp, Blower LP200 2 unit untuk 2 klp dan Alkon 3" untuk 2 klp	95.765.250,00
		Pengadaan Sarana Budidaya Ikan	Pengadaan untuk 5 kelompok masing-masing kelompok mendapat 1 unit Alkon 3" dan kelengkapannya dan 1 unit mesin katinting dan kelengkapannya	54.612.000,00
			Biaya administrasi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.247.000,00
		Pengadaan sarana udang vannamei	Pengadaan benur vannamei sebanyak 500.000 ekor, 6.250kg pakan pelet udang, 4 unit kincir untuk satu kelompok	194.350.200,00
		Pengadaan Sarpras bibit ikan unggul	Biaya administrasi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.904.500,00
			Pengadaan dilakukan untuk 4 kelompok masing-masing: Klp. Mendapatkan bibit ikan nila 15.000 ekor, Pakan ikan nila 750kg, probiotik/ursal 50 liter dan dedak 450kg	87.784.500,00
		Pengadaan kolam terpal diameter 3	Pengadaan untuk 1 kelompok Nepo Youth Fish antara lain bibit ikan nila 1.500 ekor, mesin blower LP100 1 unit, LP200 2 unit, kolam bundar D.3 10 unit, pakan Ikan terapung No.2 900kg, pakan ikan tepung 100kg dan probiotik EM4 20 liter	61.567.000,00
		Pengadaan Pengelolaan Pembudidayaan ikan	Pengadaan untuk 1 kelompok antara lain: benur vannamei 520.000 ekor, pakan pellet udang 2.275kg, probiotik EM4 26 liter, saponin 130kg, Alkon 3" 1 unit dan mesin katinting 1 unit	88.275.580,00
			Biaya administrasi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.167.000,00
		Pengadaan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Pengadaan untuk 9 kelompok masing-masing: Klp Radiah 1 unit frezeer, Klp Usaha Mekar 1 unit spinner, Klp Sipatokkong 14 unit Coldbox, Klp Munajat 15 unit Coldbox, Klp Artina 5 unit Coldbox, Klp Buana Laut 16 unit coldbox, Klp Madduta laut 18 unit coldbox, Klp Alwi 17 unit Coldbox, Klp Sejahtera 15 unit coldbox	179.376.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Kegiatan	Keterangan	Jumlah	
Belanja Hibah kepada BUMD					
1	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa Lalabata dan Lipukasi ButtuE Kec. Tanete Rilau dan Desa Madello Kec. Balusu	1.068.606.633,00	
		Pengadaan sarana pengolahan hasil perikanan	Pengadaan untuk 4 kelompok masing-masing Klp Sinar Rumput laut waring 12 rool dan terpal 13 pcs, klp Reski Rumput Laut waring 11 rool dan terval 12 pcs, Klp Putri Rumput Laut waring 13 rool dan terval 14 pcs serta klp sari rumput laut waring 16 rool dan terval 17 pcs	95.330.352,00	
			Biaya administrasi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.420.000,00	
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan					
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan					
7	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/ Kota	Hibah kepada Organisasi Palang Merah Indonesia	200.000.000,00	
8	Dinas Sosial	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan	Hibah kepada Karang Taruna Kab. Barru	54.000.000,00	
9	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bantuan Hibah untuk Madrasah, Mesjid dan Mushollah yang ada di Kecamatan di Kabupaten Barru	2.000.000.000,00	
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik					
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pemilukada serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	PKB	67.152.291	487.220.650,00
			PKS	42.878.593	
			PDIP	54.787.843	
			PPP	38.088.428	
			GERINDRA	44.672.920	
			NASDEM	116.244.866	
			GOLKAR	90.605.574	
			DEMOKRAT	32.790.135	
			Jumlah		

Tabel diatas menunjukkan besarnya Realisasi Belanja Hibah Pada Tahun 2023 sebesar Rp23.636.904.037,00 atau 86,87% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp27.208.491.540,00. Sebelumnya realisasi Belanja Hibah adalah sebesar Rp23.611.149.267,00 dan telah dilakukan penyesuaian pada Belanja Hibah atas BOP PAUD dan Kesetaraan sebesar Rp25.754.770,00 yang menambah nilai Belanja Hibah secara keseluruhan. Untuk rincian Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dan BOP PAUD dapat dilihat pada *Lampiran 2 dan 3a*.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2022</u>
	Rp0,00	Rp1.569.300.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00.

5.1.2.2 Belanja Modal	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2022</u>
	Rp148.016.364.234,00	Rp145.652.719.665,00

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja modal Pemerintah Kabupaten Barru meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jembatan serta Aset Tetap Lainnya.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp148.016.364.234,00 atau 81,50% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp181.612.170.854,00. Dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 sebesar Rp145.652.719.665,00, Belanja Modal tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp2.363.644.569,00. Hal ini disebabkan oleh terealisasinya pekerjaan fisik (lanjutan) dan realisasi belanja modal tahun berjalan. Rincian Belanja Modal TA 2023 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 7.61 Daftar Rincian Belanja Modal

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Tanah	7.101.200.000,00	7.100.823.000,00	99,99	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.218.791.036,00	21.357.154.752,00	81,46	38.094.991.086,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.991.386.339,00	53.248.357.339,00	84,53	43.887.170.944,00
4	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	84.875.814.679,00	65.926.169.143,00	77,67	63.617.630.635,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	424.978.800,00	383.860.000,00	90,32	52.927.000,00
Jumlah		181.612.170.854,00	148.016.364.234,00	81,50	145.652.719.665,00

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2022</u>
	Rp7.100.823.000,00	Rp0,00

Belanja Modal Tanah merupakan belanja yang menambah aktiva tetap tanah Pemerintah Kabupaten Barru. Dalam periode Tahun Anggaran 2023, realisasi belanja modal tanah Adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 7.62 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal – Tanah

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Tanah Persil	7.101.200.000,00	7.100.823.000,00	99,99	0,00
2	Belanja Modal Tanah Non Persil	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

3	Belanja Modal Tanah Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Tanah BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		7.101.200.000,00	7.100.823.000,00	99,99	0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah Persil sebesar Rp7.100.823.000,00 merupakan pembangunan tempat ibadah Mesjid Raya di Kelurahan Coppo Kecamatan Barru antara lain biaya pengukuran lahan, jasa konsultan dan biaya pembebasan lahan.

5.1.2.2.2 Belanja Modal	TA 2023	TA 2022
Peralatan dan	Rp21.357.154.752,00	Rp38.094.991.086,00
Mesin		

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan belanja yang menambah aktiva tetap peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Barru. Dalam periode Tahun Anggaran 2023, belanja modal peralatan dan mesin terealisasi sebesar Rp21.357.154.752,00 atau 81,46% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp26.218.791.036,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.63 Daftar Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	31.300.000,00	9.800.000,00	31,31	10.596.637.933,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.305.050.000,00	1.288.082.088,00	98,70	972.100.000,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	14.500.000,00	13.445.000,00	92,72	20.760.000,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Ukur	150.000,00	75.000,00	50,00	0,00
7	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Alat Kantor	872.295.927,00	835.054.069,00	95,73	5.187.894.499,00
10	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	714.830.700,00	666.526.100,00	93,24	1.297.473.855,00
11	Belanja Modal Komputer	1.953.990.870,00	1.853.125.518,00	94,84	1.912.967.535,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
12	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	107.500.000,00	101.541.000,00	94,46	124.484.841,00
13	Belanja Modal Alat Studio	1.433.209.242,00	1.418.596.600,00	98,98	1.008.752.400,00
14	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Modal Alat Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.018.204.284,00	2.472.985.732,00	81,94	4.903.323.682,00
18	Belanja Modal Alat Kesehatan	1.655.697.696,00	1.637.240.000,00	98,89	9.173.135.382,00
19	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.778.408.059,00	2.273.628.500,00	81,83	1.866.643.959,00
20	Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah	375.325.000,00	375.140.000,00	99,95	641.672.000,00
21	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00	0,00
27	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	42.949.000,00	38.444.000,00	89,51	0,00
28	Belanja Modal Alat Peraga	360.000.000,00	234.700.000,00	65,19	0,00
29	Belanja Modal Rambu-Rambu	75.400.000,00	71.631.000,00	95,00	0,00
30	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	389.145.000,00
31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.235.440.000,00	4.542.478.350,00	107,25	0,00
32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.242.390.258,00	3.522.511.795,00	48,64	0,00
Jumlah		26.218.791.036,00	21.357.154.752,00	81,46	38.094.991.086,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

5.1.2.2.3 Belanja Modal	TA 2023	TA 2022
Gedung dan Bangunan	Rp53.248.357.339,00	Rp43.887.170.944,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan belanja yang menambah Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Barru. Dalam periode Tahun Anggaran 2023, Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp53.248.357.339,00 atau 84,53% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp62.991.386.339,00.

Tabel 7.64 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal - Gedung dan Bangunan
(dalam rupiah)

No	Uraian	2022			2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung Tempat Kerja	60.298.873.191,00	50.983.098.276,00	84,55	42.529.345.046,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung Tempat Tinggal	72.106.160,00	27.720.526,00	38,44	647.686.978,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Bangunan Tugu Peringatan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Bangunan Tugu Titik Kontrol / Pasti	2.025.517.503,00	1.773.186.583,00	87,54	710.138.920,00
7	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Bangunan Rambu - rambu	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	594.889.485,00	464.351.954,00	78,06	0,00
Jumlah		62.991.386.339,00	53.248.357.339,00	84,53	43.887.170.944,00

Pengadaan Belanja Modal Gedung dan bangunan pada TA 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Tabel 7.65 Daftar Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	SKPD	Anggaran	Realisasi
1	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.256.518.728,00	16.133.395.701,00
		Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	15.842.101.893,00	12.544.523.838,00
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	39.950.453,00	19.984.265,00
		Sekretariat DPRD	292.556.735,00	274.482.250,00
		Sekretariat Daerah	186.310.374,00	142.617.824,00
		Dinas Kesehatan	8.144.201.537,00	6.570.548.940,00
		Dinas Sosial	7.510.000,00	7.510.000,00
		Dinas Penanaman Modal	17.777.300,00	17.777.300,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	80.000.000,00	76.243.693,00
		Badan Pendapatan Daerah	790.793.512,00	649.014.661,00
		Kecamatan Barru	115.920.555,00	115.920.555,00
		Kecamatan Balusu	26.451.620,00	26.451.620,00
		Kecamatan Soppeng Riaja	49.727.400,00	49.727.400,00
2	Pengadaan Bangunan Gudang	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7.924.700,00	0,00
3	Pengadaan Bangunan Kesehatan	Dinas Kesehatan	1.106.851.245,00	393.221.377,00
		Rumah Sakit Umum Daerah La Patarai	443.010.069,00	443.010.069,00
4	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	808.867.900,00	642.706.370,00
		Sekretariat Daerah	3.320.140,00	0,00
5	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.591.824.372,00	2.646.625.399,00
6	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	29.572.444,00	0,00
7	Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	69.580.520,00	27.991.000,00
		Badan Pendapatan Daerah	36.579.600,00	0,00
8	Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.315.406.545,00	9.455.200.250,00
9	Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara	Dinas Perhubungan	32.559.064,00	10.559.064,00
10	Pengadaan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	Badan Pendapatan Daerah	16.000.000,00	0,00
		Satpol PP Damkar	3.818.800,00	0,00
11	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	86.931.749,00	36.172.875,00
12	Pengadaan Bangunan Fasilitas Umum	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	71.986.960,00	0,00
		Dinas Kesehatan	500.000,00	0,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.300.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
4	Belanja Modal Bangunan Air Pasang Surut	2.121.290.855,00	1.672.948.005,00	78,86	2.856.942.930,00
5	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.174.014.165,00	1.730.775.160,00	79,61	2.449.999.925,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Baku	243.903.971,00	40.160.500,00	16,47	0,00
7	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	4.688.600,00	4.688.600,00	100,00	94.377.400,00
8	Belanja Modal Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Jaringan Listrik	289.464.950,00	154.840.000,00	53,49	745.200.000,00
Jumlah		84.875.814.679,00	65.926.169.143,00	77,67	63.617.630.635,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal	TA 2023	TA 2022
Aset Tetap	Rp383.860.000,00	Rp52.927.000,00
Lainnya		

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan belanja yang menambah aktiva tetap aset tetap lainnya Pemerintah Kabupaten Barru. Dalam periode Tahun Anggaran 2023, belanja modal aset tetap lainnya terealisasi sebesar Rp383.860.000,00 atau 90,32% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp424.978.800,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.67 Daftar Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	408.578.800,00	376.660.000,00	92,19	3.097.000,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	2023		%	2022
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
6	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	9.200.000,00	0,00	0,00	49.830.000,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		424.978.800,00	383.860.000,00	90,32	52.927.000,00

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga TA 2023 TA 2022
Rp839.982.105,48 **Rp5.498.981.654,00**

Realisasi Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp839.982.105,48 atau 30,22% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.779.948.936,00. Belanja Tidak Terduga merupakan dana yang dikucurkan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan status kebencanaan yang dikhususkan kepada kebutuhan bahan sementara pekerjaan tanggul dan jalan sebesar Rp839.982.105,00 dan kelebihan pembayaran pokok pinjaman pemerintah pusat sebesar Rp0,48. Adapun SKPD yang menyalurkan dana Belanja Tidak Terduga antara lain :

Tabel 7.68 Daftar Belanja Tidak Terduga

No.	SKPD	Uraian	Pencairan Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	Pengembalian (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Penanganan Status Kebencanaan Kerusakan Tanggul dan Jalan (sementara)	917.953.000,00	839.982.105,48	77.970.895,00
Jumlah			917.953.000,00	839.982.105,48	77.970.895,00

Belanja Tidak Terduga pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman ditujukan untuk penanganan status kebencanaan untuk menyediakan bahan sementara yang dibutuhkan terhadap kerusakan tanggul Ujung Batu Sumpang BinangaE, jalan poros Punranga – Bulu bulu dan kerusakan jalan desa Harapan Kab. Barru – Desa Sadar Kab. Bone. Adapun bahan yang dibutuhkan adalah sirtu gunung, sewa excavator, tronton dan upah buruh/pekerja.

5.1.2.4 Belanja Transfer Bantuan Keuangan TA 2023 TA 2022
Rp92.840.040.727,00 **Rp95.656.390.638,00**

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp92.840.040.727,00 atau 99,89,00% dari target anggaran yang



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

ditetapkan sebesar Rp92.940.837.151,00. Dari jumlah transfer Bantuan Keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.69 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan
(dalam rupiah)

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	100.000.000,00	0,00	0,00	133.000.000,00
2	Transfer Bantuan Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Desa	92.840.837.151,00	92.840.040.727,00	99,89	95.523.390.638,00
Jumlah		92.940.837.151,00	92.840.040.727,00	99,89	95.656.390.638,00

Bantuan Keuangan

5.1.2.4.1 Khusus kepada Pemerintah Provinsi	TA 2023 Rp0,00	TA 2022 Rp133.000.000,00
--	---------------------------------	---

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00.

5.1.2.4.2 Bantuan Keuangan Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	TA 2023 Rp92.840.040.727,00	TA 2022 Rp95.523.390.638,00
--	--	--

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp92.840.040.727,00 atau 99,89% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp92.840.837.151,00. Adapun rincian Bantuan Keuangan ke Desa sebagai berikut:

Tabel 7.70 Daftar Bantuan Keuangan ke Desa

No	Kecamatan	Anggaran ADD, Dana Desa APBN dan BHP	Realisasi				Total Realisasi
			ADD	Dana Desa APBN	Bagi Hasil Pajak	Iuran JKN 1%	
1	Kecamatan Tanete Riaja	13.923.255.800	7.761.779.556	5.671.939.000	460.748.100	28.789.144	13.923.255.800
2	Kecamatan Tanete Rilau	18.108.621.500	9.869.043.848	7.616.931.000	588.011.600	34.499.648	18.108.486.096
3	Kecamatan Barru	11.587.221.900	6.355.398.801	4.826.676.000	382.268.900	22.844.348	11.587.188.049
4	Kecamatan Soppeng Riaja	10.881.925.500	6.042.051.621	4.474.155.000	344.225.700	21.302.222	10.881.734.543
5	Kecamatan Mallusetasi	12.852.509.000	6.526.213.593	5.930.078.000	373.206.400	22.688.497	12.852.186.490
6	Kecamatan Pujananting	14.165.877.500	8.194.849.160	5.550.394.000	386.485.500	34.035.138	14.165.763.798
7	Kecamatan Balusu	11.321.425.951	5.979.605.786	4.669.449.000	647.384.651	24.986.514	11.321.425.951
Jumlah		92.840.837.151	50.728.942.365	38.739.622.000	3.182.330.851	189.145.511	92.840.040.727



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 4*.

5.1.3 PEMBIAYAAN

Realisasi Pembiayaan Daerah bersih pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp110.751.925.059,13 atau mencapai 109,78% dari anggaran Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp100.896.262.510,00. Realisasi Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp110.751.925.059,13 atau lebih rendah 3,60% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp114.901.609.782,89. Dalam realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut terdiri dari:

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp113.804.956.323,65 atau mencapai 109,49% dari anggaran Penerimaan Pembiayaan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp103.949.293.775,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp113.804.956.323,65 atau lebih rendah 4,32% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp118.954.641.046,89. Dalam realisasi Penerimaan Pembiayaan tersebut berasal dari:

5.1.3.1.1 Penggunaan Sisa	TA 2023	TA 2022
Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Rp113.804.956.323,65	Rp118.954.641.046,89

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan penggunaan/penerimaan atas SiLPA Tahun Anggaran 2022 yang diterima di TA 2023 sebesar Rp113.815.417.240,35 dikurangi dengan koreksi SiLPA tahun 2022 sebesar Rp10.460.916,70 (SiLPA Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp800.909,70, SiLPA Puskesmas Padongko sebesar Rp60.007,00 dan Silpa Kas Lainnya PAUD sebesar Rp9.600.000 sehingga menjadi sebesar Rp113.804.956.323,65.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.053.031.264,52 atau mencapai 100,00% dari anggaran Pengeluaran Pembiayaan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.053.031.265,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.053.031.264,52 atau lebih rendah 24,67% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp4.053.031.264,00. Dalam realisasi Pengeluaran Pembiayaan tersebut berasal dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	TA 2023	TA 2022
	Rp0,00	Rp1.000.000.000,00

Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00.

5.1.3.2.2 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	TA 2023	TA 2022
	Rp3.053.031.264,52	Rp3.053.031.264,00

Pada Tahun Anggaran 2023 realisasi pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp3.053.031.264,52 atau 100,00% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.053.031.265,00. Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 5*.

5.1.3.3 Pembiayaan Neto

Realisasi Pembiayaan neto tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp110.751.925.059,13 atau lebih rendah 3,60% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp114.901.609.782,89.

5.1.3.4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp92.423.589.692,30 dengan rincian sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah	Rp	81.146.569.014,40
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	13.540.100,00
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	881.000,00
Kas di Bendahara Puskesmas	Rp	3.740.174.680,90
Kas di Bendahara RSUD	Rp	7.437.532.406,00
Kas di Bendahara BOS	Rp	78.047.246,00
Kas di Bendahara PAUD-Kesetaraan	Rp	2.595.230,00
Setara Kas	Rp	4.250.015,00
Jumlah	Rp	92.423.589.692,30



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

Tabel 7.71 Laporan Perubahan SAL

Uraian	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	113.815.417.240,35	118.943.534.504,89
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	113.814.556.123,65	118.954.641.046,89
Sub Total	861.116,70	(11.106.542,00)
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	92.433.189.492,30	113.815.417.240,35
Sub Total	92.434.050.609,00	113.804.310.698,35
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun 2022	(10.460.916,70)	11.106.542,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	92.423.589.692,30	113.815.417.240,35

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Adalah sejumlah saldo yang berasal dari akumulasi SILPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2023 sebesar Rp113.815.417.240,35 atau turun 4,31% yaitu sebesar Rp5.128.117.264,54 dari tahun 2022.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2023 penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp113.814.556.123,65 atau turun 4,33% yaitu sebesar Rp5.140.084.923,24 dari tahun 2022.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja-LRA, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SILPA tahun 2023 sebesar Rp92.433.189.492,30 atau turun 18,80% yaitu sebesar Rp21.382.227.748,05 dari tahun 2022.

Surplus/Defisit-LRA adalah selisih kurang antara Pendapatan-LRA dan Belanja-LRA selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit-LRA tahun 2023 sebesar (Rp18.328.335.366,83) atau naik dari tahun 2022.

Pembiayaan Netto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan. Pembiayaan Netto tahun 2023 sebesar Rp110.751.925.059,13 atau turun 3,61% yaitu sebesar Rp4.149.684.723,76 dari tahun 2022.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Adalah koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun 2022 sebesar Rp10.460.916,70 yaitu sisa dana Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp800.909,70, sisa dana kas JKN Puskesmas Padongko sebesar Rp60.007,00 dan Silpa Kas Lainnya PAUD sebesar Rp9.600.000 yang lebih catat ditahun 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp92.423.589.692,30 terdiri dari:

Kas di Kas Daerah	Rp 81.146.569.014,40
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 13.540.100,00
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 881.000,00
Kas di Bendahara FKTP	Rp 3.740.174.680,90
Kas di Bendahara RSUD	Rp 7.437.532.406,00
Kas Lainnya - Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Rp 78.047.246,00
Kas Lainnya – PAUD-Kesetaraan	Rp 2.595.230,00
Kas Lainnya – Sertifikasi	<u>Rp 4.250.015,00</u>
Jumlah	Rp 92.423.589.692,30

Kas di Kas Daerah senilai Rp81.146.569.014,40 terdiri dari:

DAU	Rp32.413.973.994,58
DBH Cukai Tembakau	Rp 312.690.000,00
DAK Fisik	Rp 6.548.367.832,00
DAK Non Fisik	Rp 3.074.957.618,00
Pendapatan Asli Daerah	Rp 188.593.244,00
DBH Pajak Provinsi	Rp34.796.365.530,12
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 3.811.620.795,70
Jumlah	Rp81.146.569.014,40

Kas Lainnya – Sertifikasi sebesar Rp4.250.015,00 merupakan bunga giro dari rekening dana sertifikasi pada Dinas Pendidikan yang bersaldo sejak tahun 2017.

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Barru terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana.

Tabel 7.72 Rincian Komposisi Neraca

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Aset	2.275.440.959.268,40	2.292.947.400.508,46
2	Kewajiban	50.036.027.064,96	50.588.526.669,54
3	Ekuitas	2.225.404.932.203,44	2.242.358.873.838,91

Total Aset Pemerintah Kabupaten Barru per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.275.440.959.268,40 atau menurun sebesar Rp17.506.441.240,06 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.292.947.400.508,46 sebagaimana tabel diatas. Jumlah tersebut terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Tabel 7.73 Daftar Rincian Aset per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Aset Lancar	129.278.664.007,65	156.969.021.320,24
2	Investasi Jangka panjang	89.822.608.182,00	91.828.419.791,58
3	Aset Tetap	1.905.519.069.902,54	1.954.410.766.463,32
4	Dana Cadangan	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	150.820.617.176,21	89.739.192.933,31
	Jumlah	2.275.440.959.268,40	2.292.947.400.508,46

5.3.1 Aset Lancar

Nilai Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Barru per 31 Desember 2023 sebesar Rp129.278.664.007,65 dengan rincian sebagai berikut.

5.3.1.1 Kas Daerah

Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp93.191.694.552,30 yang terdiri dari:

1) Kas di Kas Daerah/BUD	Rp 81.146.569.014,40
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 13.540.100,00
3) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 881.000,00
4) Kas di Bendahara BLUD RSUD	Rp 7.437.532.406,00
5) Kas di Bendahara BLUD PKM	Rp 3.746.058.000,90
6) Kas Lainnya – di Bendahara BOS	Rp 85.968.786,00
7) Kas Lainnya – PAUD-Kesetaraan	Rp 2.595.230,00
8) Kas Lainnya – Sertifikasi	Rp 4.250.015,00
9) Kas Lainnya – Bend. Pengeluaran	Rp 754.300.000,00
Total	Rp 93.191.694.552,30

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah/BUD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp81.146.569.014,40	Rp103.949.293.775,35

Saldo kas di kas daerah sebesar Rp81.146.569.014,40. Berdasarkan rekening koran per 31 Desember 2023, saldo kas di kas daerah sebesar Rp81.171.829.514,40 merupakan saldo kas daerah Pemerintah Kabupaten Barru sesuai dengan saldo bank yang berada di rekening Kas Daerah per 31 Desember 2023 sehingga terdapat selisih sebesar Rp25.260.500,00. Selisih ini merupakan SP2D No.0322/LS/1.01.2.22.0.00.01.0/P.03/12/2023 yang terbit di tanggal 29 Desember 2023 yang dicairkan di tanggal 19 Januari 2024. Jadi nilai kas di kas daerah mengacu pada rekening koran setelah pencairan SP2D tersebut yaitu sebesar Rp81.146.569.014,40. Daftar Kas di Kas Daerah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Tabel 7.74 Daftar Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Peruntukan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	PT Bank Sulselbar				
1	031-001-000003424-2	Kasda Kab Barru PAD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	188.593.244,00	55.153.007.065,77
2	031-001-000000826-8	Rekening Kas Umum Daerah Kab Barru	Dana Alokasi Umum (DAU)	80.957.975.770,40	48.796.286.709,58
		Jumlah		81.146.569.014,40	103.949.293.775,35

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp13.540.100,00 **Rp200.747,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas yang masih berada di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2023 dan pada tahun ini Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp13.540.100,00. Hal ini menunjukkan bahwa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2022. Saldo tersebut merupakan sisa dana uang persediaan (UP) Kantor Satpol PP dan Damkar dan Kecamatan Balusu tahun anggaran 2023 yang tidak dibelanjakan sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp13.540.100,00. Daftar Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:

Tabel 7.75 Daftar Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023

No.	OPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	125.276,00
2	Satpol PP dan Damkar	6.000.000,00	0,00
3	Kecamatan Mallusetasi	0,00	0,00
4	Kecamatan Balusu	7.540.100,00	0,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1,00
9	Badan Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0,00	75.470,00
	Jumlah	13.540.100,00	200.747,00

Kas di bendahara pengeluaran pada Kantor Satpol PP dan Damkar sebesar Rp6.000.000,00 disetorkan ke Kas Daerah tanggal 8 Januari 2024. Kas di bendahara pengeluaran pada Kecamatan Balusu sebesar Rp7.540.100,00 disetorkan ke Kas Daerah tanggal 29 Januari 2024.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp881.000,00 **Rp0,00**

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang bersumber dari penerimaan di Tahun Anggaran 2023 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum disetor ke Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp881.000,00. Untuk Kas di bendahara penerimaan tahun anggaran 2023 yang merupakan penerimaan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga Dinas Pariwisata



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Kepemudaan dan Olahraga tahun 2023 telah disetorkan pada 17 Januari 2023 sebesar Rp881.000,00.

Tabel 7.76 Daftar Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023

No.	SKPD	Jumlah (Rp)	
		31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	881.000,00	0,00
	Jumlah	881.000,00	0,00

5.3.1.1.4 Kas di Bendahara BLUD RSUD **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp7.437.532.407,00 **Rp9.554.281.135,00**

Kas di Bendahara BLUD RSUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.437.532.407,00. Kas di Bendahara BLUD RSUD terdiri dari:
Kas di Bend Penerimaan Rp 4.102.925,00
Kas di Bendahara Pengeluaran (BLUD) Rp 14.142.785,00
Kas di Bank BRI 022201000961309 (BLUD) Rp7.419.286.697,00
Total **Rp7.437.532.407,00**

Laporan Keuangan *Audited* BLUD yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ASRI dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” pada *Lampiran 6*.

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara BLUD Puskesmas **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp3.746.058.000,90 **Rp95.501.446,00**

Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.740.174.680,90 merupakan akumulasi saldo pada rekening bank dan saldo tunai pada rekening Bendahara masing-masing Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.77 Daftar Saldo Dana BLUD/BOK pada Seluruh FKTP

No	FKTP	BLUD		BOK	Nilai Akhir (Rp)
		Bank	Tunai		
1	Puskemas Bojo Baru	114.119.377,00	0,00	147.318.507,00	261.437.884,00
2	Puskemas Palanro	230.499.984,00	0,00	113.699.575,00	344.199.559,00
3	Puskemas Madello	81.723.302,00	0,00	256.240.807,00	337.964.109,00
4	Puskemas Padongko	363.148.072,00	0,00	141.995.283,00	505.143.355,00
5	Puskemas Palakka	74.612.179,00	0,00	312.786.110,00	387.398.289,00
6	Puskemas Pekkae	15.480.033,00	0,00	65.589.227,00	81.069.260,00
7	Puskemas Ralla	159.392.568,00	(4.268.192,10)	57.992.295,00	213.116.670,90
8	Puskemas Pujananting	19.132.272,00	0,00	304.822.481,00	323.954.753,00
9	Puskemas Lisu	132.925.688,00	0,00	139.207.761,00	272.133.449,00
10	Puskemas Mangkoso	78.888.166,00	73.339,00	345.870.729,00	424.832.234,00
11	Puskemas Pancana	55.162.680,00	0,00	221.521.444,00	276.684.124,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No	FKTP	BLUD		BOK	Nilai Akhir (Rp)
		Bank	Tunai		
12	Puskesmas Doi Doi	17.137.152,00	1.446,00	300.985.716,00	318.124.314,00
	Jumlah	1.342.221.473,00	(4.193.407,10)	2.408.029.935,00	3.746.058.000,90

Saldo akhir Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas sesuai dengan Rekening Koran masing-masing Puskesmas kecuali Puskesmas Padongko, Puskesmas Mangkoso dan Puskesmas Doi-Doi yang mempunyai Saldo Kas tunai dan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp5.883.320,00 pada Puskesmas Ralla berupa Iuran Wajib Pegawai sebesar Rp1.941.162,00 dan Pajak Penghasilan sebesar Rp3.942.158,00.

5.3.1.1.6 Kas Lainnya – Di Bendahara BOS	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp85.968.786,00	Rp83.524.122,00

Kas Lainnya – Di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp85.968.786,00 yang terdiri dari merupakan saldo kas di Bendahara Dana BOS yang masih berada di rekening bank masing-masing sekolah sebesar Rp78.047.246,00 dan Pajak Restoran yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp7.921.540,00 pada SMPN 5 Barru. Rincian sisa saldo di Bendahara BOS disajikan pada *Lampiran 7*.

5.3.1.1.7 Kas Lainnya – Sertifikasi	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp4.250.015,00	Rp4.250.015,00

Kas Lainnya - Sertifikasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.250.015,00 merupakan bunga giro pada rekening dana untuk pembayaran sertifikasi Dinas Pendidikan pada Bank BNI dengan nomor 0222777553.

5.3.1.1.8 Kas Lainnya – PAUD- Kesetaraan	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp2.595.230,00	Rp9.600.000,00

Kas Lainnya – Di Bendahara PAUD-Kesetaraan sebesar Rp2.595.230 berdasarkan saldo rekening koran pada 46 sekolah PAUD Negeri. Saldo ini merupakan dana PAUD-Kesetaraan yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum dibelanjakan.

5.3.1.1.7 Kas Lainnya – Bendahara Pengeluaran	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp754.300.000,00	Rp132.159.900,00

Kas Lainnya – Di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp754.300.000,00 adalah saldo Kas yang ada di bendahara pengeluaran Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum disalurkan ke penerima beasiswa. Kas Lainnya – Di Bendahara Pengeluaran tahun 2022 sebesar Rp132.159.900,00 adalah pungutan



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

mengalami perubahan karena tidak adanya penambahan piutang atau pengurangan piutang pada tahun ini.

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp352.213.900,53. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, piutang ini tidak mengalami perubahan karena tidak adanya penambahan piutang atau pengurangan piutang pada tahun ini.

Saldo piutang PBB-P2 tahun 2023 sebesar Rp7.352.649.932,40 merupakan hasil akumulasi dari Saldo piutang PBB-P2 tahun 2022 dikurangi realisasi pembayaran piutang ditambah piutang baru dari ketetapan tahun 2023 yang belum dapat terealisasi, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Piutang PBB-P2 s/d 2022	Rp6.796.965.522,40
Penerimaan Piutang u tahun 2022	(Rp 460.876.297,00)
Piutang untuk tahun 2023	<u>Rp1.016.560.707,00</u>
Saldo Piutang PBB-P2 s/d 2023	Rp7.352.649.932,40

Piutang Pajak Air Bawah Tanah, sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp7.391.278,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, piutang mengalami peningkatan karena adanya penambahan piutang di tahun ini.

Saldo Piutang Pajak ABT s/d 2022	Rp3.749.069,00
Penerimaan Piutang u tahun 2022	(Rp3.749.049,00)
Piutang untuk tahun 2023	<u>Rp7.391.258,00</u>
Saldo Piutang Pajak ABT s/d 2023	Rp7.391.278,00

5.3.1.2.2 Penyisihan **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Piutang Pajak **(Rp4.992.368.087,01)** **(Rp1.983.714.185,92)**

Nilai Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp4.992.368.087,01 merupakan saldo Penyisihan atas Piutang Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Pajak PBB-P2. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.008.653.901,09 atau 151,67% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1.983.714.185,92. Klasifikasi umur piutang Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak PBB-P2 diatas 5 tahun dengan kualitas piutang macet. Sesuai dengan kebijakan akuntansi penyisihan piutang untuk piutang macet dilakukan sebesar 100% dari total piutang setelah dikurangi dengan penerimaan tagihan.

Tabel 7.79 Daftar Piutang Pajak Bersih per 31 Desember 2023

No	Uraian	Tahun 2023		
		Nilai Sebelum Penyisihan	Penyisihan	Nilai Realisasi Bersih
1	Piutang Pajak Hotel/ Penginapan	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Pajak Restoran/ Rumah Makan	29.989.600,00	29.989.600,00	0,00
3	Piutang Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Tahun 2023		
		Nilai Sebelum Penyisihan	Penyisihan	Nilai Realisasi Bersih
6	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	352.213.900,53	352.213.900,53	0,00
7	Piutang PBB-P2	7.352.649.932,40	4.610.164.586,48	2.742.485.345,92
8	Piutang BPHTB	0,00	0,00	0,00
9	Piutang Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00
10	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00
11	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	7.391.278,00	0,00	7.391.278,00
Jumlah		7.742.244.710,93	4.992.368.087,01	2.749.876.623,92

Rincian Piutang Pajak dan Penyisihannya dapat dilihat pada *Lampiran 8a1 s/d 8d*.

5.3.1.2.3 Piutang Pajak Bersih Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp2.749.876.623,92 **Rp5.199.203.906,01**

Piutang Pajak Bersih per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.749.876.623,92 merupakan nilai bersih Piutang Pajak setelah dikurangkan dengan Penyisihan Piutang Pajak Daerah.

5.3.1.2.4 Piutang Retribusi Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp9.103.402.858,00 **Rp7.838.242.333,00**

Sesuai kebijakan akuntansi piutang retribusi disajikan sebesar Nilai Realisasi Bersih (Net Realizable Value). Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.103.402.858,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.80 Daftar Piutang Retribusi per 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)		% Kenaikan/ (Penurunan)
		Tahun 2023	Tahun 2022	
1	Piutang Ret. Pelayanan Kesehatan-Non Kapitasi	0,00	197.091.000,00	(100,00%)
2	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00%
3	Piutang Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00%
4	Piutang Ret. Pelayanan Pasar	7.894.451.700,00	6.443.650.800,00	22,52%
5	Piutang Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00%
6	Piutang Ret. Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00%
7	Piutang Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.070.816.658,00	1.069.946.033,00	0,08%
8	Piutang Ret. Sewa Rumah Dinas	117.225.500,00	106.645.500,00	9,92%
9	Piutang Ret. Tempat Pelelangan Ikan	20.909.000,00	20.909.000,00	0,00%
10	Piutang Ret. Terminal	0,00	0,00	0,00%
11	Piutang Ret. Tempat Khusus Parkir Kendaraan Penumpang & Bis Umum	0,00	0,00	0,00%
12	Piutang Ret. Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	0,00	0,00%
13	Piutang Ret. Tempat Pariwisata	0,00	0,00	0,00%



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)		% Kenaikan/ (Penurunan)
		Tahun 2023	Tahun 2022	
	dan Khusus Parkir			
14	Piutang Ret. Penjualan Produksi Daerah	0,00	0,00	0,00%
15	Piutang Ret. Pelayanan Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00%
16	Piutang Ret. Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00%
17	Piutang Ret. Izin Trayek	0,00	0,00	0,00%
	Jumlah	9.103.402.858,00	7.838.242.333,00	16,14%

Saldo piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas tahun 2023 sebesar Rp117.225.500,00 meningkat sebesar Rp10.580.000,00 dari saldo piutang tahun 2022 sebesar Rp106.645.500,00. Peningkatan disebabkan oleh adanya penambahan piutang dari ketetapan tahun 2023 yang belum dapat terealisasi dikurangi realisasi pembayaran piutang, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Piutang Ret. Sewa Rumdis s/d 2022	Rp106.645.500,00
Penerimaan Piutang tahun 2022	(Rp 9.140.000,00)
Piutang untuk tahun 2023	<u>Rp 19.720.000,00</u>
Saldo Piutang Ret. Sewa Rumdis s/d 2023	Rp117.225.500,00

Saldo piutang Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2023 sebesar Rp7.894.451.700,00 meningkat sebesar Rp1.021.219.550,00 dari saldo piutang tahun 2022 sebesar Rp6.443.650.800,00. Peningkatan disebabkan oleh adanya penambahan piutang dari ketetapan tahun 2023 yang belum dapat terealisasi sebesar Rp1.505.930.900,00 ditambah penambahan piutang kurang saji tahun 2022 sebesar Rp429.581.350,00 dikurangi realisasi piutang sebesar Rp484.711.350,00. Rincian saldo piutang Retribusi Pelayanan Pasar sebagai berikut:

Saldo Piutang Ret. Pel. Pasar s/d 2022	Rp6.443.650.800,00
Kurang saji piutang tahun 2022	Rp 429.581.350,00
Penerimaan Piutang tahun 2022	(Rp 484.711.350,00)
Piutang untuk tahun 2023	<u>Rp1.505.930.900,00</u>
Saldo Piutang Ret. Pel. Pasar s/d 2023	Rp7.894.451.700,00

Saldo Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2023 yang dipungut oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika adalah sebesar Rp1.070.816.658,00 meningkat sebesar Rp870.625,00 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.069.946.033,00. Peningkatan ini antara lain merupakan penambahan piutang dari ketetapan tahun 2023 yang belum dapat terealisasi di tahun 2023 ditambah penambahan piutang tahun 2022 yang tidak tercatat dan denda. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Saldo Piutang Menara s/d tahun 2022	Rp1.069.946.033,00
Penerimaan Piutang tahun 2022 + Denda	(Rp 10.549.044,00)
Penambahan Piutang tahun 2022 + Denda	Rp 2.566.119,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Piutang untuk tahun 2023	<u>Rp 8.853.550,00</u>
Saldo Piutang Ret. Menara s/d 2023	Rp1.070.816.658,00

Saldo piutang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan tahun 2023 sebesar Rp20.909.000,00. Tidak ada penambahan piutang tahun 2023. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Saldo Piutang Ret. TPI s/d tahun 2022	Rp 20.909.000,00
Penerimaan Piutang tahun 2022	(Rp 0,00)
Piutang untuk tahun 2023	<u>Rp 0,00</u>
Saldo Piutang Ret. TPI s/d 2023	Rp 20.909.000,00

5.3.1.2.5 Penyisihan	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Piutang	(Rp7.557.596.717,00)	(Rp1.982.643.476,80)
Retribusi		

Nilai Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp7.557.596.717,00 merupakan saldo Penyisihan atas Piutang Retribusi Pelayanan Pasar, Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Sewa Rumah Dinas dan Piutang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.574.953.240,20 atau 281,19% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1.982.643.476,80. Klasifikasi umur Piutang Retribusi 12 bulan sampai dengan diatas 12 bulan yang disisihkan masing-masing sebesar 50% dan 100% dari total piutang setelah dikurangi dengan penerimaan tagihan.

Tabel 7.81 Daftar Piutang Retribusi Bersih per 31 Desember 2023

No	Uraian	Tahun 2023		
		Nilai Sebelum Penyisihan	Penyisihan	Nilai Realisasi Bersih
1	Piutang Ret. Pelayanan Kesehatan-Non Kapitasi	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Ret. Pelayanan Pasar	7.894.451.700,00	6.388.520.800,00	1.505.930.900,00
5	Piutang Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
6	Piutang Ret. Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00
7	Piutang Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.070.816.658,00	1.054.670.917,00	16.145.741,00
8	Piutang Ret. Sewa Rumah Dinas	117.225.500,00	93.496.000,00	23.729.500,00
9	Piutang Ret. Tempat Pelelangan Ikan	20.909.000,00	20.909.000,00	0,00
10	Piutang Ret. Terminal	0,00	0,00	0,00
11	Piutang Ret. Tempat Khusus Parkir Kendaraan Penumpang & Bis Umum	0,00	0,00	0,00
12	Piutang Ret. Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	0,00	0,00
13	Piutang Ret. Tempat Pariwisata dan Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Tahun 2023		
		Nilai Sebelum Penyisihan	Penyisihan	Nilai Realisasi Bersih
14	Piutang Ret. Penjualan Produksi Daerah	0,00	0,00	0,00
15	Piutang Ret. Pelayanan Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00
16	Piutang Ret. Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00
17	Piutang Ret. Izin Trayek	0,00	0,00	0,00
Jumlah		9.103.402.858,00	7.557.596.717,00	1.545.806.141,00

5.3.1.2.6 Piutang Retribusi Bersih	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp1.545.806.141,00	Rp5.855.598.856,20

Piutang Retribusi Bersih per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.545.806.141,00 merupakan nilai bersih Piutang Retribusi setelah dikurangkan dengan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah. Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 9a s.d. 9e*.

5.3.1.2.7 Piutang Transfer	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp14.257.681.920,00	Rp19.763.584.868,00

Saldo piutang transfer Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi tahun 2022 sebesar Rp19.763.584.868,00 telah dibayarkan dibulan Februari sampai dengan Juni tahun 2023. Untuk tahun 2023 piutang transfer Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp14.257.681.920,00 terdiri dari:

- Pajak Rokok Provinsi sebesar Rp2.415.427.147,00 sesuai SK Gubernur Nomor 41/I/TAHUN 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2023, masuk tanggal 26 Februari 2024.
- Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp3.658.059.851,00 sesuai SK Gubernur Nomor 1828/XII/TAHUN 2023 tentang Alokasi Anggaran Bagian/Hak Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Atas Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto untuk Bulan Oktober Tahun 2023, belum masuk.
- Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp3.608.930.061,00 sesuai SK Gubernur Nomor 135/II/TAHUN 2024 tentang Alokasi Anggaran Bagian/Hak Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Atas Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto untuk Bulan November Tahun 2023, belum masuk.
- Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp4.575.264.861,00 sesuai SK Gubernur Nomor 136/II/TAHUN 2024 tentang Alokasi Anggaran Bagian/Hak Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Atas Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto untuk Bulan Desember Tahun 2023, belum masuk. Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 10*.

Rincian rekapitulasi Piutang Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 11*. Rincian rekapitulasi Penyisihan Piutang Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 11a*.

5.3.1.2.8 Beban dibayar dimuka	Per 31 Desember 2023 Rp127.055.290,00	Per 31 Desember 2022 Rp131.648.633,00
---------------------------------------	--	--

Saldo Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp127.055.290,00 merupakan kelebihan pembayaran beban pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut:

- Yang menjadi kelebihan pembayaran pada Beban STNK sebesar Rp0,00.
- Yang menjadi kelebihan pembayaran pada Beban Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp107.580.290,00.
- Yang menjadi kelebihan pembayaran pada Beban Premi Asuransi sebesar Rp0,00.
- Beban Jasa Dibayar Dimuka (beban listrik) tahun 2024 yang dibayarkan di tahun 2023 (listrik pra bayar) sebesar Rp0,00.
- Pembayaran sewa kendaraan dinas Innova pada Sekretariat Daerah sebesar Rp19.475.000,00 yang melewati tahun anggaran 2023 yaitu mulai tanggal 6 November 2023 sampai 6 Februari 2024.

Rincian dapat dilihat di *Lampiran 12*.

5.3.1.2.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Per 31 Desember 2023 Rp226.268.275,00	Per 31 Desember 2022 Rp226.268.275,00
---	--	--

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 sebesar Rp226.268.275,00. Tidak terdapat realisasi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.82 Daftar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

No.	Nama	Saldo Tagihan s.d tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Saldo Tagihan s.d tahun 2023
1	BJ	14.550.000,00	0,00	14.550.000,00
2	HMs	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
3	AAA	85.118.275,00	0,00	85.118.275,00
4	AIS	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00
	Jumlah	226.268.275,00	0,00	226.268.275,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

5.3.1.2.10 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	(Rp226.268.275,00)	(Rp67.880.482,50)

Klasifikasi umur Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran berada pada tahun kelima. Sesuai dengan kebijakan akuntansi penyisihan piutang dilakukan sebesar 100% dari total piutang setelah dikurangi dengan penerimaan tagihan.

Tabel 7.83 Daftar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bersih

No.	Nama	Tahun 2023		
		Nilai Sebelum Penyisihan	Penyisihan	Nilai Realisasi Bersih
1	BJ	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00
2	HMs	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
3	AAA	85.118.275,00	85.118.275,00	0,00
4	AIS	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
Jumlah		226.268.275,00	226.268.275,00	0,00

5.3.1.2.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bersih	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp0,00	Rp158.387.792,50

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bersih per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 merupakan nilai bersih Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran setelah dikurangkan dengan Penyisihan. Rincian dapat dilihat di *Lampiran 13*.

5.3.1.2.12 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp957.715.400,00	Rp958.715.400,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP-TGR merupakan panjar/pinjaman, pembayaran honorarium dan penerimaan retribusi daerah yang tidak sesuai dengan peruntukan dan sampai dengan per 31 Desember 2023 belum seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP-TGR per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp957.715.400,00, menurun sebesar Rp1.000.000,00 dari saldo tahun 2022 sebesar Rp958.715.400,00 disebabkan oleh adanya realisasi pembayaran tagihan. Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 14*.

5.3.1.2.13 Piutang Lainnya	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp4.395.685.061,00	Rp3.318.005.292,64

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.395.685.061,00 merupakan kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Barru yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2023. Piutang Lainnya terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

- a. Piutang pada PDAM sebesar Rp25.000.000,00 yang pada tahun 2023 ini saldo/nilai bukunya sebesar Rp0,00. Piutang pada PDAM merupakan pinjaman dalam bentuk dana tunai yang diberikan pada PDAM Kabupaten Barru berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 615 Tahun 2000.
 - b. Piutang pada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp245.035.000,00 yang pada tahun 2023 ini saldo/nilai bukunya sebesar Rp0,00. Pada tahun 2023 tidak ada realisasi penerimaan piutang.
 - c. Piutang yang berasal dari Dana Avalist sebesar Rp419.571.791,00. Pada tahun 2023, tidak ada realisasi penerimaan piutang.
 - d. Piutang BLUD RSUD tahun 2023 sebesar Rp3.407.406.020,00 yang terdiri dari Klaim BPJS Bulan Desember 2023 sebesar Rp3.394.799.720,00, Piutang Pasien Umum Rp2.361.300,00, Piutang Sewa Lahan Rp10.200.000,00 dan Piutang Lainnya sebesar Rp45.000,00.
 - e. Piutang BLUD Puskesmas adalah piutang atau klaim BPJS Non Kapitasi per Puskesmas. Saldo piutang BPJS Non Kapitasi tahun 2022 adalah sebesar Rp197.091.000,00 merupakan akumulasi dari Klaim BPJS per Puskesmas bulan November sampai dengan Desember 2022 telah dibayarkan pada bulan Januari tahun 2023 dan untuk tahun 2023 saldo piutang BPJS Non Kapitasi sebesar Rp298.672.250,00 yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum dibayarkan oleh pihak BPJS.
 - f. Piutang remunerasi dana transfer treasury deposit facility sebesar Rp529.401,64 telah terealisasi di tahun berjalan di bulan April 2023.
- Adapun rincian Piutang Lainnya sebagai berikut.

Tabel 7.84 Daftar Piutang Lainnya per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2023	2022
1	PDAM	25.000.000,00	25.000.000,00
2	Piutang pada Pimpinan dan Anggota DPRD	245.035.000,00	245.035.000,00
3	Piutang Dana Avalist	419.571.791,00	419.571.791,00
4	Piutang BLUD RSUD	3.407.406.020,00	2.627.869.100,00
5	Piutang BLUD Puskesmas	298.672.250,00	0,00
6	Piutang Remunerasi Dana Transfer TDF	0,00	529.401,64
Jumlah		4.395.685.061,00	3.318.005.292,64

5.3.1.2.14 Penyisihan	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Piutang	(Rp706.643.821,00)	(Rp 689.606.791,00)
Lainnya		

Klasifikasi umur Piutang Lainnya berada pada tahun lima tahun ke atas. Sesuai dengan kebijakan akuntansi penyisihan piutang dilakukan sebesar 100% dari total piutang setelah dikurangi dengan penerimaan piutang.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Tabel 7.85 Daftar Piutang Lainnya Bersih per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Tahun 2023		
		Nilai Sebelum Penyisihan	Penyisihan	Nilai Realisasi Bersih
1	PDAM	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2	Piutang pada Pimpinan dan Anggota DPRD	245.035.000,00	245.035.000,00	0,00
3	Piutang Dana Avalist	419.571.791,00	419.571.791,00	0,00
4	Piutang BLUD RSUD	3.407.406.020,00	17.037.030,00	3.390.368.990,00
5	Piutang BLUD Puskesmas	298.672.250,00	0,00	298.672.250,00
	Jumlah	4.395.685.061,00	706.643.821,00	3.689.041.240,00

5.3.1.2.15 Piutang Lainnya Bersih Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp3.689.041.240,00 **Rp2.628.398.501,64**

Piutang Lainnya Bersih per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.689.041.240,00 merupakan nilai bersih Piutang Lainnya setelah dikurangkan dengan Penyisihan Piutang Lainnya. Rincian pada *Lampiran 15a s/d 15c*.

5.3.1.2.16 Persediaan Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp12.759.792.840,43 **Rp8.444.672.222,54**

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.759.792.840,43 merupakan nilai persediaan barang pakai habis/material yang masih tersisa sampai dengan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.86 Daftar Persediaan per 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2023	2022
1	Persediaan Obat-obatan/Alat Kesehatan	11.855.064.427,58	7.840.094.600,54
2	Persediaan Barang Kuasi	338.269.600,00	253.370.000,00
3	Persediaan ATK/Barang Pakai Habis/ Cetak	557.064.772,85	343.637.782,00
4	Persediaan Perbekalan Kesehatan	9.394.040,00	7.569.840,00
5	Persediaan Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat (Benih Padi)	0,00	0,00
6	Persediaan Aspal Lawelle dan Aspal Cair	0,00	0,00
7	Persediaan Pasir, Batu Pecah, Batu Gunung	0,00	0,00
8	Peralatan Kendaraan	0,00	0,00
9	Persediaan Materai	0,00	0,00
	Jumlah	12.759.792.840,43	8.444.672.222,54

a. Persediaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.855.064.427,58 merupakan nilai persediaan obat-obatan dan alat kesehatan/barang medis habis pakai yang masih tersisa sampai dengan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Tabel 7.87 Daftar Persediaan Obat dan Alkes/BMHP

No.	SKPD	2023	2022
1	Dinas Pertanian	0,00	6.553.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	700.000,00	485.015,00
2	RSUD Kabupaten Barru	4.201.894.442,46	3.159.929.695,53
3	Dinas Kesehatan	7.652.469.985,12	4.673.126.890,01
Jumlah		11.855.064.427,58	7.840.094.600,54

Nilai persediaan obat-obatan dan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan terbagi kedalam 15 UPTD yang direkapitulasi menjadi sebesar Rp7.537.374.923,67 untuk persediaan obat dan barang medis habis pakai (BMHP) dari Dana DAK, DAU, DID dan Provinsi sedangkan dari Dana JKN sebesar Rp115.095.061,45 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.88 Daftar Persediaan Obat dan Alkes (DAK, DAU, DID & Provinsi)

No.	Unit	Persediaan Obat	Persediaan BMHP	Total Persediaan
1	Instalasi Farmasi	673.919.863,00	881.801.117,56	1.555.720.980,56
2	Bidang P2PL	797.058.193,00	2.038.833.310,49	2.835.891.503,49
3	Bidang Kesga & Gizi	429.629.494,00	729.202.060,52	1.158.831.554,52
4	Puskesmas Bojo Baru	86.560.206,96	78.616.326,29	165.176.533,25
5	Puskesmas Palanro	77.710.191,50	41.778.590,86	119.488.782,36
6	Puskesmas Mangkoso	128.166.531,00	67.856.500,67	196.023.031,67
7	Puskesmas Madello	83.027.241,70	82.416.994,89	165.444.236,59
8	Puskesmas Palakka	83.991.320,70	38.745.359,48	122.736.680,18
9	Puskesmas Padongko	99.078.422,44	113.012.922,58	212.091.345,02
10	Puskesmas PekkaE	106.586.941,90	103.124.522,19	209.711.464,09
11	Puskesmas Pancana	103.674.867,82	82.085.727,56	185.760.595,38
12	Puskesmas Lisu	90.878.048,98	71.039.392,08	161.917.441,06
13	Puskesmas Ralla	109.328.313,01	55.954.285,91	165.282.598,92
14	Puskesmas Doi-Doi	65.645.782,95	89.357.105,49	155.002.888,44
15	Puskesmas Pujananting	70.487.045,80	57.808.242,34	128.295.288,14
16	RSUD	1.126.603.423,80	3.075.291.018,66	4.201.894.442,46
Jumlah		4.132.345.888,56	7.606.923.477,57	11.739.269.366,13

Tabel 7.89 Daftar Persediaan Obat dan Alkes (JKN)

No.	Unit	Persediaan Obat	Persediaan BMHP	Total Persediaan
1	Instalasi Farmasi	0,00	0,00	0,00
2	Bidang P2PL	0,00	0,00	0,00
3	Bidang Kesga & Gizi	0,00	0,00	0,00
4	Puskesmas Bojo Baru	257.343,00	1.247.882,00	1.505.225,00
5	Puskesmas Palanro	0,00	75.000,00	75.000,00
6	Puskesmas Mangkoso	377.400,00	0,00	377.400,00
7	Puskesmas Madello	1.008.816,00	3.585.072,00	4.593.888,00
8	Puskesmas Palakka	490.000,00	1.597.950,00	2.087.950,00
9	Puskesmas Padongko	21.521.619,80	27.387.997,86	48.909.617,66
10	Puskesmas PekkaE	3.119.164,35	14.993.030,67	18.112.195,02
11	Puskesmas Pancana	2.693.500,00	22.262.402,33	24.955.902,33
12	Puskesmas Lisu	220.000,00	6.655.000,00	6.875.000,00
13	Puskesmas Ralla	1.431.350,00	516.644,00	1.947.994,00
14	Puskesmas Doi-Doi	0,00	0,00	0,00
15	Puskesmas Pujananting	2.108.995,00	3.545.894,44	5.654.889,44
Jumlah		33.228.188,15	81.866.873,30	115.095.061,45

Metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah metode fisik sedangkan metode penilaian yang digunakan adalah metode FIFO (*First In First Out*). Khusus persediaan obat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp7.652.469.985,12, penilaian persediaan diperhatikan terlebih dahulu masa kadaluarsanya, lebih pendek akan dikeluarkan



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

lebih dahulu tanpa memperhatikan waktu obat tersebut masuk gudang.
Rincian persediaan dapat dilihat di *Lampiran 16*.

5.3.2 Investasi Jangka Panjang

5.3.2.1 Investasi Non Permanen Lainnya	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp3.955.716.170,95	Rp3.955.716.170,95

Saldo Investasi Non Permanen Lainnya – Dana Bergulir per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.955.716.170,95 merupakan piutang dana yang telah digulirkan kepada Kelompok Tani/Ternak, Nelayan dan UKM yang telah jatuh tempo dan belum diselesaikan pembayarannya per 31 Desember 2023. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 7.90 Daftar Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2023

No.	Uraian	2022	Realisasi/ Pengurangan	2023	Penyisihan	2023 (<i>netto</i>)
1	Dinas Pertanian	2.426.171.956,00	0,00	2.426.171.956,00	2.426.171.956,00	0,00
2	Dinas Ketahanan Pangan	118.703.000,00	0,00	118.703.000,00	118.703.000,00	0,00
3	BPMD, PPKB & P3A	796.626.000,00	0,00	796.626.000,00	796.626.000,00	0,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	614.215.214,95	0,00	614.215.214,95	614.215.214,95	0,00
	Jumlah	3.955.716.170,95	0,00	3.955.716.170,95	3.955.716.170,95	0,00

Tabel diatas menunjukkan saldo Investasi Non Permanen dari empat SKPD setelah dilakukan penyisihan. Tahun 2023 tidak ada realisasi penerimaan dari Investasi Non Permanen Lainnya – Dana Bergulir.

Nilai bersih atau NRV dari Investasi Non Permanen Dinas Pertanian sebesar Rp0,00. Nilai bersih dari Investasi Non Permanen ini didapat dari Saldo awal tahun 2023 dikurangi dengan penyisihan yang dilakukan. Investasi yang digulirkan ini dimulai tahun 2004 sampai 2009 dan 2012. Penyisihan yang dilakukan untuk Investasi tahun 2004 sampai 2012 sudah mencapai 5 tahun ke atas atau sudah 100% sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Barru sehingga hasil bersih setelah penyisihan diperoleh angka nol.

Untuk Investasi Non Permanen Lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan berupa bibit tanaman yang digulirkan kepada kelompok tani pada tahun 2003 sampai dengan 2006 telah dilakukan penyisihan yang sudah mencapai 5 tahun ke atas atau sudah 100% sehingga nilai bersihnya setelah penyisihan sama dengan Rp0,00.

BPMD, PPKB dan P3A pada tahun 2004 sampai dengan 2007 telah menggulirkan dana berupa bantuan modal usaha kepada kelompok masyarakat dengan total sebesar Rp1.889.150.000,00. Sampai dengan tahun 2015 telah diterima pengembalian sebesar Rp1.092.524.000,00 sehingga saldo akhir sampai tahun 2017 sebesar Rp796.626.000,00. Setelah dilakukan penyisihan sampai dengan tahun 2020 karena sudah



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

mencapai 5 tahun ke atas atau 100%, maka nilai bersih dari dana bergulir tersebut sebesar Rp0,00.

Pada tahun 2008 Dinas Kelautan dan Perikanan telah menggulirkan kepada 11 kelompok nelayan berupa alat tangkap perikanan. Total nilai dana bergulir sebesar Rp659.433.506,00 dan realisasi pengembalian sebesar Rp45.218.291,05 sehingga saldo akhir sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp614.215.214,95. Penyisihan sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp522.082.932,71 sehingga nilai bersih dari dana bergulir tersebut sebesar Rp92.132.282,24. Dan pada tahun 2020, setelah dilakukan penyisihan yang sudah mencapai 5 tahun ke atas atau sudah 100% maka nilai bersih dari dana bergulir sebesar Rp0,00.

Berdasarkan laporan perkembangan dana bergulir, dana bergulir mengalami kemacetan dalam pengembaliannya.

5.3.2.2 Penyisihan	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Investasi Non	Rp(3.955.716.170,95)	Rp(3.927.429.170,95)
Permanen		
Lainnya		

Saldo Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.955.716.170,95. Penyisihan dana bergulir sebesar Rp3.955.716.170,95 yang dilakukan berdasarkan umur piutang Investasi Non Permanen. Rincian dapat dilihat di *Lampiran 17 s.d. 17e*.

5.3.2.3 Investasi	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Permanen	Rp89.822.608.182,00	Rp91.800.132.791,58

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp89.822.608.182,00 merupakan jumlah Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barru pada PT Bank Sulselbar, PDAM Kabupaten Barru dan PT. Samudra Nusantara Barru sampai dengan 31 Desember 2023. Rincian dapat dilihat di *Lampiran 18*. Tahun 2023 tidak ada penambahan Investasi Permanen (Penyertaan Modal) kepada ketiga Badan Usaha tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.91 Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2023	2022
1	PT Bank Sulselbar	54.859.000.000,00	54.859.000.000,00
2	PDAM Kabupaten Barru	34.143.092.413,00	35.941.132.791,58
3	PT. Samudra Nusantara Barru	820.515.769,00	1.000.000.000,00
	Jumlah	89.822.608.182,00	91.800.132.791,58

Metode penilaian Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Direksi PT Bank Sulselbar Nomor SR/360/R/DKA/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 perihal Laporan



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Komposisi Setoran Modal Pemprov/Pemkab/Pemkot se-Sulselbar dan Koperasi PT. Bank Sulselbar per 30 November 2023 menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru sampai dengan Tahun 2022 mempunyai penyertaan modal sebesar Rp28.110.000.000,00 yang terdiri dari saham seri A @Rp1.000.000,00 sebanyak 28.110 lembar. Penyertaan modal Pemerintah Nilai Investasi atau penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada PT. Bank Sulselbar dihitung berdasarkan metode biaya (*cost method*). Akan tetapi, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 02 tanggal 2 Desember 2020 yang telah disahkan oleh Notaris terdapat penambahan Modal Setor Pemerintah Kabupaten Barru sebesar Rp26.749.000.000,00 sebagai kapitalisasi cadangan ke Modal Saham sehingga nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barru ke PT. Bank Sulselbar sebesar Rp54.859.000.000,00.

- b. Pemerintah Kabupaten Barru memiliki 100% kepemilikan pada PDAM Kabupaten Barru, maka Penyertaan Modal dinilai dengan menggunakan Metode Ekuitas. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 pada Lampiran 107 tentang Akuntansi Investasi paragraf ke 37 bahwa kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas dalam penilaian investasi. Dengan kepemilikan penyertaan modal Kabupaten Barru pada PDAM sebesar 100%, maka dalam penghitungan Investasi Permanen menggunakan Metode Ekuitas. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima Pemerintah Kabupaten Barru akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barru pada PDAM senilai Rp53.979.639.000,00 merupakan saldo penyertaan modal sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 yaitu penyertaan modal yang telah disetor kepada PDAM dari TA. 2002 sampai dengan 2012 sebesar Rp46.057.171.000,00, penambahan penyertaan modal dari Dana Hibah Non Kas Pemerintah Pusat sebesar Rp3.922.468.000,00, tahun 2020 dan 2021 telah dilakukan penambahan penyertaan modal ke PDAM masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Rp2.000.000.000,00 untuk sambungan pipa-pipa air perumahan masyarakat kurang mampu. Tahun 2022 dan 2023 tidak ada penyertaan modal ke PDAM. Saat menyusun Laporan Keuangan tahun anggaran 2022, menggunakan Laporan Keuangan PDAM *UnAudited*, sehingga terdapat koreksi pada nilai rugi tahun berjalan 2022 sebesar Rp315.305.314,42 sehingga rugi tahun berjalan 2022 yang awalnya sebesar Rp2.313.215.572,42 menjadi Rp1.997.910.258,00. Dan pada tahun 2023 rugi tahun berjalan tersebut telah dikoreksi sebesar Rp212,00 disebabkan oleh kelebihan



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

pembebanan utang biaya bahan kimia. Laporan Keuangan PDAM dapat dilihat pada *Lampiran 19*. Berikut rincian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barru pada PDAM.

Tabel 7.92 Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM per 31 Desember 2023

Uraian	LKPD Audited 2022	Koreksi	Penyesuaian 2022	LKPD UnAudited 2023
Penyertaan Pemerintah Pusat	20.346.322.657,00	0,00	20.346.322.657,00	20.346.322.657,00
Penyertaan Pemerintah Daerah	53.979.639.000,00	0,00	53.979.639.000,00	53.979.639.000,00
Modal Hibah	11.050.448.730,00	0,00	11.050.448.730,00	11.050.448.730,00
Cadangan Modal	(401.834.668,00)	0,00	(401.834.668,00)	(401.834.668,00)
Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu	(46.720.227.354,00)	0,00	(46.720.227.354,00)	(48.718.137.400,00)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(2.313.215.572,42)	315.305.526,42	(1.997.910.046,00)	(2.113.345.906,00)
Saldo Akhir Ekuitas	35.941.132.791,58	315.305.526,42	36.256.438.319,00	34.143.092.413,00

- c. PT. Samudra Nusantara Barru adalah Perusahaan perseroan daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru. PT. Samudra Nusantara Barru bergerak dibidang penyediaan/pelayanan jasa kapal, penumpang dan jasa barang dan kegiatan lainnya yang terkait dengan kepelabuhanan. Sebagai upaya memperkuat permodalan PT. Samudra Nusantara Barru dan menjalankan usahanya, Pemerintah Kabupaten Barru melakukan penyertaan modal awal sebesar Rp1.000.000.000,00 di tahun 2022. Berikut rincian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barru kepada PT. Samudra Nusantara (Perseroda):

Tabel 7.93 Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroda per 31 Desember 2023

Uraian	LKPD Audited 2022	Koreksi	Penyesuaian 2022	LKPD UnAudited 2023
Penyertaan Pemerintah Pusat	119.000.000.000,00	0,00	119.000.000.000,00	119.000.000.000,00
Penyertaan Pemerintah Daerah (Kas)	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Penyertaan Pemerintah Daerah (Aset Tetap)	0,00	541.805.021,00	541.805.021,00	541.805.021,00
Laba/(Rugi) Ditahan	0,00	(172.223,00)	(172.223,00)	(656.637.823,00)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	0,00	(656.465.600,00)	(656.465.600,00)	(64.651.429,00)
Saldo Ekuitas Akhir	1.000.000.000,00	(114.832.802,00)	885.167.198,00	820.515.769,00

5.3.3 Aset Tetap

Jumlah pada pos Aset Tetap sebesar Rp1.905.519.069.902,54 merupakan nilai aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Barru sampai 31 Desember 2023. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

metode harga perolehan dan telah memperhitungkan depresiasi (penyusutan). Rincian kelompok aset tetap dan mutasi selama Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.94 Rincian Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2023	Mutasi	Saldo Akhir 31 Desember 2023
1	Tanah	354.523.652.988,81	14.987.113.556,00	369.510.766.544,81
2	Peralatan dan Mesin	433.150.377.921,99	22.010.940.783,20	455.161.318.705,19
3	Gedung dan Bangunan	826.508.905.274,57	1.407.604.761,90	827.916.510.036,47
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.100.165.574.344,32	93.393.661.247,02	2.193.559.235.591,34
5	Aset Tetap Lainnya	84.971.408.046,86	2.940.648.939,00	87.912.056.985,86
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	40.592.727.803,97	3.643.304.031,09	44.236.031.835,06
7	Akumulasi Penyusutan	(1.885.501.879.917,20)	(187.274.969.878,98)	(2.072.776.849.796,18)
	Jumlah	1.954.410.766.463,32	(48.891.696.560,78)	1.905.519.069.902,54

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Barru Per 31 Desember 2023 merupakan akumulasi penambahan aset tetap dari tahun 2022 serta dari penambahan atas Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp148.016.364.234,00. Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Barru per 31 Desember 2022 dan 2023 adalah sebesar Rp1.954.410.766.463,32 dan Rp1.905.519.069.902,54 Total Penambahan/Pengurangan Aset tetap sebesar (Rp48.891.696.560,78).

Rincian mutasi aset tetap dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 pada *Lampiran 20*.

5.3.3.1 Tanah

Per 31 Desember 2023

Per 31 Desember 2022

Rp369.510.766.544,81

Rp354.523.652.988,81

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp369.510.766.544,81 merupakan nilai tanah milik Pemerintah Kabupaten Barru per 31 Desember 2023. Aset Tetap Tanah yang tercatat pada tahun 2022 sebanyak 1.145 bidang tanah. Pada tahun 2023 terdapat penambahan berupa 6 bidang tanah pada perumahan Rachita berupa fasum jalan dan taman dan 1 bidang tanah pembangunan Mesjid Raya menjadi sebanyak 1.152 bidang tanah, kemudian dari 1.152 bidang itu dikurangi oleh hibah pasar desa sebanyak 7 bidang tanah dan penghapusan P3D sebanyak 1 bidang tanah sehingga pada tahun 2023 bidang tanah yang tercatat sebanyak 1.144 bidang tanah.

Pada tahun 2023 Tanah yang sudah bersertifikat sebanyak 492 bidang tanah didalamnya terdapat 5 bidang tanah yang tercatat dalam satu lokasi dan 2 tercatat double sehingga tanah yang bersertifikat pada tahun 2023 sebanyak 485 bidang tanah dan sebanyak 652 bidang tanah belum bersertifikat. Saldo awal Aset Tetap Tanah sebesar Rp354.523.652.988,81, kemudian terjadi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Tabel 7.95 Daftar Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo Awal 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2023 (Rp)
1	Tanah	354.523.652.988,81	15.113.853.556,00	126.740.000,00	369.510.766.544,81
	Jumlah	354.523.652.988,81	15.113.853.556,00	126.740.000,00	369.510.766.544,81

Mutasi Aset Tetap Tanah

Saldo Awal 2023 354.523.652.988,81

PENAMBAHAN ASET TETAP TANAH:

- Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah Tahun 2023	7.100.823.000,00
- Mutasi SKPD (+)	0,00
- Reklasifikasi (+) pindah KIB	0,00
- Sisa Kontrak yang telah diakui Aset (Keuangan < 100%, Fisik 100%)	0,00
- Koreksi Kurang Catat atas Tanah pada Sekretariat Daerah	241.300.000,00
- Koreksi tambah tanah rest area desa Lawallu yang belum dicatat	7.769.230.556,00
- Penambahan Aset Tetap dari Hibah	2.500.000,00
Jumlah Penambahan	<u>15.113.853.556,00</u>

PENGURANGAN ASET TETAP TANAH:

- Realisasi Belanja Modal Untuk Pembayaran Utang Pihak Ketiga	0,00
- Penghapusan	126.740.000,00
- Mutasi SKPD (-)	0,00
- Koreksi Lebih Catat pada KIB Dinas Pendidikan	0,00
- Koreksi Double Catat Aset Tanah/Tanah kantor	0,00
- Koreksi atas Belanja Modal Tanah yang tidak diakui sebagai Aset Tanah	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	0,00
Jumlah Pengurangan	<u>126.740.000,00</u>
Saldo Akhir Tahun 2023	369.510.766.544,81

- i. Penambahan Aset Tetap Tanah terdiri dari:
- Penambahan Aset Tetap Tanah dari Belanja Modal Dinas PUPR sebesar Rp7.100.823.000,00 berupa tanah untuk Pembangunan Mesjid Raya.
 - Penambahan Aset Tetap Tanah dari Belanja Hibah pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp7.769.230.556,00 berupa tanah rest area desa Lawallu yang tidak jadi diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan di bukukan di Pengelola Barang.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

- Penambahan Aset Tetap Tanah dari Hibah pada KUA (Kemenag) sebesar Rp2.500.000,00 berupa hibah tanah yang belum tercatat.
- Penambahan Aset Tetap Tanah dari Belanja Modal Sekretariat Daerah sebesar Rp241.300.000,00 berupa tanah Setda yang belum dicatat sejak tahun 2022.

- ii. Pengurangan Aset Tetap Tanah terdiri dari:
 Penghapusan Aset Tetap Tanah sebesar Rp126.740.000,00 pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan berupa Tanah Bangunan Pasar yang dihibahkan ke Pemerintah Desa dengan Nomor SK Penghapusan 12/Pengelola-BMD/XII/2023 tanggal 29/12/2023.

5.3.3.2 Peralatan dan Mesin **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp455.161.318.705,19 **Rp433.150.377.921,99**

Saldo Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp455.161.318.705,19 merupakan nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Barru per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.96 Daftar Aset Tetap – Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Saldo Awal 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2023 (Rp)
1	Alat-alat Besar	17,100,247,226,00	1.332.617.175,00	22.037.325,00	18.410.827.076,00
2	Alat-alat Angkutan	80,233,616,660,20	3.675.502.849,00	2.606.878.609,00	81.302.240.900,20
3	Alat Bengkel dan Ukur	3,229,212,567,40	19.974.000,00	66.730.000,00	3.182.456.567,40
4	Alat Pertanian	954,541,100,00	2,000,000,00	0,00	956.541.100,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	56,142,273,818,91	9.737.316.034,70	3.560.977.283,50	62.318.612.570,11
6	Alat Studio & Komunikasi	26,275,870,345,80	1.311.840.521,00	46.388.000,00	27.541.322.866,80
7	Alat kedokteran	140,443,887,195,20	4.420.380.694,00	159.226.700,00	144.705.041.189,20
8	Alat Laboratorium	51,180,795,643,48	3.619.932.500,00	12.145.000,00	54.788.583.143,48
9	Alat Persenjataan	510,502,000,00	10.200.000,00	2.500.000,00	518.202.000,00
10	Komputer	51,906,351,844,00	5.585.185.747,00	1.115.150.911,00	56.376.386.680,00
11	Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Alat Produksi, Pengolahan, Pemurnian	102.284.000,00	0,00	0,00	102.284.000,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Alat Keselamatan Kerja	2.284.382.494,00	240.850.000,00	475.400.000,00	2.049.832.494,00
16	Alat Peraga	0,00	234.700.000,00	234.700.000,00	0,00
17	Peralatan Proses	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Saldo Awal 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2023 (Rp)
	Produksi				
18	Rambu-Rambu	2.170.419.108,00	71.631.000,00	0,00	2.242.050.108,00
19	Peralatan Olahraga	615.993.919,00	55.844.091,00	4.900.000,00	666.938.010,00
	Jumlah	433.150.377.921,99	30.317.974.611,70	8.307.033.828,50	455.161.318.705,19

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Saldo Awal 2023

433.150.377.921,99

PENAMBAHAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN:

- Realisasi Belanja Modal Tahun 2023	21.357.154.751,00
- Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang menambah nilai aset	110,865,000,00
- Sisa Kontrak yang telah diakui Aset (Keuangan < 100%, Fisik 100%)	413.262.452,00
- Penambahan Aset Tetap dari Hibah	3.852.922.672,00
- Perpindahan KIB (+)	3.148.862.195,70
- Mutasi SKPD (+)	1.434.907.541,00
- Koreksi kurang catat	0,00
- Penambahan Aset Tetap dari Dana BOS Affirmasi dan Kinerja	0,00
- Penambahan Aset Tetap dari Dana JKN	0,00
- Penambahan Aset Tetap berdasarkan hasil inventarisasi	0,00
- Penambahan Aset Tetap dari Belanja Tidak Terduga	0,00
Jumlah Penambahan	30.317.974.611,70

PENGURANGAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN:

- Realisasi Belanja Modal Untuk Pembayaran Utang Pihak Ketiga/Retensi	663.712.000,00
- Perpindahan KIB (-)	2.550.389.400,00
- Penghapusan karena rusak berat	860.370.600,00
- Mutasi SKPD (-)	1.434.907.541,00
- Koreksi lebih catat pada KIB Peralatan dan Mesin	0,00
- Reklasifikasi Belanja Modal ke Belanja Barang dan Jasa	415,508,000,00
- Pengurangan Aset Tetap bersumber dari Belanja Modal 2023 (Ekstrakompatible)	715.038.369,50
- Pengurangan Aset Tetap akibat Perubahan Kebijakan Akuntansi (Ekstrakompatible)	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	1.667.107.918,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Jumlah Pengurangan	8.307.033.828,50
Saldo Akhir Tahun 2023	455.161.318.705,19

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin diperoleh antara lain dari Realisasi Belanja Modal Tahun 2023, Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang menambah nilai aset, Sisa Kontrak yang telah diakui Aset (Keuangan < 100%, Fisik 100%), Hibah, Perpindahan KIB, Mutasi SKPD dan penambahan aset tetap dari hasil inventarisasi.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 sebesar 21.357.154.751,00 menjadi penambah nilai aset tetap peralatan dan mesin sebagai berikut:

Tabel 7.97 Realisasi Belanja - Modal Peralatan dan Mesin TA. 2023

No.	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	5.373.377.350,00
2	Dinas Kesehatan	4.603.138.876,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	5.248.432.150,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	362.840.270,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
9	Dinas Sosial	3.850.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	216.550.000,00
13	Dinas PMD, Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan Perlindungan Anak	398.370.000,00
14	Dinas Perhubungan	79.031.000,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	332.095.200,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	290.000,00
17	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	112.233.100,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	811.017.987,00
20	Dinas Perikanan	26.590.000,00
21	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	73.389.900,00
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.900.000,00
23	DPRD	0,00
24	Bupati dan Wakil Bupati	0,00
25	Sekretariat Daerah	1.652.288.000,00
26	Sekretariat DPRD	1.068.878.100,00
27	Kecamatan Barru	71.700.000,00
28	Kecamatan Tanete Rilau	0,00
29	Kecamatan Tanete Riaja	24.675.000,00
30	Kecamatan Pujananting	0,00
31	Kecamatan Balusu	8.575.000,00
32	Kecamatan Soppeng Riaja	20.800.000,00
33	Kecamatan Mallusetasi	42.150.000,00
34	Inspektorat Daerah	30.075.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	SKPD	Jumlah
35	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	36.700.000,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	122.609.000,00
37	Badan Pendapatan Daerah	522.635.818,00
38	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	107.600.000,00
39	Dinas Tenaga Kerja	3.363.000,00
	Jumlah	21.357.154.751,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang menambah nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp110.865.000,00 merupakan belanja yang terjadi di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Badan Pendapatan Daerah. Rincian Belanja Barang dan Jasa yang menambah nilai aset tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada *Lampiran 20a*.

Sisa Kontrak yang telah diakui Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang fisiknya sudah 100% tetapi keuangan kurang dari 100% sebesar Rp413.262.452,00, dapat dilihat pada *Lampiran 20b*.

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari Hibah sebesar Rp3.852.922.672,00. Adapun rincian hibah peralatan dan mesin antara lain, dapat dilihat pada *Lampiran 20c*.

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari Perpindahan KIB sebesar Rp3.148.862.195,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.98 Daftar Perpindahan KIB yang Menambah Nilai Peralatan dan Mesin

No.	Peralatan dan Mesin	Jumlah	Keterangan
Perpindahan dari KIB C ke KIB B			
1	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	2.660.390.389,70	BM 2023 pindah dari Belanja Lemari Kayu, Cermin Besar, Rak Kayu, CCTV, Papan Visual, Lampu Kristal, Papan Gambar, Papan Nama Instansi, Meja Kayu, Meja Rapat, Kursi Besi, Meja Resepsionist, Meja Panjang, Kursi Rapat, Pot Bunga, Partisi, Sopa, AC, TV, Karpas, Gordyn, dan rumah tangga lain-lain (Sekretariat Daerah)
2	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar KIB C ke KIB B	2.662.179,00	BM 2023 pindah dari Belanja Splitter. (Sekretariat Daerah)
3	Peralatan Olahraga	29.381.091,00	BM 2022 berupa Peralatan Permainan Lainnya (Setda)
	Jumlah	2.692.433.659,70	
Perpindahan dari KIB D ke KIB B			
1	Alat Besar	1.437.325,00	BM 2023 pindah dari Belanja Modal Bangunan Air (Dinas PUPR)
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.384.396,00	BM 2023 pindah dari Belanja Treng Air/Tandon Air. (PUPR)
	Jumlah	9.821.721,00	
Perpindahan dari KIB E ke KIB B			



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Peralatan dan Mesin	Jumlah	Keterangan
Perpindahan dari KIB C ke KIB B			
1	Komputer	658.961,00	BM 2022 berupa HD External (Dinas PUPR)
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	431.647.854,00	BM 2023 pindah dari Belanja Modal Aset tetap lainnya (Diknas)
		14.300.000,00	BM 2023 pindah dari Belanja Alat Perekam dan Sound System. (Sekretariat DPRD)
	Jumlah	446.606.815,00	
	Total	3.148.862.195,70	

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari mutasi SKPD sebesar Rp1.434.907.541,00.

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin diakibatkan antara lain dari Realisasi Belanja Modal untuk pembayaran Utang Pihak Ketiga/Retensi, Perpindahan KIB, Penghapusan karena rusak berat, Mutasi SKPD, Reklasifikasi Belanja Modal ke Belanja Barang dan Jasa, pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena menjadi Ekstrakompatible yang bersumber dari Belanja Modal 2023 dan Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari realisasi Belanja Modal untuk pembayaran Utang Pihak Ketiga/Retensi sebesar Rp663.712.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.99 Daftar Realisasi BM untuk Pembayaran UPK/Retensi

No.	Uraian	Rekanan			Realisasi	
		Nama	No. kontrak	Nilai Kontrak	Fisik	Keuangan
1	Pembayaran Retensi 5% (Lanjutan) Pekerjaan Aplikasi SIMRS pada RSUD	PT. Aistech Global Solution	800/184/KONTRAK/RSUD-BR/XI/2022	829.640.000,00	100%	663.712.000,00

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Perpindahan KIB sebesar Rp2.550.389.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.100 Daftar Perpindahan KIB yang Mengurangi Nilai Peralatan dan Mesin

No.	Peralatan dan Mesin	Jumlah	Keterangan
Perpindahan dari KIB B ke KIB D			
1	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	12.120.000,00	BM 2022 Pemasangan kilometer Listrik, Pemasangan Jaringan Wifi dan Penambahan Daya Listrik (Diknas)
	Jumlah	12.120.000,00	
Perpindahan dari KIB B ke KIB E			
1	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	2.538.269.400,00	BM 2022 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Dana BOS Diknas)
	Total	2.550.389.400,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp860.370.600,00 merupakan Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari KIB B karena rusak berat. Adapun rinciannya dapat dilihat pada *Lampiran 20d*.

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin akibat dari reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp415.508.000,00 antara lain:

Tabel 7.101 Daftar Reklasifikasi Belanja Modal Murni TA. 2023 Peralatan dan Mesin ke Belanja Barang dan Jasa

No	SKPD	Nama Barang	Jumlah		
			Unit	Satuan	Harga
1	Dinas Pendidikan	Pemasangan Wifi			1.500.000,00
		UPTD SD Negeri 48 Barru			1.060.000,00
		UPTD SD Negeri 73 Barru			4.500.000,00
		UPTD SD Negeri 78 Barru			823.000,00
		UPTD SD Negeri 105 Barru			450.000,00
		UPTD SD Negeri 107 Barru			5.040.000,00
		UPTD SD Negeri 137 Barru			500.000,00
		UPTD SD Negeri 147 Barru			2.625.000,00
		UPTD SD Negeri 189 Barru			1.700.000,00
				Jumlah	
2	Dinas Kesehatan	Alat Periksa Mata			625.000,00
		Tensimeter			1.250.000,00
		Jumlah			1.875.000,00
3	DPMDP2KBP3A	- Belanja paket pengadaan Implant removal kit			32.740.000,00
		- Belanja Paket Pengadaan IUD kit			108.960.000,00
		- Pengadaan andropometri kit			6.540.000,00
		- Pengadaan alat pendingin (Kulkas)			2.500.000,00
		- Papan nama kayu rumah gizi			1.130.000,00
		- Belanja paket BKB kit stunting			234.700.000,00
		Jumlah			386.570.000,00
3	DINAS KOPERASI	- Alat Bengkel			75.000,00
		- Alat Laboratorium			215.000,00
		Jumlah			290.000,00
4	KECAMATAN BALUSU	- BM Alat Bengkel dan Alat Ukur (shocbreaker depan dan belakang)			2.325.000,00
		- Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja (sepatu PDU Paskibraka Kec. Balusu)			6.250.000,00
		Jumlah			8.575.000,00
TOTAL					415.508.000,00

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp715.038.369,50 karena merupakan Belanja Modal Tahun 2023 yang membelanjakan barang yang bersifat Ekstrakompatible yaitu tidak memenuhi syarat kapitalisasi Barang Milik Daerah. Sesuai Kebijakan Akuntansi satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin \geq Rp1.000.000,00.

Adapun rincian Daftar Reklasifikasi Belanja Modal Murni TA. 2023 Peralatan dan Mesin Ekstrakompatible dapat dilihat pada *Lampiran 20e*.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.667.107.918,00 merupakan pengurangan akibat reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 7.102 Daftar Peralatan dan Mesin yang Tereklasifikasi ke Aset Lain-Lain

No	SKPD	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	BKAD (Pengelola Barang)	Sepeda Motor	65.583.000,00	
		Global Positioning System	48.550.000,00	
		Alat Ukur lainnya	8.000.000,00	
		Lemari Kayu	12.440.000,00	
		Brangkas	10.000.000,00	
		Lemari Makan	1.500.000,00	
		Focusing Screen/Layar LCD Projector	7.500.000,00	
		Alat Kantor Lainnya	6.300.000,00	
		Meja Kerja Kayu	4.785.000,00	
		Meja Rapat	4.850.000,00	
		Meja 1/2 Biro	4.032.600,00	
		Kursi Tamu	9.900.000,00	
		Partisi	16.610.000,00	
		Meubeleur lainnya	2.500.000,00	
		Mesin Pemotong Rumput	5.000.000,00	
		Lemari Es	2.475.000,00	
		A.C. Window	10.800.000,00	
		Rice Cooker (Alat Dapur)	2.000.000,00	
		Televisi	1.100.000,00	
		Loudspeaker	2.660.000,00	
		Tangga Aluminium	1.000.000,00	
		Handy Cam	28.300.000,00	
		Gordyin/Kray	30.130.000,00	
		Alat Pembantu Kebakaran	42.000.000,00	
		Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3.460.000,00	
		Kursi Kerja Pejabat lainnya	4.780.000,00	
		Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	10.485.000,00	
		P.C Unit	23.500.000,00	
		Lap Top	26.000.000,00	
		Note Book	44.896.250,00	
		Plotter (Peralatan Mini Komputer)	99.950.000,00	
Printer (Peralatan Personal Komputer)	11.750.000,00			
		Jumlah	552.836.850,00	
2	Dinas Pertanian	Sepeda Motor	13.450.000,00	
		Sepeda Motor	13.400.000,00	
		Sepeda Motor	16.800.000,00	
		Sepeda Motor	20.500.000,00	
		Sepeda Motor	16.035.000,00	
		Sepeda Motor	16.035.000,00	
		Sepeda Motor	16.439.500,00	
		Focusing Screen/Layar LCD Projector	1.450.000,00	
		Handy Cam	7.300.000,00	
		Handy Cam	7.300.000,00	
		Handy Cam	7.300.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

		Handy Cam	7.300.000,00
		Jumlah	143.309.500,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sepeda Motor	12.500.000,00
		Sepeda Motor	12.500.000,00
		Sepeda Motor	12.500.000,00
		Sepeda Motor	8.678.250,00
		Jumlah	46.178.250,00
4	Badan Pendapatan Daerah	Sepeda Motor	12.500.000,00
		Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	108.192.000,00
		Jumlah	120.692.000,00
5	Dinas PMD	Sepeda Motor	14.135.000,00
		Sepeda Motor	14.135.000,00
		Sepeda Motor	12.635.000,00
		Jumlah	40.905.000,00
6	Dinas Pendidikan	Sepeda Motor	13.211.100,00
		Jumlah	13.211.100,00
7	Dinas Kesehatan	Mobil Ambulance	118.181.818,00
		Mobil Ambulance	496.254.000,00
		Jumlah	614.435.818,00
8	Kecamatan Mallusetasi	Sepeda Motor	9.476.600,00
		Jumlah	9.476.600,00
9	Kecamatan Sop. Riaja	Sepeda Motor	9.561.600,00
		Jumlah	9.561.600,00
10	Kecamatan Barru	Sepeda Motor	9.312.000,00
		Sepeda Motor	9.312.000,00
		Sepeda Motor	9.283.200,00
		Jumlah	27.907.200,00
10	Dinas Perikanan	Alat Kantor Lainnya	1.500.000,00
		Pengaman Pintu Besi	1.000.000,00
		Kursi Tamu	1.000.000,00
		Mesin Pemotong Rumput	2.585.000,00
		Uninterruptible Power Supply (UPS)	2.400.000,00
		peralatan studio audio lainnya (dst)	6.500.000,00
		Mesin Cetak Listrik Roll	1.750.000,00
		Mesin Cetak Listrik Roll	4.510.000,00
		alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)	6.984.000,00
		alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)	3.494.000,00
		Wireless Amplifier	2.450.000,00
		P.C Unit	12.870.000,00
		Lap Top	9.878.000,00
		Lap Top	8.750.000,00
		Printer (Peralatan PC Komp.)	8.300.000,00
		Printer (Peralatan PC Komp.)	1.600.000,00
		Printer (Peralatan PC Komp.)	1.900.000,00
		Printer (Peralatan PC Komp.)	1.900.000,00
		Printer (Peralatan PC Komp.)	1.720.000,00
		Printer (Peralatan PC Komp.)	3.476.000,00
		Printer (Peralatan PC Komp.)	3.465.000,00
		Printer (Peralatan PC Komp.)	1.562.000,00
		Jumlah	88.594.000,00
		Total	1.667.107.918,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

5.3.3.3 Gedung dan Bangunan **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp827.916.510.036,47 **Rp826.508.905.274,57**

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp827.916.510.036,47 merupakan nilai gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Barru per 31 Desember 2023. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 7.103 Daftar Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo Awal 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2023 (Rp)
1	Bangunan Gedung	817.375.891.274,57	70.763.713.222,11	71.423.435.757,21	816.716.168.739,47
2	Monumen	2.673.434.286,00	0,00	65.098.370,00	2.608.335.916,00
3	Bangunan Menara	266.763.855,00	0,00	0,00	266.763.855,00
4	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	6.192.815.859,00	2.575.525.179,00	443.099.512,00	8.325.241.526,00
	Jumlah	826.508.905.274,57	73.339.238.401,11	71.931.633.639,21	827.916.510.036,47

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Saldo Awal 2023

826.508.905.274,57

PENAMBAHAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN:

- Realisasi Belanja Modal Tahun 2023	53.248.357.339,00
- Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang menambah nilai Aset	199.805.500,00
- Sisa Kontrak yang telah diakui sebagai Aset (Keuangan < 100%, Fisik 100%)	1.365.821.549,40
- Perpindahan KIB (+)	8.221.198.380,85
- Penambahan Aset Tetap dari Hibah	0,00
- Mutasi SKPD (+)	9.879.995.631,86
- Penambahan Aset Tetap dari Dana BOS Affirmasi dan Kinerja	0,00
- Penambahan Aset Tetap dari Dana JKN	0,00
- Penambahan Aset Tetap berdasarkan Hasil Inventarisasi	424.060.000,00
- Koreksi kurang catat pada	0,00
- Penambahan Aset Tetap dari Belanja Tidak Terduga	0,00
Jumlah Penambahan	<u>73.339.238.401,11</u>

PENGURANGAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN:

- Realisasi Belanja Modal Untuk Pembayaran Utang Pihak Ketiga/Retensi	1.881.116.590,00
- Utang Pihak Ketiga dari KDP 2022	328.753.418,85
- Perpindahan KIB (-)	29.893.038.496,70
- Mutasi SKPD (-)	9.879.995.631,86



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

- Pengurangan Aset Tetap akibat Perubahan Kebijakan Akuntansi (Ekstrakompatabel) bersumber dari Belanja Modal 2023	143.028.479,00
- Pengurangan Aset Tetap akibat Perubahan Kebijakan Akuntansi (Ekstrakompatabel)	0,00
- Reklasifikasi Belanja Modal ke Belanja Barang dan Jasa	0,00
- Penghapusan	23.215.835.548,00
- Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	6.589.865.474,80
- Pengurangan Aset Tetap akibat double catat pada SKPD	0,00
Jumlah Pengurangan	71.931.633.639,21
Saldo Akhir Tahun 2023	827.916.510.036,47

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan diperoleh antara lain dari Realisasi Belanja Modal Tahun 2023, Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang menambah nilai aset, Sisa Kontrak yang telah diakui Aset (Keuangan < 100%, Fisik 100%), Perpindahan KIB, Hibah, Mutasi SKPD, Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan Hasil Inventarisasi.

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp53.248.357.339,00 sebagai berikut:

Tabel 7.104 Realisasi Belanja - Modal Gedung dan Bangunan TA. 2023

No.	SKPD	Bangunan Gedung	Monumen	Bangunan Menara	Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	Dinas Pendidikan	18.695.046.373,00	0,00	0,00	1.253.405.180,00
2	Dinas Kesehatan	7.021.827.271,00	0,00	0,00	10.295.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	719.010.069,00	0,00	0,00	307.162.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	13.101.616.918,00	0,00	0,00	218.915.090,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Sosial	7.510.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas PMD, Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan Perlindungan Anak	76.243.693,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	10.559.064,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	SKPD	Bangunan Gedung	Monumen	Bangunan Menara	Tugu Titik Kontrol/Pasti
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	27.991.000,00	0,00	0,00	47.417.880,00
17	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.777.300,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.455.200.250,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Perikanan		0,00	0,00	0,00
21	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	36.172.875,00	0,00	0,00	67.078.800,00
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	19.984.265,00	0,00	0,00	0,00
23	DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bupati dan Wakil Bupati	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Sekretariat Daerah	859.244.225,00	0,00	0,00	0,00
26	Sekretariat DPRD	454.785.850,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Barru	115.920.555,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Tanete Rilau	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Tanete Riaja	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Pujananting	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Balusu	26.451.620,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Soppeng Riaja	49.727.400,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Mallusetasi	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Badan Pendapatan Daerah	649.014.661,00	0,00	0,00	0,00
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	51.344.083.389,00	0,00	0,00	1.904.273.950,00

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang menambah nilai aset sebesar Rp199.805.500,00. Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa yang menambah nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.105 Belanja Barjas yang Menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA. 2023

No.	Uraian/Kegiatan	Realisasi
1	SEKRETARIAT DPRD	
	Pembangunan/Rehab Parkiran VIP	
	Fisik	99.942.500,00
	Pembangunan Papan Nama Kantor	
	Fisik	99.863.000,00
	Jumlah	199.805.500,00
	Total	199.805.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Sisa Kontrak yang telah diakui Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang fisiknya sudah 100% tetapi keuangan kurang dari 100% sebesar Rp1.365.821.549,40, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.106 Sisa Kontrak yang diakui Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	SKPD	Bangunan Gedung	Monumen	Bangunan Menara	Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	Dinas Pendidikan	1.019.132.869,00	0,00	0,00	60.043.753,00
2	Dinas Kesehatan	72.216.747,00	0,00	0,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	13.800.000,00	0,00	0,00	19.756.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	58.681.224,00	0,00	0,00	4.710.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas PMD, Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	6.621.200,00
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bupati dan Wakil Bupati	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Sekretariat Daerah	47.704.335,00	0,00	0,00	0,00
26	Sekretariat DPRD	54.405.410,47	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Barru	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Tanete Rilau	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Tanete Riaja	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Pujananting	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Balusu	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Soppeng Riaja	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Mallusetasi	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	SKPD	Bangunan Gedung	Monumen	Bangunan Menara	Tugu Titik Kontrol/Pasti
	Aset Daerah				
37	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Badan Pendapatan Daerah	8.750.010,93	0,00	0,00	0,00
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.274.690.596,40	0,00	0,00	91.130.953,00

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari Perpindahan KIB sebesar Rp8.221.198.380,85 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.107 Daftar Perpindahan KIB yang Menambah Nilai Gedung dan Bangunan

No.	Gedung dan Bangunan	Jumlah	Keterangan
Perpindahan dari KIB F (KDP 2022) ke KIB C			
1	Bangunan Gedung	98.538.000,00	Konsultan Perencanaan Interior Lantai 5 Gedung Tower Kt Bupati (PUPR)
		69.290.000,00	Konsultan Perencanaan Pembangunan Rescue Center (PUPR)
2		8.550.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PK) Jasa Konstruksi (PUPR)
3		28.000.000,00	Honorarium Tim Profesional Ahli (TPA) (PUPR)
4		24.642.000,00	Konsultan Pengawasan Interior Lantai 6 Gedung Tower Ktr Bupati (PUPR)
5		14.003.900,00	Konsultan Pengawasan Rehab.Gedung Pendidikan Kerjasama UNHAS (PUPR)
6		35.281.000,00	Konsultan Pengawasan Pembangunan Rescue Center (PUPR)
7		4.169.500,00	Konsultan Pengawasan Pemb. Taman Ikan Sumpang BinangaE (PUPR)
8		37.551.000,00	Konsultan Perencanaan Interior Lantai 6 Gedung Tower Ktr Bupati (PUPR)
9		6.216.000,00	Konsultan Perencanaan Pemb. Taman Ikan Sumpang BinangaE (PUPR)
10		20.961.000,00	Konsultan Perenc. Rehab.Gedung Pendidikan Kerjasama UNHAS (PUPR)
11		960.203.636,10	Pekerjaan Interior Lantai 6 Gedung Tower Kantor Bupati (PUPR)
12		1.599.507.601,50	Pembangunan Rescue Center (PUPR)
13		532.579.964,16	Rehabilitasi Gedung Pendidikan Kerjasama UNHAS (Kelas D4) (PUPR)
14		179.649.802,40	Rehabilitasi Taman Ikan Sumpang BinangaE (PUPR)
15		600.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PUPR)
16		18.540.575,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (PUPR)
17		18.536.647,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (PUPR)
18		59.607.000,00	Konsultan Pengawasan Interior Lantai 5 Gedung Tower Ktr Bupati (PUPR)
19		27.297.000,00	Konsultan Pengawasan Parkir Kantor Bupati, Rehab. Ruang Data, Rehab. Ruang Tunggu, Rehab. Lap. Tennis Ktr Bupati, Penataan Halaman Kantor Camat Tanete Riaja. (PUPR)
20		23.000.000,00	Konsultan Pengawasan Rehab. Aula Singkerru Ada (PUPR)
21	39.210.120,00	Konsultan Perencanaan Parkir Kantor Bupati, Rehab. Ruang Data, Rehab. Ruang	



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Gedung dan Bangunan	Jumlah	Keterangan
			Tunggu, Rehab. Lap. Tennis Ktr Bupati, Penataan Halaman Kantor Camat Tanete Riaja. (PUPR)
22		34.965.000,00	Konsultan Perencanaan Rehab. Aula Singkerru Ada
23		2.387.498.741,59	Interior Kantor Bupati Barru Lantai 5 Gedung MPP (PUPR)
24		391.141.950,00	Rehabilitasi Aula Pertemuan Baruga Singkerru Ada (PUPR)
25		158.319.419,00	Rehabilitasi Ruang Data Sekretariat Daerah Kab. Barru (PUPR)
26		169.484.720,00	Rehabilitasi Ruang Istirahat Lapangan Tennis Kantor Bupati Barru (PUPR)
27		159.959.415,20	Rehabilitasi Ruang Launge (Ruang Tunggu) Kantor Bupati Barru (PUPR)
28		169.606.178,91	Rehab Ruang Kerja Bagian (SETDA)
29		7.200.000,00	Perencanaan Rehab Ruang Kerja Bagian (SETDA)
30		5.400.000,00	Pengawasan Rehab Ruang Kerja Bagian (SETDA)
31		9.980.000,00	Perencanaan Pembangunan/Rehab Parkiran VIP (Set. DPRD)
32		5.990.000,00	Pengawasan Pembangunan/Rehab Parkiran VIP (Set. DPRD)
33		159.908.000,00	Fisik Pembangunan/Rehab Parkiran VIP (Set. DPRD)
34		9.990.000,00	Perencanaan Pembangunan Papan Nama Kantor (Set. DPRD)
35		6.000.000,00	Pengawasan Pembangunan Papan Nama Kantor (Set. DPRD)
36		159.780.800,00	Fisik Pembangunan Papan Nama Kantor (Set. DPRD)
	Jumlah	7.641.158.970,85	
1	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	10.416.000,00	Konsultan Pengawasan Pemb. Pintu Gerbang Batas Kab. Soppeng (PUPR)
2		15.503.000,00	Konsultan Perencanaan Pemb. Pintu Gerbang Batas Kab. Soppeng (PUPR)
3		378.124.030,00	Pembangunan Pintu Gerbang Batas Kab. Barru - Kab. Soppeng (PUPR)
4		124.729.600,00	Pembangunan Pagar Pasar Ele (Dinas Koperasi)
5		9.999.000,00	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Pasar Ele (Dinas Koperasi)
6		7.800.000,00	SPPD Pembangunan Pagar Pasar Ele (Dinas Koperasi)
7		1.379.500,00	ATK Pembangunan Pagar Pasar Ele (Dinas Koperasi)
	Jumlah	547.951.130,00	
Perpindahan dari KIB D (Belanja 2023) ke KIB C			
	Bangunan Gedung	32.088.280,00	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya (PUPR)
	Jumlah	32.088.280,00	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya (PUPR)
	Total	8.221.198.380,85	

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari Mutasi SKPD sebesar Rp9.879.995.631,86 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.108 Daftar Mutasi Bangunan Gedung Antar SKPD

NO	SKPD AWAL	URAIAN	NILAI	SKPD AKHIR
1	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Dinas Pendidikan Lama	874.952.850,00	Dinas Kesehatan



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

2	DPUTRPKP	Bangunan Rescue Center	1.788.086.000,00	BPBD
3	DPUTRPKP	Rehab Gedung Laboratorium Lingkungan Hidup	166.436.018,00	Dinas Lingkungan Hidup
4	DPUTRPKP	Bangunan Pagar Permanen Lingkungan Hidup	32.169.146,00	Dinas Lingkungan Hidup
5	DPUTRPKP	Bangunan Kantor	5.933.376.547,86	Sekretariat Daerah
6	DPUTRPKP	Rehab. Bangunan Kantor	1.084.975.070,00	Sekretariat DPRD
Jumlah			9.879.995.631,86	

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp424.060.000,00 diperoleh dari hasil inventarisasi aset pada Dinas Pendidikan.

Tabel 7.109 Daftar Inventarisasi yang Menambah Nilai Gedung dan Bangunan

No	SKPD	Nama Barang	Jumlah		Uraian
			Unit	Nilai	
1	DIKNAS	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	1	77.000.000,00	SMPN 2 Tanete Rilau, JL. A. Tenri Sessu, Desa Pancana, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru
2		Bangunan Gedung Kantor Lainnya	1	156.600.000,00	SMPN 3 Tanete Riaja, Desa Libureng, Kec. Tanete Riaja, Kab. Barru
3		Bangunan Gedung Kantor Lainnya	1	85.100.000,00	SMPN 2 Tanete Riaja, Dusun Sikapa, Desa Lempang, Kec. Tanete Riaja, Kab. Barru
4		Bangunan Gedung Kantor Lainnya	1	105.360.000,00	SMPN 3 Soppeng Riaja, Jalan Pacekke, Desa Pacekke, Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru
Jumlah				424.060.000,00	

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan diakibatkan antara lain dari realisasi Belanja Modal untuk pembayaran utang (Utang Pihak ketiga/retensi), Utang Pihak ketiga KDP 2022, Perpindahan KIB, Mutasi SKPD, pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena menjadi Ekstrakompatabel yang bersumber dari Belanja Modal 2023, Reklasifikasi Belanja Modal ke Belanja Barang dan Jasa dan Penghapusan.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari realisasi Belanja Modal untuk pembayaran utang (Utang Pihak ketiga/retensi) sebesar Rp1.881.116.590,00. Jumlah ini merupakan Belanja Modal tahun 2023 untuk membayar utang pihak ketiga/retensi tahun sebelumnya. Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.110 Belanja Modal sebagai Pengurang Nilai Aset Gedung dan Bangunan

No.	SKPD	Realisasi	
		Gedung	Tugu Titik Kontrol
1	Dinas Pendidikan	277.813.476,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

2	Dinas Kesehatan	435.028.189,00	0,00
3	RSUD	443.010.069,00	120.000.000,00
3	DPUTRPKP	316.629.042,00	58.521.320,00
4	Dinas Sosial	7.510.000,00	0,00
5	Dinas Perhubungan	10.559.064,00	0,00
6	Dinas Penanaman Modal	17.777.300,00	0,00
7	Dinas Pariwisata	36.172.875,00	0,00
8	Dinas Pertanian	19.984.265,00	0,00
9	Sekretariat Daerah	11.991.210,00	0,00
10	Sekretariat DPRD	119.883.300,00	0,00
11	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	0,00	6.236.480,00
Total		1.696.358.790,00	184.757.800,00

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang diakibatkan oleh Utang Pihak ketiga KDP 2022 sebesar Rp328.753.418,85 untuk rinciannya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 7.111 Daftar Utang Pihak Ketiga dari Tahun sebelumnya yang Mengurangi Nilai Gedung dan Bangunan

No	SKPD	Gedung dan Bangunan	Jumlah		Rekanan
			Unit	Nilai Utang	
1	DINAS PUPR	Pekerjaan Interior Lantai 6 Gedung Tower Kantor Bupati		48.052.542,10	CV. Arkana Energi Timur
2		Pembangunan Rescue Center		79.964.551,50	CV. Arkana Energi Timur
3		Rehabilitasi Gedung Pendidikan Kerjasama UNHAS (Kelas D4)		26.807.307,16	CV. Hadi Karya Pasatta
4		Rehabilitasi Taman Ikan Sumpang BinangaE		8.983.262,40	CV. Karya Zalsabilla
5		Interior Kantor Bupati Barru Lantai 5 Gedung MPP		119.658.417,58	CV. Ammanullah Aflah
6		Rehabilitasi Aula Pertemuan Baruga Singkerru Ada		19.824.855,00	CV. Ammanullah Aflah
7		Rehabilitasi Ruang Data Sekretariat Daerah Kab. Barru		8.253.619,00	CV. Ammanullah Aflah
8		Rehabilitasi Ruang Istirahat Lapangan Tennis Kantor Bupati Barru		8.488.220,00	CV. Karya Zalsabilla
9		Rehabilitasi Ruang Launge (Ruang Tunggu) Kantor Bupati Barru		8.716.565,20	CV. Ammanullah Aflah
Jumlah				Rp328.749.339,94	
10	SETDA	Rehab Ruang Kerja Bagian		4.078,91	CV.DELTA MANDIRI
Jumlah				4.078,91	
Total				328.753.418,85	

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan diakibatkan juga oleh Perpindahan KIB sebesar Rp29.893.038.496,70 Adapun rinciannya sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Tabel 7.112 Daftar Perpindahan KIB yang Mengurangi Nilai Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
Perpindahan dari KIB C ke KIB B			
1	Bangunan Gedung	417.897.854,00	BM 2023 pindah ke Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa Meja, kursi, papan tulis, lemari besi (Diknas)
		2.692.433.659,70	BM 2023 pindah ke Alat Kantor berupa Peralatan Kantor (Setda)
	Jumlah	3.110.331.513,70	
Perpindahan dari KIB C ke KIB D			
1	Bangunan Gedung	2.862.420,00	Jaringan listrik lainnya (DPRD)
		700.240,00	Jaringan listrik lainnya (DPRD)
		13.554.000,00	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Kec. Balusu)
		12.897.620,00	Belanja Modal Pembangunan WC Kantor Lurah Takkalasi (Kec. Balusu)
		717.718.738,00	Bangunan MCK dan Jaringan Listrik (Diknas)
2		65.098.370,00	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) (Dinas Pariwisata)
		5.629.311,00	Rehab Gedung Kantor pindah ke Jaringan Listrik (Dinas Lingk. Hidup)
	Jumlah	818.460.699,00	
Perpindahan dari KIB C ke KIB F			
1	Bangunan Gedung	4.880.600.625,00	Perbaikan Gedung PKM PekkaE, Biaya Kemajuan Fisik 75% Pembangunan Gedung UPT Labkesda (DAK) dan Perbaikan Gedung PKM Lisu (Dinkes)
2		27.991.000,00	Konsultansi Pengawasan Rehab Pasar Palanro (Dinas Koperasi)
3		9.455.200.250,00	Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan (Dinas Perpustakaan)
4		466.033.243,00	Pengadaan Interior Gedung Kantor (Bappenda)
5		10.184.484.340,00	Pemb. Kantor Dinas Pariwisata, Pemb. Gabungan Dinas-Dinas, Rehabilitasi lisplank Kantor Bupati, Biaya Pengawasan, Honor, PPK, ATK, Perjalanan Dinas dan Biaya lainnya. (Dinas PUPR).
6		949.936.826,00	Rehab Ruang Kelas SDN 63 Barru dan Pembangunan Pagar 4 SDN (Diknas).
	Jumlah	25.964.246.284,00	
	Total	29.893.038.496,70	

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Belanja Modal 2023 karena menjadi barang Ekstrakomptable sebesar Rp143.028.479,00. Sesuai Kebijakan Akuntansi satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan \geq Rp15.000.000,00. Adapun Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang menjadi Ekstrakomptable adalah Belanja Modal 2023 pembangunan pagar Pustu ButtuE (Dinas Kesehatan) sebesar Rp10.295.000,00 dan pembangunan taman utara Kantor Bupati Barru (Setda) sebanyak 10 taman sebesar Rp132.733.479,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp23.215.835.548,00 merupakan penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari KIB C dengan alasan Pemusnahan pada kantor BPBD, DPMPTSP, Badan Pendapatan Daerah dan Sekretariat Daerah karena rusak berat dan Penghapusan dengan Alasan Hibah ke Pemerintah Desa pada Dinas Koperasi. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 7.113 Daftar Penghapusan Gedung dan Bangunan TA. 2023

No	SKPD	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah		SK Penghapusan
				Unit	Nilai	
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bangunan Gedung Kantor Permanen		1	255.580.000,00	
		Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen		1	15.500.000,00	
		Rumah Negara Golongan I Tipe C Semi Permanen		1	22.500.000,00	
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Darurat Lain-lain (dst)		1	42.507.672,00	
3	Badan Pendapatan Daerah	Bangunan Gedung Kantor Permanen		1	243.100.000,00	
4	Sekretariat Daerah	Bangunan Gedung Kantor Permanen		1	323.838.555,00	
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain		1	88.962.002,00	
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen		1	48.500.000,00	
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen		1	56.800.000,00	
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen		1	1.156.178.200,00	
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen		1	207.270.000,00	
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen		1	535.432.000,00	
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen		1	1.843.866.250,00	
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen		1	197.676.000,00	
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen		1	382.052.000,00	
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen		1	154.788.545,00	
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen		1	5.286.651.100,00	
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen		1	4.634.458.566,00	
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen		1	175.223.600,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

		Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen		1	175.223.600,00	
		Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen		1	175.223.600,00	
		Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen		1	175.223.995,00	
		Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen		1	528.720.500,00	
		Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen		1	528.720.500,00	
		Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen		1	994.758.854,00	
		Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen		1	63.495.246,00	
		Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Semi Permanen		1	580.581.620,00	
		Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Semi Permanen		1	536.371.050,00	
		Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Semi Permanen		1	309.701.000,00	
		Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Semi Permanen		1	220.677.000,00	
		Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Semi Permanen		1	2.936.413.162,00	
		Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)		1	57.993.621,00	
		Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)		1	44.903.833,00	
		Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)		1	67.355.750,00	
		Bangunan Gedung Pertokoan Lain (dst)		1	22.451.917,00	
		Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)		1	31.600.922,00	
		Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya		1	47.767.444,00	
		Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya		1	47.767.444,00	
Jumlah					23.215.835.548,00	

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.589.865.474,80 merupakan pengurangan Aset Tetap Gedung dan



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Bangunan yang di reklasifikasi ke Aset Lain-Lain, dapat dilihat pada *Lampiran 20f*.

5.3.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp2.193.559.235.591,34 **Rp2.100.165.574.344,32**

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.193.559.235.591,34 merupakan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Barru per 31 Desember 2023. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 7.114 Daftar Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Saldo Awal 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2023 (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	1.604.974.835.857,87	88.247.624.494,11	17.473.930.592,09	1.675.748.529.759,89
2	Bangunan Air	383.519.730.136,87	24.773.328.026,47	1.636.905.981,47	406.656.152.181,87
3	Instalasi	27.960.614.239,44	0,00	252.770.988,00	27.707.843.251,44
4	Jaringan	83.710.394.110,14	289.392.180,00	553.075.892,00	83.446.710.398,14
	Jumlah	2.100.165.574.344,32	113.310.344.700,58	19.916.683.453,56	2.193.559.235.591,34

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Awal 2023	2.100.165.574.344,32
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal 2023 Setelah Koreksi	2.100.165.574.344,32

PENAMBAHAN ASET TETAP JALAN IRIGASI JARINGAN :

- Realisasi Belanja Modal Tahun 2023	65.926.169.143,00
- Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang menambah Nilai Aset	0,00
- Mutasi SKPD (+)	0,00
- Sisa Kontrak yang telah diakui sebagai Aset (Keuangan 100%, Fisik 100%)	7.862.839.094,02
- Perpindahan KIB (+)	28.102.268.963,56
- Penambahan Aset Tetap dari Hibah	11.419.067.500,00
- Utang Pihak Ketiga dari KDP 2023	0,00
- Penambahan Aset Tetap dari Dana BOS Affirmasi dan Kinerja	0,00
- Penambahan Aset Tetap dari Dana JKN	0,00
- Penambahan Aset Tetap dari Belanja Tidak Terduga	0,00
Jumlah Penambahan	113.310.344.700,58

PENGURANGAN ASET TETAP JALAN IRIGASI JARINGAN:

- Realisasi Belanja Modal Untuk Pembayaran Utang Pihak Ketiga/Retensi	2.334.563.859,00
- Utang Pihak Ketiga/Retensi dari KDP 2023	2.471.910.254,56



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

- Perpindahan KIB (-)	13.549.284.119,00
- Mutasi SKPD (-)	0,00
- Penghapusan karena Hibah	1.021.482.880,00
- Koreksi kurang catat Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi (Pengembalian Aset Lain-Lain ke Aset Tetap)	0,00
- Pengurangan Aset Tetap akibat Perubahan Kebijakan Akuntansi (dari Ekstrakompatabel)	0,00
- Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan ke Aset lain-lain 2023	539.442.341,00
Jumlah Pengurangan	19.916.683.453,56
Saldo Akhir Tahun 2023	2.193.559.235.591,34

Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan diperoleh antara lain dari Realisasi Belanja Modal Tahun 2023, Sisa Kontrak yang telah diakui Aset (Keuangan < 100%, Fisik 100%), Perpindahan KIB, Hibah, dan penambahan dari realisasi Utang Pihak Ketiga KDP 2023.

Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp65.926.169.143,00 sebagai berikut:

Tabel 7.115 Realisasi Belanja - Modal Jalan Irigasi dan Jaringan TA. 2023

No.	SKPD	Jalan dan Jembatan	Bangunan Air	Instalasi	Jaringan	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	57.719.438.142,00	5.008.568.331,00	0,00	0,00	62.728.006.473,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	SKPD	Jalan dan Jembatan	Bangunan Air	Instalasi	Jaringan	Jumlah
13	Dinas PMD, Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	154.840.000,00	154.840.000,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Pertanian	1.628.730.209,00	0,00	0,00	0,00	1.628.730.209,00
23	DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bupati dan Wakil Bupati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sekretariat DPRD	188.528.708,00	0,00	0,00	0,00	188.528.708,00
27	Kec. Barru	347.606.472,00	115.950.330,00	0,00	0,00	463.556.802,00
28	Kec. Tanete Rilau	173.442.234,00	0,00	0,00	0,00	173.442.234,00
29	Kec. Tanete Riaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kec. Pujananting	0,00	135.609.857,00	0,00	0,00	135.609.857,00
31	Kec. Balusu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kec. Soppeng Riaja	40.354.860,00	0,00	0,00	0,00	40.354.860,00
33	Kec. Mallusetasi	249.100.000,00	164.000.000,00	0,00	0,00	413.100.000,00
34	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Badan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	SKPD	Jalan dan Jembatan	Bangunan Air	Instalasi	Jaringan	Jumlah
	Pendapatan Daerah					
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	60.347.200.625,00	5.424.128.518,00	0,00	154.840.000,00	65.926.169.143,00

Sisa Kontrak yang telah diakui Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang fisiknya sudah 100% tetapi keuangan kurang dari 100% sebesar Rp7.862.839.094,02, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.116 Sisa Kontrak yang diakui Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

No.	SKPD	Jalan dan Jembatan	Bangunan Air	Instalasi	Jaringan	Jumlah
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.310.533.065,00	392.705.448,00	0,00	0,00	7.703.238.513,00
2	Dinas Pertanian	140.775.909,00	0,00	0,00	0,00	140.775.909,00
3	Sekretariat DPRD	18.824.672,02	0,00	0,00	0,00	18.824.672,02
	Jumlah	7.470.133.646,02	392.705.448,00	0,00	0,00	7.862.839.094,02

Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan juga diperoleh dari Perpindahan KIB yaitu sebesar Rp28.102.268.963,56. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 7.117 Daftar Perpindahan KIB yang Menambah Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
Perpindahan dari KIB B ke KIB D			
1	Jaringan Listrik	12.120.000,00	BM 2023 (Dana Bos) pindah dari peralatan ke Jaringan (Diknas)
	Jumlah	12.120.000,00	
Perpindahan dari KIB C ke KIB D			
2	Bangunan Air	604.478.529,00	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) (Diknas)
		26.451.620,00	Belanja Modal Bangunan MCK (Kec. Balusu)
		65.098.370,00	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) – (Dinas Pariwisata)
3	Jaringan	5.629.311,00	Jaringan listrik lainnya (Dinas Lingk. Hidup)
		113.240.209,00	Jaringan listrik lainnya (Diknas)
		3.562.660,00	Jaringan listrik lainnya (DPRD)
	Jumlah	818.460.699,00	
Perpindahan KIB F (KDP) ke KIB D			
1	Jalan dan Jembatan	994.595.161,00	KDP 2022 Pembangunan dan peningkatan Jalan Usaha Tani (Dinas Pertanian)
		18.646.659.062,09	KDP 2022 Pembangunan Jalan dan Jembatan (Dinas PUTRPM)
2	Bangunan Air	7.630.434.041,47	KDP 2022 Pembangunan Drainase, Bronjong, Talud Pantai, Penguatan Tebing, dan Jaringan irigasi lainnya (DPUTRKP)
	Jumlah	27.271.688.264,56	
	Total	28.102.268.963,56	



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan juga berasal dari pendapatan Hibah. Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang berasal dari pendapatan Hibah sebesar Rp 11.419.067.500,00 dialokasikan kepada Dinas DPUTRPKP dan Dinas Lingkungan Hidup. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 7.118 Daftar Hibah Jalan Irigasi dan Jaringan TA. 2023

No	SKPD	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah		Pemberi Hibah	BAST
				Unit	Nilai		
1	DPUTRPKP	Jalan Kompleks	2021	1	538.382.000,00	Kementerian PUPR	000.2.3.2/428/D PUTR-PERKIM/2023
		Jalan Kompleks	2020	1	250.654.000,00	Kementerian PUPR	000.2.3.2/428/D PUTR-PERKIM/2023
		Saluran Drainage	2023	1	1.794.390.000,00	Kementerian PUPR Saluran Drainase Pasar Mattirowalie - BTN mattone	No. 1057.1/BA/DC/2021 & 032/1017/BPKAD
		Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	2023	1	4.149.310.000,00	Kementerian PUPR TPA Bottolai kel. Coppo	No. 1057.1/BA/DC/2021 & 032/1017/BPKAD
2	DINAS LINGK. HIDUP	Bangunan Pelimpah Sampah	2021	1	4.686.331.500,00	Kementerian PUPR	Hibah Dari Kemen PUPR No. 1057.1/BA/DC/2021 & 032/1017/BPKAD
Jumlah					11.419.067.500,00		

Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan diakibatkan antara lain dari realisasi Belanja Modal untuk pembayaran utang (Utang Pihak ketiga/retensi), Perpindahan KIB dan reklasifikasi Belanja Modal ke Belanja Barang dan Jasa.

Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang diakibatkan oleh realisasi Belanja Modal untuk pembayaran utang (Utang Pihak ketiga/retensi) sebesar Rp4.806.474.113,56. Adapun rinciannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7.119 Daftar Belanja Modal yang Mengurangi Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian/Kegiatan	Realisasi	
		Jalan dan jembatan	Bangunan Air
1	DPUTRPKP	3.543.723.612,09	1.225.214.639,47
2	DINAS PERTANIAN	37.535.862,00	0,00
3			
Total		3.581.259.474,09	1.225.214.639,47

Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang diakibatkan oleh Perpindahan KIB sebesar Rp13.549.284.119,00 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Tabel 7.120 Daftar Perpindahan KIB yang Mengurangi Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan

No.	Jalan Irigasi dan Jaringan	Jumlah	Keterangan
Perpindahan dari KIB D ke KIB B			
1	Bangunan Air	9.821.721,00	BM 2023 Pembangunan Bak Air Lapakaka berupa Pembelian Pompa Air dan Tandon (DPUTRKM)
	Jumlah	9.821.721,00	
Perpindahan dari KIB D ke KIB C			
1	Bangunan Air	32.088.280,00	BM 2023 Pembangunan Bak Air berupa Bangunan Bak Air Lapakaka (DPUTRKM)
	Jumlah	32.088.280,00	
Perpindahan dari KIB D ke KIB F (KDP)			
1	Jalan dan Jembatan	13.328.076.015,00	Pembangunan jalan dan jembatan (DPUTRKM)
		179.298.103,00	BM 2022 Pembangunan Jalan Usaha Tani (DISPERT)
	Jumlah	13.507.374.118,00	
	Total	13.549.284.119,00	

Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang diakibatkan oleh penghapusan karena hibah sebesar Rp1.021.482.880,00 dapat dilihat pada *Lampiran 20g*.

Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp539.442.341,00 merupakan pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang di reklasifikasi ke Aset Lain-Lain, dapat dilihat pada *Lampiran 20h*.

5.3.3.5 Aset Tetap Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Lainnya Rp87.912.056.985,86 Rp84.971.408.046,86

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp87.912.056.985,86 merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Barru per 31 Desember 2023. Adapun mutasinya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.121 Daftar Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Saldo Awal 2022 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2023 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	76.502.221.727,49	0,00	2.985.660.900,00	45.011.961,00	79.442.870.666,49
2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	32.833.000,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	32.833.000,00
3	Hewan	907.320.000,00	0,00	0,00	0,00	907.320.000,00
4	Biota Peraian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tanaman	6.786.836.953,20	0,00	0,00	0,00	6.786.836.953,20
6	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	742.196.366,17	0,00	0,00	0,00	742.196.366,17
	Jumlah	84.971.408.046,86	0,00	2.992.860.900,00	52.211.961,00	87.912.056.985,86



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Mutasi Aset Tetap Lainnya:

Saldo Awal 2023	84.971.408.046,86
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal 2023 setelah Koreksi	84.971.408.046,86

PENAMBAHAN ASET TETAP LAINNYA:

- Realisasi Belanja Modal Tahun 2022	383.860.000,00
- Perpindahan KIB (+)	2.538.269.400,00
- Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang menambah nilai Aset	Rp70.731.500,00
- Penambahan Aset Tetap dari Hibah	0,00
- Penambahan Aset Tetap dari Dana BOS Affirmasi dan Kinerja	0,00
- Penambahan Aset Tetap dari Dana JKN	0,00
Jumlah Penambahan	2.992.860.900,00

PENGURANGAN ASET TETAP LAINNYA:

- Realisasi Belanja Modal Untuk Pembayaran Utang Pihak Ketiga/Retensi	0,00
- Perpindahan KIB (-)	28.708.961,00
- Mutasi SKPD (-)	0,00
- Reklasifikasi Belanja Modal ke Belanja Barang dan Jasa	23.503.000,00
Jumlah Pengurangan	52.211.961,00
Saldo Akhir Tahun 2023	87.912.056.985,86

Penambahan Aset Tetap Lainnya diperoleh antara lain dari Realisasi Belanja Modal Tahun 2023, Perpindahan KIB dan penambahan dari Belanja Barang dan Jasa yang menjadi aset.

Penambahan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp383.860.000,00. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 7.122 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023

No.	SKPD	Uraian	Realisasi Keuangan
1	Dinas Pendidikan	Belanja cetak e-Book Warisan Budaya Tradisional	18.250.000,00
2	DPUTR Perkim.	Belanja jasa Penyusunan Dokumen RPJKP	344.110.000,00
3	Sekretariat DPRD	Belanja Modal Audio Visual	14.300.000,00
4	Sekretariat Daerah	Belanja Modal Hadiah Lomba	7.200.000,00
		Jumlah	383.860.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Penambahan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari Perpindahan KIB sebesar Rp2.538.269.400,00. Penambahan ini berasal dari KIB-B Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa buku-buku pada Dinas Pendidikan. Karena merupakan buku-buku pustaka maka dipindahkan ke KIB E Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan.

Penambahan Aset Tetap Lainnya juga diperoleh dari Belanja Barang dan Jasa. Penambahan dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp70.731.500,00 pada Dinas Pendidikan berupa Belanja Buku.

Yang menjadi pengurang Aset Tetap Lainnya adalah Reklasifikasi Belanja Modal ke Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp23.503.000,00. Nilai tersebut tidak terealisasi kegiatannya sehingga di reklasifikasi ke belanja barang dan jasa. Selain itu, yang menjadi pengurang aset tetap lainnya adalah perpindahan KIB E ke KIB B sebesar Rp28.708.961,00 karena termasuk kategori peralatan dan mesin berupa peralatan studio.

5.3.3.6 Konstruksi **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Dalam **Rp44.236.031.834,76** **Rp40.592.727.803,97**
Pengerjaan

Tabel 7.123 Daftar Aset Tetap – KDP per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Saldo Awal 2022 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2022 (Rp)
1	KDP	40.592.727.803,97	0,00	39.770.597.308,54	36.127.293.277,75	44.236.031.834,76
	Jumlah	40.592.727.803,97	0,00	39.770.597.308,54	36.127.293.277,75	44.236.031.834,76

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 sebesar Rp44.236.031.835,06 diperoleh dari saldo awal KDP sebesar Rp 40.592.727.803,97 ditambah Utang Pihak Ketiga KDP tahun 2023 sebesar Rp 298.976.906,54 dan penambahan akibat reklasifikasi perpindahan KIB sebesar Rp 39.471.620.402,00, dikurangi dengan realisasi belanja modal pembayaran utang pihak ketiga/retensi sebesar Rp367.684.000,00, Pembayaran Utang Pihak Ketiga dari KDP tahun sebelumnya sebesar Rp298.810.912,34 dan pengurangan akibat perpindahan KIB sebesar Rp 35.460.798.365,41. Rincian mengenai KDP dapat dilihat di *Lampiran 21*.

Mutasi Aset Tetap – KDP:

Saldo Awal 2023	40.592.727.803,97
Koreksi Saldo Awal	0,00
Saldo Awal 2022 setelah Koreksi	40.592.727.803,97
PENAMBAHAN ASET TETAP – KDP:	
- Utang Pihak Ketiga dari KDP 2023	298.976.906,54
- Penyesuaian nilai fisik ke keuangan KDP	0,00
- Mutasi SKPD (+)	0,00
- Perpindahan KIB (+)	39.471.620.402,00
Jumlah Penambahan	39.770.597.308,54



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

PENGURANGAN ASET TETAP – KDP:

- Realisasi Belanja Modal untuk pembayaran utang pihak ketiga/retensi	367.684.000,00
- Utang Pihak Ketiga KDP dari tahun sebelumnya	298.810.912,34
- Perpindahan KIB (-)	35.460.798.365,41
- Pengurangan KDP akibat Piutang uang muka	0,00
Jumlah Pengurangan	36.127.293.277,75
Saldo Akhir Tahun 2023	44.236.031.834,76

Penambahan Aset Tetap - KDP diperoleh dari Utang Pihak Ketiga dari KDP 2023 dan Perpindahan KIB.

5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
(Rp2.072.776.849.796,18) **(Rp 1.885.501.879.917,20)**

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Barru dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah. Akumulasi Penyusutan Kabupaten Barru per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.072.776.849.796,18. Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 sebesar Rp1.885.501.879.917,20 diperoleh dengan Metode Garis Lurus dimana untuk perolehan Aset Tetap dilakukan penyusutan perbulan. Adapun selisih Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp187.274.969.878,98, sedangkan yang menjadi Beban Penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp188.157.337.446,99 sehingga terdapat selisih sebesar Rp882.367.568,01 yang merupakan koreksi atas Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2023 ke 31 Desember 2023.

Terdapat Aset Tetap yang nilai bukunya sama dengan nol atau telah habis masa pakainya, namun masih dimanfaatkan, yang terdapat pada KIB Peralatan Mesin, Gedubg dan Bangunan dan Jalan Irigasi dan Jaringan. Adapun rincian Aset Tetap yang telah habis masa pakainya, namun masih dimanfaatkan masing-masing KIB dapat dilihat pada *Lampiran 20j, 20kj dan 20l*.

5.3.4 Dana Cadangan

Dana Cadangan	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp0,00	Rp0,00

Pada Tahun 2023 tidak ada pembentukan dana cadangan sehingga nilainya sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

5.3.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp150.820.617.176,21	Rp89.739.192.933,31

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Barru per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp150.820.617.176,21, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.123 Daftar Aset Lainnya per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Penambahan/ Pengurangan	Saldo 2023 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	801.965.268,00	0,00	801.965.268,00
2	Aset Tidak Berwujud	2.083.640.331,00	.0,00	2.083.640.331,00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(532.094.383,49)	(208.364.033,10)	(740.458.416,59)
4	Aset Lain-lain	146.823.189,758.10	2.734.647.803,70	149.557.837.561,80
5	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	2.182.825.792,00	(2.182.825.792,00)	0,00
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(61.620.333.832,29)	(62.502.701.400,29)	(882.367.568,00)
	Jumlah	89.739.192.933,31	(62.159.243.421,69)	150.820.617.176,21

5.3.5.1 Tagihan Jangka Panjang	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp801.965.268,00	Rp801.965.268,00

Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp801.965.268,00. Nilai Tagihan Jangka Panjang tahun ini sama dengan nilai Tagihan Jangka Panjang tahun sebelumnya karena tidak ada realisasi penerimaan di tahun ini, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.124 Daftar Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2023

No	Nama	Saldo 2022 (Rp)	Realisasi 2023	Saldo 2023 (Rp)
1	HS	2.402.313,00	0,00	2.402.313,00
2	Jmt	5.657.753,00	0,00	5.657.753,00
3	Jmt	434.677.925,00	0,00	434.677.925,00
4	AMH	274.631.975,00	0,00	274.631.975,00
5	AMH	84.595.302,00	0,00	84.595.302,00
	Jumlah	801.965.268,00	0,00	801.965.268,00

Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 22*.

5.3.5.2 Aset Tidak Berwujud	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp2.083.640.331,00	Rp2.083.640.331,00

Saldo Aset Tidak berwujud sebesar Rp2.083.640.331,00 terdiri dari Aplikasi SIMBANG di Bappeda sebesar Rp97.900.000,00, Rumah Sakit Umum Daerah berupa Aplikasi BLUD berupa Software Akuntansi BLUD sebesar Rp200.000.000,00, Instalasi Software SIA sebesar Rp89.500.000,00, Aplikasi SIM BLUD sebesar Rp98.720.000,00 dan



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

penambahan sebesar Rp5.000.000,00 yang merupakan Aplikasi SISMADAK. Tahun 2021 BLUD melakukan pengadaan Aplikasi baru bernama SAMBALU sebesar Rp199.000.000,00 dan pengadaan Aplikasi software bernama SIMRS sebesar Rp829.640.000,00.

Aplikasi SIMPEDA pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp40.262.700,00 dengan Aplikasi SIMKAREBA sebesar Rp50.000.000,00, Aplikasi Data Koperasi sebesar Rp153.418.631,00 pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, serta Aplikasi SISMIOP sebesar Rp93.500.000,00 dan Aplikasi Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Terintegrasi sebesar Rp176.869.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah. Aplikasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekertariat Daerah sebesar Rp49.830.000,00 pada tahun 2022.

Tabel 7.125 Daftar Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023

No.	SKPD	Nilai Perolehan	Keterangan
1	Bappeda	97.900.000,00	Aplikasi SIMBANG
2	RSUD	200.000.000,00	Software Akuntansi BLUD
		89.500.000,00	Instalasi Software SIA
		98.720.000,00	Aplikasi SIM BLUD
		5.000.000,00	Aplikasi Sismadak
		199.000.000,00	Aplikasi SAMBALU
		829.640.000,00	Aplikasi SIMRS
3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	40.262.700,00	Aplikasi SIMPEDA
		50.000.000,00	Aplikasi SIMKAREBA
4	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	153.418.631,00	Aplikasi Data Koperasi
5	Badan Pendapatan Daerah	93.500.000,00	Aplikasi SISMIOP
6	Daerah	176.869.000,00	Aplikasi SIPRT
7	Sekretariat Daerah	49.830.000,00	Aplikasi Layanan Barjas
	Jumlah	2.083.640.331,00	

5.3.5.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

	<u>Per 31 Desember 2023</u>	<u>Per 31 Desember 2022</u>
	(Rp740.458.416,59)	(Rp532.094.383,49)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp740.458.416,59. Sebelumnya belum dilakukan Amortisasi terhadap Aset Tak Berwujud dan pada tahun 2021 telah dilakukan Amortisasi Aset Tidak berwujud dengan metode garis lurus dengan perhitungan perbulan.

Tabel 7.126 Daftar Akm. Amort Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023

No.	SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
1	Bappeda	97.900.000,00	70.161.666,67	27.738.333,33
2	RSUD	200.000.000,00	153.333.333,33	46.666.666,67
		89.500.000,00	56.683.333,33	32.816.666,67
		98.720.000,00	57.586.666,67	41.133.333,33
		5.000.000,00	2.333.333,33	2.666.666,67
		199.000.000,00	56.383.333,33	142.616.666,67
		829.640.000,00	96.791.333,33	732.848.666,67
3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	40.262.700,00	25.164.187,50	15.098.512,50
		50.000.000,00	25.416.666,67	24.583.333,33



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

4	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	153.418.631,00	77.987.804,09	75.430.826,91
5	Badan Pendapatan Daerah	93.500.000,00	55.320.833,33	38.179.166,67
6	Daerah	176.869.000,00	57.482.425,00	119.386.575,00
7	Sekretariat Daerah	49.830.000,00	5.813.500,00	44.016.500,00
	Jumlah	2.083.640.331,00	740.458.416,59	1.343.181.914,41

5.3.5.4 Aset Lain-Lain **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp148.675.469.993,80 **Rp146,823,189,758.10**

Tabel 7.127 Daftar Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023

No.	SKPD	Aset Lain-Lain 2022	Penambahan	Pengurangan/ Penghapusan	Aset Lain-Lain 2023
1	Dinas Pendidikan	39.027.117.443,90	4.496.404.230,80	843.870.000,00	42.679.651.674,70
2	Dinas Kesehatan	23.058.325.849,40	1.834.795.818,00	-	24.893.121.667,40
3	Rumah Sakit Umum Daerah	15.617.906.183,00	-	-	15.617.906.183,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.279.251.845,50	263.611.000,00	-	12.542.862.845,50
5	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	99.850.000,00	-	-	99.850.000,00
6	Badan Kesbang, Politik & Perlindungan Masyarakat	19.120.000,00	-	19.100.000,00	20.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	465.161.000,00	-	7.000.000,00	458.161.000,00
8	Dinas Sosial	22.760.000,00	-	-	22.760.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.496.992.787,00	420.500.000,00	-	1.917.492.787,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	47.520.000,00	-	-	47.520.000,00
11	Dinas PMD, PPKB, & Pemberdayaan Perempuan	98.117.645,00	40.905.000,00	-	139.022.645,00
12	Dinas Perhubungan	8.102.502.191,00	-	-	8.102.502.191,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik	-	-	-	-
14	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	8.925.546.858,30	-	5.564.714.730,10	3.360.832.128,20
15	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan TK	430.742.675,00	-	215.722.800,00	215.019.875,00
16	Dinas Pariwisata pemuda dan Olahraga	1.059.066.501,00	-	-	1.059.066.501,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.950.000,00	-	-	1.950.000,00
18	Dinas Perikanan	1.180.542.950,00	164.994.000,00	-	1.345.536.950,00
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.532.283.770,00	819.553.894,00	-	7.351.837.664,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	SKPD	Aset Lain-Lain 2022	Penambahan	Pengurangan/ Penghapusan	Aset Lain-Lain 2023
20	Sekretariat Daerah	18.609.094.479,00	-	-	18.609.094.479,00
21	Sekretariat DPRD	1.961.775.850,00	-	-	1.961.775.850,00
22	Kecamatan Barru	1.428.380.907,00	131.716.750,00	-	1.560.097.657,00
23	Kecamatan Tanete Rilau	163.235.000,00	-	-	163.235.000,00
24	Kecamatan Tanete Riaja	644.037.220,00	-	-	644.037.220,00
25	Kecamatan Pujananting	578.377.000,00	-	-	578.377.000,00
26	Kecamatan Balusu	42.883.200,00	-	-	42.883.200,00
27	Kecamatan Soppeng Riaja	149.993.000,00	9.561.600,00	-	159.554.600,00
28	Kecamatan Mallusetasi	554.536.455,00	9.476.600,00	-	564.013.055,00
29	Inspektorat Daerah	36.766.980,00	-	-	36.766.980,00
30	Bappelitbangda	125.649.720,00	-	-	125.649.720,00
31	BKAD	175.425.200,00	46.178.250,00	-	221.603.450,00
32	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya	3.232.800,00	-	-	3.232.800,00
33	Badan Pendapatan Daerah	255.833.574,00	120.692.000,00	251.670.400,00	124.855.174,00
34	Dinas Tenaga Kerja	199.044.000,00	-	-	199.044.000,00
35	PPKD	3.430.166.674,00	1.278.336.591,00	-	4.708.503.265,00
Jumlah		146.823.189.758,10	9.636.725.733,80	6.902.077.930,10	149.557.837.561,80

**5.3.5.5 Akumulasi Penyusutan-
Aset Lainnya** Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
(Rp882.367.568,00) **(Rp61.620.333.832,29)**

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Kabupaten Barru per 31 Desember 2023 sebesar Rp882.367.568,00. Nilai akumulasi penyusutan ini diperoleh dari reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke aset lain-lain berupa kendaraan yang diusulkan untuk dijual yang telah memiliki persetujuan Bupati dan hasil penilaian KPKNL.

5.3.5.6 DBH Treasury Deposit Facility (TDF) Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp0,00 **Rp2.182.825.792,00**

Dana Bagi Hasil (DBH) Treasury Deposit Facility adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi pemerintah daerah untuk menyimpang uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Dana Bagi Hasil (DBH) Treasury Deposit Facility tahun 2023 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Rp0,00 karena dana yang tersimpan di tahun 2022 sebesar Rp2.182.825.792,00 telah disalurkan ke Pemerintah Daerah.

5.3.6 Kewajiban

5.3.6.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun.

Tabel 7.128 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.883.320,00	13.393.900,00
2	Utang Bunga	149.671.098,29	154.340.508,73
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	3.053.031.265,13	3.053.031.264,52
4	Pendapatan diterima dimuka	183.283.783,14	1.204.532.013,66
5	Utang Beban	19.176.348.648,00	19.815.286.852,00
6	Utang Kepada Pihak Ketiga	15.255.683.893,86	11.082.785.808,97
	Jumlah	37.823.902.008,43	35.323.370.347,88

5.3.6.1.1 Utang

Perhitungan	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Fihak Ketiga	Rp5.883.320,00	Rp13.393.900,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Barru atas pemotongan pajak pada pihak ketiga yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran namun sampai dengan berakhirnya tahun anggaran belum disetorkan ke Kas Negara. Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.883.320,00 merupakan pajak yang belum disetor ke Kas Negara pada Puskesmas Ralla berupa Iuran Wajib Pegawai sebesar Rp1.941.162,00 dan Pajak Penghasilan sebesar Rp3.942.158,00.

5.3.6.1.2 Utang Bunga	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp149.671.098,29	Rp154.340.508,73

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2023 sebesar Rp149.671.098,29 merupakan kewajiban bunga Pemerintah Kabupaten Barru atas Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat sesuai perjanjian SLA-1224/DSMI/2009 tanggal 7 September 2009. Angka tersebut merupakan nilai utang bunga untuk bulan November dan Desember tahun 2023 yang masih harus dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru. Utang bunga tahun 2022 sebesar Rp154.340.508,73 telah dibayar pada tahun 2023 sebesar Rp2.088.449.782,00. Pembayaran dilakukan sesuai tagihan Pemerintah berdasarkan tingkat bunga saat penagihan.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

5.3.6.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Utang Jangka Panjang **Rp3.053.031.265,13** **Rp3.053.031.264,52**

Saldo Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.053.031.265,13 merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Barru atas pokok utang jangka panjang kepada Pemerintah Pusat sesuai perjanjian SLA-1224/DSMI/2009 tanggal 7 September 2009 yang akan jatuh tempo pada 20 Mei 2024 sebesar Rp1.526.515.632,13 (bunga terutang periode 21 November 2023 s.d. 20 Mei 2024) dan 20 November 2024 sebesar Rp1.526.515.632,13 (bunga terutang periode 21 Mei 2024 s.d. 20 November 2024). Atas saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pemerintah Pusat 31 Desember 2022 sebesar Rp3.053.031.264,52 telah dilakukan pembayaran pada TA 2023.

5.3.6.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Diterima Dimuka **Rp183.283.783,14** **Rp1.204.532.013,66**

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp183.283.783,14 merupakan Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame Periode 2022 s.d 2023 sebesar Rp75.543.729,16, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Sewa Ruko sebesar Rp94.823.387,98 dan Sewa Lahan ATM BRI dan BPD pada RSUD La Patarai sebesar Rp12.916.666. Pendapatan diterima dimuka dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 7.129 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

No.	Uraian	2023	2022
1	Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah	75.543.729,16	37.359.554,64
2	Pendapatan Diterima Dimuka-Retribusi Daerah	94.823.387,98	1.167.172.459,02
3	Pendapatan Diterima Dimuka-BLUD RSUD	12.916.666,00	0,00
	Jumlah	183.283.783,14	1.204.532.013,66

Tabel 7.130 Daftar Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023

No.	Bulan	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron			Pajak Reklame Kain		
		Pend. Diterima Dimuka	Pajak Murni 2023	Realisasi 2023	Pend. Diterima Dimuka	Pajak Murni 2023	Realisasi 2023
1	Januari	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00
2	Februari	37.295,08	44.755.704,92	44.793.000,00	0,00	4.506.750,00	4.506.750,00
3	Maret	464.745,57	8.078.294,43	8.543.040,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00
4	April	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00
5	Mei	38.827.254,10	73.147.745,90	111.975.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
6	Juni	4.375.409,84	5.824.590,16	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Juli	944.262,30	855.737,70	1.800.000,00	0,00	76.694.000,00	76.694.000,00
8	Agustus	9.276.655,74	6.048.844,26	15.325.500,00	0,00	0,00	0,00
9	September	455.532,79	219.467,21	675.000,00	0,00	20.257.000,00	20.257.000,00
10	Oktober	6.578.000,00	2.326.000,00	8.904.000,00	0,00	46.500.500,00	46.500.500,00
11	November	2.138.934,43	411.065,57	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Desember	3.481.967,21	118.032,79	3.600.000,00	8.963.672,12	181.968.327,88	190.932.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Bulan	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron			Pajak Reklame Kain		
		Pend. Diterima Dimuka	Pajak Murni 2023	Realisasi 2023	Pend. Diterima Dimuka	Pajak Murni 2023	Realisasi 2023
	Jumlah	66.580.057,04	141.785.482,95	208.365.540,00	8.963.672,12	370.906.577,88	379.870.250,00

Rincian pada *Lampiran 23 dan 24.*

5.3.6.1.5 Utang Beban Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp19.176.348.648,00 Rp19.815.286.852,00

Untuk tahun 2022 yang menjadi Utang beban Listrik, Telepon dan Air sebesar Rp837.335.608,00 terdiri dari beban listrik sebesar Rp740.744.767,00, beban telepon sebesar Rp17.830.716,00 dan beban air sebesar Rp78.760.125,00, telah dibayarkan ditahun 2023. Untuk tahun 2023, yang menjadi Utang beban listrik, telepon dan air sebesar Rp772.092.124,00 terdiri dari beban listrik sebesar Rp707.039.101,00, beban telepon sebesar Rp32.349.973,00 dan beban air sebesar Rp32.703.050,00. Utang beban Listrik, Telepon dan Air diatas dibebankan kepada 33 SKPD termasuk RSUD.

Untuk utang obat pada RSUD tahun 2022 sebesar Rp7.745.907.023,00 telah diselesaikan ditahun 2023. Utang obat tahun 2023 sebesar Rp9.719.366.622,00.

Untuk utang Jasa Pelayanan tahun 2020 masih tersisa sebesar Rp18.345.766. Untuk utang Jasa Pelayanan tahun 2021 sebesar Rp2.142.432,00. Untuk utang Jasa Pelayanan tahun 2022 sebesar Rp11.040.311,00 dan untuk utang Jasa Pelayanan tahun 2023 sebesar Rp5.892.784.519,00 sehingga jumlah utang Jasa Pelayanan sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp5.924.313.029,00.

Saldo Utang Beban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp19.176.348.648,00 yang terdiri dari:

Tabel 7.131 Daftar Utang Beban per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Jumlah
1	Utang Beban Listrik	707.039.101,00
2	Utang Beban Telepon	32.349.973,00
3	Utang Beban Air	32.703.050,00
4	Utang Obat/BHP RSUD	9.719.366.622,00
5	Utang Jasa Pelayanan RSUD	5.924.313.029,00
6	Utang Lainnya	2.760.576.873,00
	Jumlah	19.176.348.648,00

Utang beban listrik, air dan telepon diatas sudah termasuk utang beban pada RSUD. Adapun rincian Utang Obat/BHP RSUD sebesar Rp9.719.366.622,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.132 Daftar Utang Obat/Barang Habis pakai RSUD Tahun 2023

No.	Nama Rekanan	Jumlah
1	Apotek Maupe	1.830.355,00
2	Apotik Arhamni Lestari	15.060.000,00
3	CV. Avenus Karya Mandiri	72.488.550,00
4	CV. Chairul Pratama	52.391.400,00
5	CV. Fadlan Arhamni Lestari	291.871.393,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Nama Rekanan	Jumlah
6	PT. Abadi Makmur Bersama	229.551.991,00
7	PT. Adya Artha Abadi	169.222.386,00
8	PT. Alprido Alkesindo	477.539.536,00
9	PT. Antar Mitra Sembada	35.622.231,00
10	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	55.885.260,00
11	PT. Anugrah Argon Medika	349.891.266,00
12	PT. Ardia Perdana Indonesia	24.291.000,00
13	PT. Arteri Rahmah Medika	31.751.550,00
14	PT. Bintang Shafwan	203.898.757,00
15	PT. Bina San Prima	146.899.356,00
16	PT. Daya Muda Agung	2.131.200,00
17	PT. Diatri Sejahtera Abadi	333.119.729,00
18	PT. Duta Afiat	73.104.581,00
19	PT. Enseval Putera Megatrading	273.672.646,00
20	PT. Fatih Abadi Medicalido	66.611.100,00
21	PT. Galoeh Husada Farma	30.386.250,00
22	PT. Haura Abadi Jaya	223.982.748,00
23	PT. Ichiba Medical,Indonesia	239.736.352,00
24	PT. Kebayoran Pharma	80.431.847,00
25	PT. Kimia Farma	317.157.835,00
26	PT. Kristalab Surya Medika	253.080.000,00
27	PT. Mawar Pharmasindo	147.300.915,00
28	PT. Medihop	12.982.200,00
29	PT. Mensa Bina Sukses	28.639.100,00
30	PT. Merapi Utama Pharma	371.201.506,00
31	PT. Mitra Mecca Abadi	50.582.700,00
32	PT. Multi Gas Medika	139.454.508,00
33	PT. Millenium Pharmacon International	819.624.822,00
34	PT. Multi Indo Medika	1,00
35	PT. Mitra Asahi Pratama	703.441.935,00
36	PT. Penta Valent	307.542.124,00
37	PT. Palagimata Medika Alta	986.314.396,00
38	PT. Pancaraya Krisna Mandiri	284.446.935,00
39	PT. Parit Padang Global	107.283.202,00
40	PT. Rajawali Nusindo	50.373.665,00
41	PT. Rayhan Alkesindo Makassar	100.801.742,00
42	PT. Samator Indo Gas	19.590.400,00
43	PT. Sanzaya Medika Pratama	22.509.968,00
44	PT. Sapta Sari Tama	24.074.597,00
45	PT. Sentrum Dental	6.472.300,00
46	PT. Shakira Cipta Karya	68.265.000,00
47	PT. Sinergi Berkat Agsindo	889.260.855,00
48	PT. Sinergi Utama Sejahtera	15.222.655,00
49	PT. Tamara Overseas Corporation	9.157.500,00
50	PT. Tivan Berkat Mulia	263.000.792,00
51	PT. Tri Sapta Jaya	181.357.689,00
52	PT. United Dicocitas	57.314.428,00
53	PT. Wego Medika Indonesia	1.541.368,00
	Jumlah	9.719.366.622,00

Adapun rincian Utang Jasa Pelayanan RSUD sebesar Rp5.924.313.029,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.133 Daftar Utang Jasa Pelayanan RSUD Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah Pendapatan	Sarana dan Prasarana (56%)	Utang Jasa Pelayanan (44%)
1	Klaim Asuransi Jiwa Inhealth 2020	35.470.953,00	19.863.734,00	15.607.219,00
2	BPJS Ketenagakerjaan 2020	6.223.970,00	3.485.423,00	2.738.547,00
3	Klaim Asuransi Jiwa Inhealth 2021	4.611.163,00	2.582.251,00	2.028.912,00
4	PT. PP BK KSO 2021	258.000,00	144.480,00	113.520,00
5	Klaim Asuransi Jiwa Inhealth 2022	15.910.017,00	8.909.610,00	7.000.407,00
6	PT. PP BK KSO 2022	9.181.600,00	5.141.696,00	4.039.904,00
7	Klaim Pasien Umum 2023	834.111.075,00	467.102.202,00	367.008.873,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Jumlah Pendapatan	Sarana dan Prasarana (56%)	Utang Jasa Pelayanan (44%)
8	Klaim Asuransi Jasa Raharja bulan September s.d Desember 2023	232.496.000,00	130.197.760,00	102.298.240,00
9	Klaim Asuransi Jiwa Inhealth 2023	6.458.021,00	3.616.492,00	2.841.529,00
10	Klaim CRI Kereta api bulan Mei 2023	588.000,00	329.280,00	258.720,00
11	Klaim P2MPL Dinkes Provinsi bulan Agustus 2023	4.473.600,00	2.505.216,00	1.968.384,00
12	Klaim BPJS bulan Oktober s.d Desember 2023	11.243.439.200,00	6.260.008.552,00	4.918.578.148,00
13	Klaim Rawat Inap 2023 (pending)	1.020.262.793,00	571.347.164,00	448.915.629,00
14	Klaim Rawat Jalan 2023 (pending)	115.715.900,00	64.800.904,00	50.914.996,00
	Jumlah	13.529.200.292,00	7.540.034.764,00	5.924.313.028,00

Adapun rincian Utang Lainnya sebesar Rp2.760.576.873,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.134 Daftar Utang Lainnya Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah
1	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	73.959.200,00
2	Alat Listrik dan Elektronik	31.320.000,00
3	Makanan dan Minuman Fasilitas Pelayanan Kesehatan	765.957.300,00
4	Jasa Tenaga Laboratorium	23.012.000,00
5	Jasa Tenaga Kebersihan	64.820.000,00
6	Jasa Pengelolaan Sampah	263.609.682,00
7	Sewa Alat Kedokteran Mata	38.850.000,00
8	Jasa Pemeliharaan	221.222.500,00
9	Belanja Modal	523.526.191,00
10	Beasiswa yang belum disalurkan (Disparpora)	754.300.000,00
	Jumlah	2.760.576.873,00

Rincian Utang beban dapat dilihat pada *Lampiran 25*.

5.3.6.1.6 Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp15.255.683.893,86 **Rp11.082.785.808,97**

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.255.683.893,86 merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Barru kepada pihak ketiga/rekanan. Di dalamnya termasuk utang pihak ketiga atas kegiatan Belanja Modal yang kemajuan fisik pekerjaannya melebihi realisasi pembayaran/keuangan serta utang retensi.

Tabel 7.135 Daftar Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga

No.	SKPD	Nilai DPAL TA. 2023	Nilai Utang kepada Pihak Ketiga TA. 2023
1	Dinas Pendidikan	1.908.561.161,00	1.728.736.162,26
2	Dinas Kesehatan	1.984.745.620,00	323.216.465,80
3	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	18.331.663.932,34	12.114.490.893,47
4	Satpol PP & Pemadam Kebakaran	3.818.800,00	3.818.800,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	14.222.500,00	14.222.500,00
6	Dinas PMD, PPKB & P3A	5.300.000,00	5.300.000,00
7	Dinas Perhubungan	149.047.099,60	149.047.099,60
8	Dinas Koperasi UKM & Perdagangan	41.589.520,00	5.208.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	SKPD	Nilai DPAL TA. 2023	Nilai Utang kepada Pihak Ketiga TA. 2023
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	720.525.000,00	0,00
10	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	144.308.822,00	136.579.442,00
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	553.540.786,00	536.379.248,00
12	Sekretariat Daerah	81.531.460,00	81.531.460,00
13	Sekretariat DPRD	77.104.262,47	34.688.672,81
14	Kecamatan Baru	10.740.900,00	10.740.900,00
15	Kecamatan Soppeng Riaja	9.850.000,00	9.850.000,00
16	Badan Pendapatan Daerah	179.609.898,80	64.283.360,93
17	RSUD	37.590.889,00	37.590.889,00
	Jumlah	24.253.750.651,21	15.255.683.893,86

Tabel diatas menunjukkan Nilai DPAL sebesar Rp24.253.750.651,21 merupakan akumulasi DPAL sampai dengan tahun 2023 sedangkan nilai Utang kepada Pihak Ketiga merupakan Nilai Kontrak (DPAL) dikalikan dengan Kemajuan Fisik dikurangi Realisasi Keuangan/pembayaran. Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 26*.

5.3.6.2 Kewajiban Jangka Panjang

5.3.6.2.1 Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp12.212.125.056,53	Rp15.265.156.321,66

Saldo Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.212.125.056,53 merupakan nilai Utang Jangka Panjang berdasarkan Perjanjian SLA-1224/DSMI/2009 tanggal 7 September 2009. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp15.265.156.321,66, turun sebesar Rp3.053.031.265,13 karena menggunakan metode bunga menurun. Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 27*.

5.3.7 Ekuitas

Ekuitas	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp2.225.404.932.203,44	Rp2.242.358.873.838,91

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.225.404.932.203,44 merupakan hasil dari Ekuitas Awal ditambah Surplus/Defisit LO sebesar (Rp54.415.556.894,32) dan ditambah dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.



5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan tahun berjalan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban-LO, dan surplus/defisit operasional yang disandingkan dengan periode sebelumnya.

5.4.1 Kegiatan Operasional

5.4.1.1 Pendapatan –LO	TA 2022	TA 2022
	Rp861.204.729.397,12	Rp861.227.721.165,74

Pendapatan Daerah – LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Barru yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah, baik yang bersumber dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Realisasi pendapatan di Tahun Anggaran 2023 terdapat realisasi pendapatan-LRA yang tidak menjadi pendapatan-LO. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 7.136 Realisasi Pendapatan - LO

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	112.168.094.798,27	95.732.618.132,04
2	Pendapatan Transfer-LO	733.327.170.432,00	725.147.185.423,70
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	15.709.464.166,85	40.347.917.610,00
	Jumlah	861.204.729.397,12	861.227.721.165,74

5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah –LO	TA 2023	TA 2022
	Rp112.168.094.798,27	Rp95.732.618.132,04

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional Periode Tahun Anggaran 2023. Pendapatan Asli Daerah-LO pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp112.168.094.798,27 meningkat sebesar Rp16.435.476.666,23 dibandingkan dengan tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp95.732.618.132,04, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.137 Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Daerah	26.314.986.714,49	24.968.988.952,22
2	Retribusi Daerah	5.947.040.730,04	6.768.126.198,96
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.922.742.013,00	10.027.692.032,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah	69.983.325.340,74	53.967.810.948,86
	Jumlah	112.168.094.798,27	95.732.618.132,04

Adapun realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

5.4.1.1.1.1 Pendapatan	TA 2023	TA 2022
Pajak Daerah – LO	Rp26.314.986.714,49	Rp24.968.988.952,22

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Barru. Pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2023, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2023 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKP-DKB) yang ditetapkan tahun 2023.

Tabel 7.138 Daftar Pendapatan Pajak Daerah –LO

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	Pajak Hotel – LO	66.787.000,00	69.060.500,00
2	Pajak Restoran – LO	1.437.984.564,00	1.167.149.825,30
3	Pajak Hiburan – LO	6.823.300,00	2.391.375,00
4	Pajak Reklame – LO	550.051.615,48	446.134.375,68
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	9.198.143.190,00	8.174.371.524,00
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C – LO	5.717.682.808,01	5.948.366.218,24
7	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan – LO	3.004.712.622,00	3.169.741.327,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan-P2 – LO	6.239.560.674,00	5.918.295.769,00
9	Pajak Parkir – LO	3.750.000,00	2.000.000,00
10	Pajak Air Tanah – LO	59.872.141,00	27.448.038,00
11	Pajak Sarang Burung Walet – LO	29.618.800,00	44.030.000,00
Jumlah		26.314.986.714,49	24.968.988.952,22

Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2023 terealisasi sebesar Rp26.314.986.714,49 meningkat sebesar Rp1.345.997.762,27 dibandingkan tahun lalu sebesar Rp24.968.988.952,22. Uraian perhitungan pendapatan Pajak Daerah – LO tahun 2023 (selain Pajak Reklame), sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.139 Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah –LO

No.	Uraian	Bagian dari Pelunasan Piutang (Rp)	Ketetapan 2023		Jumlah (Rp)
			Lunas (Rp)	Piutang (Rp)	
1	Pajak Hotel – LO	0,00	66.787.000,00	0,00	66.787.000,00
2	Pajak Restoran – LO	0,00	1.437.984.564,00	0,00	1.437.984.564,00
3	Pajak Hiburan – LO	0,00	6.823.300,00	0,00	6.823.300,00
4	Pajak Penerangan Jalan – LO	0,00	9.198.143.190,00	0,00	9.198.143.190,00
5	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C – LO	0,00	5.717.682.808,01	0,00	5.717.682.808,01
6	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan – LO	0,00	3.004.712.622,00	0,00	3.004.712.622,00
7	Pajak Bumi dan Bangunan-P2 – LO	0,00	5.222.999.967,00	1.016.560.707,00	6.239.560.674,00
8	Pajak Parkir – LO	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
9	Pajak Air Tanah – LO	0,00	52.480.883,00	7.391.258,00	59.872.141,00
10	Pajak Sarang Burung	0,00	29.618.800,00	0,00	29.618.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Bagian dari Pelunasan Piutang (Rp)	Ketetapan 2023		Jumlah (Rp)
			Lunas (Rp)	Piutang (Rp)	
	Walet – LO				
	Jumlah	0,00	24.740.983.134,01	1.023.951.965,00	25.764.935.099,01

Sedangkan Pajak Reklame – LO tahun 2023 senilai Rp550.051.615,48 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Reklame – LRA tahun 2023 Rp588.235.790,00
Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2023 (Rp75.543.729,16)
Rp512.692.060,84

Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2022 Rp 37.359.554,64
Pendapatan Pajak Reklame – LO tahun 2023 Rp550.051.615,48

Terhadap sebelas jenis pajak tersebut, pengakuan Pendapatan – LO berdasarkan ketetapan hanya pada pajak PBB-P2 dan Pajak Air Tanah.

Tabel 7.140 Pendapatan Pajak Daerah-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	LRA	Mutasi Penambah	Mutasi Pengurang	LO
1	Pajak Hotel – LO	66.787.000,00	0,00	0,00	66.787.000,00
2	Pajak Restoran – LO	1.430.063.024,00	7.921.540,00	0,00	1.437.984.564,00
3	Pajak Hiburan – LO	6.823.300,00	0,00	0,00	6.823.300,00
4	Pajak Reklame – LO	588.235.790,00	37.359.554,64	75.543.729,16	550.051.615,48
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	9.198.143.190,00	0,00	0,00	9.198.143.190,00
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C – LO	5.717.682.808,01	0,00	0,00	5.717.682.808,01
7	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan – LO	3.004.712.622,00	0,00	0,00	3.004.712.622,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan-P2 – LO	5.683.876.264,00	1.016.560.707,00	460.876.297,00	6.239.560.674,00
9	Pajak Parkir – LO	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
10	Pajak Air Tanah – LO	56.229.932,00	7.391.258,00	3.749.049,00	59.872.141,00
11	Pajak Sarang Burung Walet – LO	29.618.800,00	0,00	0,00	29.618.800,00
	Jumlah	25.785.922.730,01	1.069.233.059,64	540.169.075,16	26.314.986.714,49

Terdapat selisih antara Pajak Restoran-LO dengan Pajak Restoran-LRA yang merupakan selisih penambah-LO sebesar Rp7.921.540,00 merupakan Pajak Restoran yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar pada SMPN 5 Barru.

Terdapat selisih antara Pajak Reklame-LO dengan Pajak Reklame-LRA. Selisih penambah-LO sebesar Rp37.359.554,64 merupakan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 yang baru diakui ditahun 2023 sedangkan selisih pengurang-LO sebesar Rp75.543.729,16 merupakan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 yang belum diakui sebagai Pendapatan LO tahun berjalan.

Terdapat selisih antara Pajak PBB-LO dengan Pajak PBB-LRA. Selisih penambah-LO sebesar Rp1.016.560.707,00 merupakan piutang berdasarkan SKP-D yang terbit yang seharusnya di terima pada TA 2023, sedangkan selisih pengurang-LO sebesar Rp460.876.297,00 yang



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

merupakan penerimaan piutang tahun sebelumnya yang diterima di TA 2023.

Terdapat selisih antara Pajak Air Tanah-LO dengan Pajak Air Tanah-LRA yaitu selisih penambah-LO sebesar Rp7.391.258,00 merupakan piutang berdasarkan SKP-D yang terbit yang seharusnya di terima pada TA 2023 sedangkan selisih pengurang-LO sebesar Rp3.749.049,00 yang merupakan penerimaan piutang tahun sebelumnya yang diterima di TA 2023.

5.4.1.1.1.2 Pendapatan	TA 2023	TA 2022
Retribusi Daerah –LO	Rp5.947.040.730,04	Rp6.768.126.198,96

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 12 (dua belas) SKPD. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Barru. Sama halnya dengan Pendapatan pajak daerah, Pendapatan Retribusi Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2023, sehingga nilai pendapatan retribusi daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2023 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) maupun Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKR-DKB) yang ditetapkan tahun 2023.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2023 terealisasi sebesar Rp.5.947.040.730,04 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.141 Pendapatan Retribusi Daerah –LO

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
A	Retribusi Jasa Umum		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	2.474.860.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	126.577.000,00	105.691.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	1.895.388.600,00	1.696.397.250,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00
5	Retribusi Penyediaan/ Penyedotan Kakus	11.520.000,00	11.425.000,00
6	Retribusi Pemanfaatan Menara Telekomunikasi	194.793.770,00	193.540.170,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Ters Ulang	14.605.000,00	13.411.000,00
B	Retribusi Jasa Usaha		
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.237.629.071,04	472.579.240,96
2	Retribusi Penyediaan Fasilitas/Pertokoan yang di kontrakkan	175.691.000,00	293.150.000,00
3	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	0,00	0,00
4	Retribusi Terminal	78.628.000,00	84.230.250,00
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir Untuk Kendaraan Penumpang dan	449.615.000	637.450.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	Bis Umum		
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	201.227.808,00	203.143.788,00
7	Retribusi Tempat Pariwisata dan Parkir	35632000,00	77.636.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	38.000.000,00	30.000.000,00
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	121.805.000,00	96.482.000,00
C	Retribusi Perizinan Tertentu		
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	365.928481,00	378.130.000,00
	Jumlah	5.947.040.730,04	6.768.126.198,96

Perhitungan pendapatan Retribusi Daerah – LO tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.142 Perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah –LO

No.	Uraian	Bagian dari Pelunasan Piutang (Rp)	Ketetapan 2023		Jumlah (Rp)
			Lunas (Rp)	Piutang (Rp)	
A	Retribusi Jasa Umum				
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	0,00	126.577.000,00	0,00	126.577.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	484.711.350,00	389.457.700,00	1.505.930.900,00	1.895.388.600,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Retribusi Penyediaan/ Penyedotan Kakus	0,00	11.520.000,00	0,00	11.520.000,00
6	Retribusi Pemanfaatan Menara Telekomunikasi	10.549.044,00	185.940.220,00	8.853.550,00	194.793.770,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Ters Ulang	0,00	14.605.000,00	0,00	14.605.000,00
B	Retribusi Jasa Usaha				
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	2.237.629.071,04	0,00	2.237.629.071,04
2	Retribusi Penyediaan Fasilitas/Pertokoan yang di kontrakkan	0,00	175.691.000,00	0,00	175.691.000,00
3	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Retribusi Terminal	0,00	78.628.000,00	0,00	78.628.000,00
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir Untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	0,00	449.615.000	0,00	449.615.000
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	201.227.808,00	0,00	201.227.808,00
7	Retribusi Tempat Pariwisata dan Parkir	0,00	35632000,00	0,00	35632000,00
8	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	0,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	121.805.000,00	0,00	121.805.000,00
C	Retribusi Perizinan Tertentu				
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	365.928481,00	0,00	365.928481,00
	Jumlah	495.260.394,00	4.432.256.280,04	1.514.784.450,00	5.947.040.730,04

Pengakuan atas Pendapatan Retribusi – LO terbagi menjadi dua yaitu pengakuan berdasarkan ketetapan dan pengakuan pada saat kas diterima atau direalisasikan.

SKPD yang mengelola Retribusi Daerah sebagaimana tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Tabel 7.143 SKPD Pengelola Pendapatan Retribusi Daerah –LO

No.	Uraian	SKPD Pengelola
A	Retribusi Jasa Umum	
1	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup
2	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
4	Retribusi Penyediaan/ Penyedotan Kakus	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5	Retribusi Pemanfaatan Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
6	Retribusi Pelayanan Tera/Ters Ulang	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
B	Retribusi Jasa Usaha	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Badan Pendapatan Daerah Sekretariat Daerah
2	Retribusi Penyediaan Fasilitas/Pertokoan yang di kontrakkan	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
3	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	Badan Pendapatan Daerah
4	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir Untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Dinas Perhubungan
7	Retribusi Tempat Pariwisata dan Parkir	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
8	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dinas Pertanian
C	Retribusi Perizinan Tertentu	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Penanaman Modal

Tabel 7.144 Retribusi Jasa Umum

(dalam rupiah)

No.	Uraian	LRA	Mutasi Penambah	Mutasi Pengurang	LO
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	126.577.000,00	0,00	0,00	126.577.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	874.169.050,00	1.505.930.900,00	484.711.350,00	1.895.388.600,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Retribusi Penyediaan/ Penyedotan Kakus	11.520.000,00	0,00	0,00	11.520.000,00
6	Retribusi Pemanfaatan Menara Telekomunikasi	196.489.264,00	8.853.550,00	10.549.044,00	194.793.770,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Ters Ulang	14.605.000,00	0,00	0,00	14.605.000,00
	Jumlah	1.223.360.314,00	1.514.784.450,00	495.260.394,00	2.242.884.370,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Terdapat selisih antara Retribusi Pelayanan Pasar-LO dengan Retribusi Pelayanan Pasar-LRA. Selisih tersebut terdiri dari selisih penambah-LO sebesar Rp1.505.930.900,00 yang merupakan Piutang yang berasal dari SKR-D yang terbit TA. 2023 dan tidak terbayarkan ditahun 2023. Selisih pengurang-LO sebesar Rp484.711.350,00 yang diperoleh dari jumlah piutang tahun sebelumnya yang diterima di tahun 2023.

Terdapat selisih antara Retribusi Pemanfaatan Menara Telekomunikasi-LO dengan Retribusi Pemanfaatan Menara Telekomunikasi-LRA yaitu selisih penambah-LO sebesar Rp8.853.550,00 merupakan SKR-D terbit yang belum terealisasi sampai dengan 31 Desember 2023. Selisih pengurang-LO sebesar Rp10.549.044,00 yang diperoleh dari jumlah piutang tahun sebelumnya yang diterima di tahun 2023.

Tabel 7.145 Retribusi Jasa Usaha

(dalam rupiah)

No.	Uraian	LRA	Mutasi Penambah	Mutasi Pengurang	LO
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.154.700.000,00	1.182.552.459,02	99.623.387,98	2.237.629.071,04
2	Retribusi Penyediaan Fasilitas/Pertokoan yang di kontrakkan	175.691.000,00	0,00	0,00	175.691.000,00
3	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Retribusi Terminal	78.628.000,00	0,00	0,00	78.628.000,00
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir Untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	442.934.000,00	0,00	0,00	442.934.000,00
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	201.227.808,00	0,00	0,00	201.227.808,00
7	Retribusi Tempat Pariwisata dan Parkir	42.313.000,00	0,00	0,00	42.313.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	121.805.000,00	0,00	0,00	121.805.000,00
	Jumlah	2.255.298.808,00	1.182.552.459,02	99.623.387,98	3.338.227.879,04

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdiri dari Retribusi Sewa Rumah Dinas, Retribusi Sewa Ruko dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah lainnya seperti Sewa Kantor Mess PEMDA, Sewa Ruang Islamic Center dan Sewa Kendaraan Bermotor PU. Terdapat selisih antara Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO dengan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA, yaitu selisih penambah-LO sebesar Rp1.182.552.459,02 yang terdiri dari selisih penambah dari Retribusi Sewa Rumah Dinas sebesar Rp15.380.000,00 dan Retribusi Sewa Ruko sebesar Rp1.167.172.459,02 sedangkan Selisih pengurang-LO sebesar Rp99.623.387,98 terdiri dari Retribusi Sewa Rumah Dinas sebesar Rp4.800.000,00 dan Retribusi Sewa Ruko sebesar Rp94.823.387,98.

1) Terdapat selisih antara Retribusi Sewa Rumah Dinas-LO dengan Retribusi Sewa Rumah Dinas-LRA. Selisih penambah-LO sebesar Rp15.380.000,00 merupakan piutang SKRD yang terbit di tahun 2023 namun tidak terbayarkan sedangkan selisih pengurang-LO sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Rp4.800.000,00 merupakan realisasi piutang tahun sebelumnya yang terbayarkan di tahun 2023.

- 2) Terdapat selisih antara Retribusi Sewa Ruko-LO dengan Retribusi Sewa Ruko-LRA. Selisih penambah-LO sebesar Rp1.167.172.459,02 merupakan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun sebelumnya yang baru diakui di tahun 2023, sedangkan selisih pengurang-LO sebesar Rp94.823.387,98 merupakan Pendapatan Diterima Dimuka tahun berjalan yang akan diakui di tahun 2024.

Tabel 7.146 Retribusi Perizinan Tertentu

(dalam rupiah)

No.	Uraian	LRA	Mutasi Penambah	Mutasi Pengurang	LO
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	365.928.481,00	0,00	0,00	365.928.481,00
	Jumlah	365.928.481,00	0,00	0,00	365.928.481,00

Retribusi Perizinan Tertentu-LO diakui sebagai pendapatan berdasarkan realisasi pendapatan yang diterima di tahun berjalan. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu-LRA sama dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu-LO karena murni pendapatan tahun berjalan yaitu sebesar Rp365.928.481,00.

5.4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	TA 2023	TA 2022
	Rp9.922.742.013,00	Rp10.027.692.032,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO di Tahun 2023 adalah sama sebesar Rp9.922.742.013,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO di Tahun 2023 sebesar Rp9.922.742.013,00 merupakan pendapatan yang diterima dari Dividen Saham dari BPD Sulselbar yang diakui berdasarkan Surat Ketetapan Direksi BPD Sulselbar melalui Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Pembangunan Daerah (BPD Sulselbar) Nomor SR/100/R/DKA/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023.

5.4.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO	TA 2023	TA 2022
	Rp69.983.325.340,74	Rp53.967.810.948,86

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

yang dipisahkan. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2023 terealisasi sebesar Rp69.983.325.340,74. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari:

Tabel 7.147 Daftar Lain-Lain PAD yang Sah – LO

(dalam rupiah)

No	Jenis Penerimaan	LRA	Mutasi Penambah	Mutasi Pengurang	LO
1	Penerimaan Jasa Giro	2.281.633.423,00	0,00	0,00	2.281.633.423,00
2	Pendapatan Bunga Deposito	3.554.310.457,93	0,00	529.401,00	3.553.781.056,93
3	Penerimaan Lain-lain	2.552.475.376,81	0,00	1.000.000,00	2.551.475.376,81
4	Pendapatan BLUD RSUD	44.843.650.326,00	3.407.406.020,00	2.640.785.766,00	45.610.270.580,00
5	Pendapatan BLUD Puskesmas	15.884.583.654,00	298.672.250,00	197.091.000,00	15.986.164.904,00
	Jumlah	69.116.653.237,74	3.706.078.270,00	2.839.406.167,00	69.983.325.340,74

Terdapat selisih antara Pendapatan Bunga-LO dengan Pendapatan Bunga-LRA. Selisih tersebut merupakan selisih pengurang-LO sebesar Rp529.401,00 penerimaan piutang remunerasi TDF tahun 2022.

Realisasi Penerimaan Lain-Lain-LRA sebesar Rp2.552.475.376,81 sedangkan realisasi Penerimaan Lain-Lain-LO sebesar Rp2.551.475.376,81. Terdapat selisih pengurang-LO yang merupakan realisasi piutang tahun sebelumnya yaitu realisasi piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp1.000.000,00.

Pendapatan BLUD RSUD-LRA sebesar Rp44.843.650.326,00, sedangkan Pendapatan BLUD RSUD-LO sebesar Rp45.610.270.580,00. Terdapat selisih penambah dan pengurang Pendapatan-LO. Penambah-LO sebesar Rp3.407.406.020,00 terdiri dari Klaim BPJS Bulan Desember 2023 sebesar Rp3.394.799.720,00, Piutang Pasien Umum Rp2.361.300,00, Piutang Sewa Lahan Rp10.200.000,00 dan Piutang Lainnya sebesar Rp45.000,00 yang belum terbayarkan sedangkan Pengurang-LO sebesar Rp2.640.785.766,00 terdiri dari piutang BPJS atas Klaim bulan Desember 2022 sebesar 2.586.448.600,00, piutang sewa lahan sebesar Rp3.300.000,00 dan piutang lainnya sebesar Rp38.120.500,00 yang telah terbayarkan di tahun 2023 serta yang menjadi pengurang-LO juga sebesar Rp12.916.666,00 yang merupakan pendapatan diterima dimuka sewa lahan ATM BRI dan BPD.

Pendapatan BLUD Puskesmas-LRA sebesar Rp15.884.583.654,00, sedangkan Pendapatan BLUD Puskesmas-LO sebesar Rp15.986.164.904,00. Terdapat selisih penambah dan pengurang Pendapatan-LO. Penambah-LO sebesar Rp298.672.250,00 yang merupakan Klaim BPJS Bulan Desember 2023 yang belum terbayarkan sedangkan Pengurang-LO sebesar Rp197.091.000,00 merupakan piutang BPJS Non Kapitasi alokasi bulan November dan Desember 2022 yang diterima di tahun 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

5.4.1.1.2 Pendapatan	TA 2023	TA 2022
Transfer –LO	Rp733.327.170.432,00	Rp725.147.185.423,70

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp733.327.170.432,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.148 Pendapatan Transfer

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	660.541.547.139,00	655.233.728.511,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - Dana Insentif Daerah - LO	0,00	9.909.264.000,00
3	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Desa - LO	0,00	0,00
4	Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil - LO	55.747.337.418,00	51.878.946.351,00
5	Bantuan Keuangan - LO	17.038.285.875,00	8.125.246.561,70
Jumlah		733.327.170.432,00	725.147.185.423,70

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.1.2.1 Transfer	TA 2023	TA 2022
Pemerintah	Rp660.541.547.139,00	Rp655.233.728.511,00
Pusat -Dana		
Perimbangan-		
LO		

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LRA tahun 2022 dan Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO tahun 2023 adalah sama yaitu sebesar Rp660.541.547.139,00. Adapun rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebagai berikut:

Tabel 7.149 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	6.042.293.000,00	12.417.029.681,00
	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	678.957.000,00	5.753.225.267,00
	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pribadi	5.050.646.000,00	6.439.159.724,00
	Bagi Hasil Pajak Cukai Tembakau	312.690.000,00	224.644.690,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	4.890.368.000,00	12.612.755.852,00
	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	1.023.635.000,00	55.038.007,00
	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	1.904.644.000,00	9.869.612.558,00
	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.740.275.000,00	1.958.311.000,00
	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	221.811.000,00	729.644.000,00
	Bagi Hasil dari Minyak Bumi	3.000,00	150.287,00
3	Dana Alokasi Umum	499.391.128.979,00	481.975.615.482,00
4	Dana Alokasi Khusus	150.217.757.160,00	148.228.327.496,00
	Dana Alokasi Khusus Fisik	38.885.902.382,00	63.475.906.509,00
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	111.331.854.778,00	84.752.420.987,00
Jumlah		660.541.547.139,00	655.233.728.511,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

5.4.1.1.2.2 Transfer	TA 2023	TA 2022
Pemerintah	Rp0,00	Rp9.909.264.000,00
Pusat-DID-LO		

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-DID-LRA dan LO tahun 2023 adalah sama sebesar Rp0,00.

5.4.1.1.2.3 Transfer	TA 2023	TA 2022
Pemerintah	Rp0,00	Rp0,00
Pusat-Dana		
Desa-LO		

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Desa-LRA tahun 2023 sebesar Rp38.739.622.000,00 dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Desa-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00. Tahun 2023, tidak ada pengakuan realisasi Dana Desa pada Laporan Operasional.

5.4.1.1.2.4 Transfer Antar	TA 2023	TA 2022
Daerah -	Rp55.747.337.418,00	Rp51.878.946.351,00
Pendapatan		
Bagi Hasil-LO		

Realisasi Penerimaan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil-LRA sebesar Rp61.253.240.366,00 sedangkan Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi-LO sebesar Rp55.747.337.418,00, terdapat selisih penambah dan pengurang Pendapatan-LO yaitu selisih penambah sebesar Rp14.257.681.920,00 merupakan kurang bayar pajak kendaraan dan pajak rokok bulan Oktober s.d Desember tahun 2023 sedangkan selisih pengurang sebesar Rp19.763.584.868,00 merupakan kurang bayar pajak kendaraan dan pajak rokok bulan Agustus s.d Desember tahun 2022 yang terealisasi di tahun 2023. Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.150 Transfer Antar Daerah Bagi Hasil Pajak Provinsi

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	21.980.979.763,00	11.903.723.887,00
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.918.366.048,00	7.612.935.461,00
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.953.593.428,00	18.015.157.206,00
4	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	55.896.603,00	63.113.051,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	11.838.501.576,00	14.284.016.746,00
	Jumlah	55.747.337.418,00	51.878.946.351,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

5.4.1.1.2.5 Transfer Antar Daerah-Bantuan keuangan –LO	TA 2023	TA 2022
	Rp17.038.285.875,00	Rp.8.125.246.561,70

Transfer Antar Daerah-Bantuan Keuangan-LRA dan LO tahun 2023 adalah sama sebesar Rp17.038.285.875,00. Bantuan Keuangan berasal dari Pemerintah Provinsi yang terdiri dari:

Tabel 7.151 Transfer Antar Daerah Bantuan Keuangan Provinsi

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Bantuan Keuangan Kesehatan Gratis	4.322.556.000,00	5.442.192.000,00
2	Bantuan Keuangan Penanganan Stunting DPMDPPKBP3A	200.000.000,00	175.000.000,00
3	Bantuan Keuangan Jalan Ruas Parigi-Bungoro	9.815.019.000,00	2.508.054.561,70
4	Bantuan Keuangan Jalan Ruas Lajoanging-Cappabenteng	1.879.000.000,00	0,00
5	Bantuan Peningkatan UMKM	300.000.000,00	0,00
6	Bantuan Subsidi Transportasi Darat	521.710.875,00	0,00
Jumlah		17.038.285.875,00	8.125.246.561,70

5.4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	TA 2023	TA 2022
	Rp15.709.464.166,85	Rp40.347.917.610,00

Terdapat selisih sebesar Rp15.709.464.166,85 antara realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA sebesar Rp0,00 dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp15.709.464.166,85. Selisih ini sebesar pendapatan hibah dari berbagai sumber yang merupakan hibah dalam bentuk barang.

Tabel 7.152 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Hibah - LO	15.709.464.166,85	6.917.703.719,00
2	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundangan-Undangan - LO	0,00	33.430.213.891,00
Jumlah		15.709.464.166,85	40.347.917.610,00

5.4.1.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO	TA 2023	TA 2022
	Rp15.709.464.166,85	Rp6.917.703.719,00

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp15.709.464.166,85 berupa hibah dalam bentuk barang.

Tabel 7.153 Pendapatan Hibah LO

No.	Uraian	SKPD	BAST	Jumlah
1	Pulse Oximeter	Dinas Kesehatan		51.000.000,00
2	Alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)			1.706.400.000,00
3	Buku KIA			14.473.994,85
4	Kendaraan bermotor	RSUD	NPHD 140.01.08/D.V/602/2023	87.150.000,00
5	Infusion Pump		KN. 01.08/D.V/ /2023	14.601.801,00
6	Syringe Pump (Alat Kedokteran Umum)		Tanggal 23 Oktober 2023	14.101.801,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

7	Mobil Pemadam Kebakaran	Satpol PP	978.3/11575/BKAD dan 300.1.2.2/473/ Satpol PP Damkar & Penyelamatan Tanggal 2 Oktober 2023	97.102.646,00
8	Excavator Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	HIBAH Dari KemenPUPR No. 1057.1/BA/DC/2021 & 032/1017/BPKAD Tanggal 28 Oktober 2021	1.071.579.850,00
9	Bangunan Pelimpah Sampah			4.686.331.500,00
10	Dump Truck			420.500.000,00
11	Bus sekolah tahun 2011	Dinas Perhubungan	PL.301/03/3.D/AJ/III/2023 dan 900.1.3.5/09/DISHUB Tanggal 16 Maret 2023	323.999.500,00
12	Bus sekolah tahun 2019			486.987.074,00
13	Saluran Drainase	Dinas Pekerjaan Umum	HIBAH Dari KemenPUPR No. 1057.1/BA/DC/2021 & 032/1017/BPKAD Tanggal 28 Oktober 2021	1.794.390.000,00
14	Bangunan Mandi Cuci Kakus			4.149.310.000,00
15	Jalan Perumahan Pandawa			250.654.000,00
16	Jalan Perumahan Pandawa			538.382.000,00
17	Tanah		NPHD B-4041/Kk.21.02/I/Ku.02.1/10/2023	2.500.000,00
Jumlah				15.709.464.166,85

5.4.1.1.3.2 Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan-LO	TA 2023	TA 2022
	Rp0,00	Rp33.430.213.891,00

Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.154 Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan-LO

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Hibah Dana BOS - LO	0,00	24.063.860.031,00
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - LO	0,00	9.366.353.860,00
Jumlah		0,00	33.430.213.891,00

5.4.1.2 Beban-LO	TA 2023	TA 2022
	Rp913.442.288.956,43	Rp1.105.470.273.864,35

Beban-LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenan. Beban-LO Kabupaten Barru untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp913.442.288.956,43 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.155 Daftar Beban-LO

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Beban Pegawai	379.218.392.991,00	383.900.225.528,00
2	Beban Persediaan	131.687.492.156,36	115.978.830.959,25
3	Beban Jasa	84.841.866.994,00	97.709.332.788,83
4	Beban Pemeliharaan	5.504.393.628,00	5.598.302.976,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5	Beban Perjalanan Dinas	34.063.010.977,00	31.092.110.006,00
6	Beban Bunga	2.083.780.371,56	1.353.310.343,66
7	Beban Subsidi	313.026.525,00	0,00
8	Beban Hibah	23.636.904.037,00	9.699.655.057,00
9	Beban Bantuan Sosial	0,00	1.569.300.000,00
10	Beban Lain-lain	28.287.000,64	0,00
11	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	38.148.155.972,67	22.102.015.826,00
12	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.996.999.558,07	308.480.420.026,12
13	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	132.012.181.916,24	68.049.176.118,00
14	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
15	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
16	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	208.364.033,10	135.074.866,43
17	Beban Penyisihan Piutang	8.759.031.963,79	1.580.616.077,06
18	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00
19	Beban Bagi Hasil Bantuan Keuangan	54.100.418.727,00	52.722.921.638,00
20	Beban Tak Terduga	839.982.105,00	5.498.981.654,00
Jumlah		913.442.288.956,43	1.105.470.273.864,35

Tabel 7.156 Perhitungan Beban-LO Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Jenis Beban	LRA/SP2D	Mutasi Penambah	Mutasi Pengurang	LO
1	Beban Pegawai	380.173.392.967,00	0,00	954.999.976,00	379.218.392.991,00
2	Beban Barang dan Jasa	258.845.601.745,10	49.672.712,88	2.798.510.702,62	256.096.763.755,36
3	Beban Bunga	2.088.449.782,00	149.671.098,29	154.340.508,73	2.083.780.371,56
4	Beban Subsidi	313.026.525,00	0,00	0,00	313.026.525,00
5	Beban Hibah	23.636.904.037,00	0,00	0,00	23.636.904.037,00
6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Lain-lain	0,00	28.287.000,64	0,00	28.287.000,64
8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	8.759.031.963,79	0,00	8.759.031.963,79
9	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	38.148.155.972,67	0,00	38.148.155.972,67
10	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	17.996.999.558,07	0,00	17.996.999.558,07
11	Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi	0,00	132.012.181.916,24	0,00	132.012.181.916,24
12	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	208.364.033,10	0,00	208.364.033,10
15	Beban Bantuan Keuangan	92.840.040.727,00	0,00	38.739.622.000,00	54.100.418.727,00
16	Beban Tak Terduga	839.982.105,00	0,00	0,00	839.982.105,00
Jumlah		758.737.397.888,10	197.352.364.255,68	42.647.473.187,35	913.442.288.956,43



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Perjanjian Kontrak Nomor 02/JOT/PPK/DISHUB/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023.

5.4.1.2.5 Beban Hibah-LO	TA 2023	TA 2022
	Rp23.636.904.037,00	Rp9.699.655.057,00

Realisasi Belanja Hibah-LRA per 31 Desember 2023 sebesar dan Realisasi Beban Hibah-LO per 31 Desember Tahun 2023 yaitu sebesar Rp23.636.904.037,00. Beban Hibah-LO terdiri dari antara lain:

Tabel 7.160 Daftar Beban Hibah per 31 Desember 2023

No.	Rincian Objek	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	918.340.682,00	0,00
2	Beban Hibah Barang kepada BUMD	1.068.606.633,00	0,00
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.291.059.920,00	750.000.000,00
3	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	4.212.434.407,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.732.876.770,00	2.570.000.000,00
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	884.799.382,00	0,00
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.254.000.000,00	1.680.000.000,00
6	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	487.220.650,00	487.220.650,00
	Jumlah	23.636.904.037,00	9.699.655.057,00

5.4.1.2.6 Beban Bantuan Sosial-LO	TA 2023	TA 2022
	Rp0,00	Rp1.569.300.000,00

Beban Bantuan Sosial-LO per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp0,00. Tidak ada selisih antara realisasi Belanja Bantuan Sosial-LRA dengan Beban Bantuan Sosial-LO.

5.4.1.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi –LO	TA 2023	TA 2022
	Rp188.365.701.480,08	Rp 398.766.686.836,55

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 sebesar Rp188.365.701.480,08 merupakan Beban Penyusutan dan Amortisasi Kabupaten Barru yang terdapat pada SKPD. Beban Penyusutan terdiri dari:

Tabel 7.161 Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	38.148.155.972,67	22.102.015.826,00
2	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	17.996.999.558,07	308.480.420.026,12



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
3	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	132.012.181.916,24	68.049.176.118,00
4	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	208.364.033,10	135.074.866,43
6	Aset Lain-Lain	0,00	0,00
	Jumlah	188.365.701.480,08	398.766.686.836,55

5.4.1.2.8 Beban	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2022</u>
Penyisihan	Rp8.759.031.963,79	Rp1.580.616.077,06
Piutang –LO		

Beban Penyisihan Piutang-LO tahun 2023 sebesar Rp8.759.031.963,79, yang terdiri dari beberapa beban penyisihan antara lain:

Tabel 7.162 Daftar Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	3.008.653.901,09	439.708.752,86
2	Piutang Retribusi Daerah	5.574.953.240,20	1.100.162.577,30
3	Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	158.387.792,50	12.457.746,90
4	Piutang Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)	0,00	28.287.000,00
5	Piutang BLUD RSUD	17.037.030,00	0,00
	Jumlah	8.759.031.963,79	1.580.616.077,06

5.4.1.2.9 Beban Lain-	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2022</u>
Lain-LO	Rp28.287.000,64	Rp0,00

Beban Lain-Lain-LO per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp28.287.000,64, terdiri dari Beban Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir) sebesar Rp28.287.000,00 dan kurang bayar piutang Remunerasi TDF sebesar Rp0,64.

5.4.1.2.10 Beban Bantuan	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2022</u>
Keuangan-LO	Rp54.100.418.727,00	Rp52.722.921.638,00

Beban Bantuan Keuangan-LO per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp54.100.418.727,00, merupakan Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa yang disebarkan ke tujuh Kecamatan yang terdiri dari Dana ADD sebesar Rp50.728.942.365,00 Dana Desa dari Bagi Hasil Pajak sebesar Rp3.182.330.851,00 dan Bantuan Pembayaran Iuran JKN (1%) sebesar Rp189.145.511,00. Rincian Beban Bantuan Keuangan – LO sebagai berikut:

Tabel 7.163 Daftar Beban Bantuan Keuangan-LO per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0,00	133.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
2	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	54.100.418.727,00	52.589.921.638,00
	Jumlah	54.100.418.727,00	52.722.921.638,00

5.4.1.2.11 Beban Tak Terduga-LO	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2022</u>
	Rp839.982.105,00	Rp5.498.981.654,00

Tidak ada selisih antara realisasi Belanja Tidak Terduga-LRA sebesar Rp839.982.105,00 dengan realisasi Beban Tidak Terduga-LO. Pada periode ini, Belanja/Beban Tidak Terduga merupakan dana yang dikururkan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan status kebencanaan yang dikhususkan kepada kebutuhan bahan sementara pekerjaan tanggul dan jalan.

5.4.1.3 Surplus/Defisit dari Operasi – LO	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2022</u>
	(Rp52.237.559.559,32)	(Rp244.242.552.698,61)

Surplus dari Kegiatan Operasional per 31 Desember Tahun 2023 sebesar (Rp52.237.559.559,32).

5.4.2 Kegiatan Non Operasional

5.4.2.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2022</u>
	Rp0,00	Rp0,00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.2.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	<u>TA 2023</u>	<u>TA 2022</u>
	(Rp2.177.997.335,00)	(Rp2.564.122.449,42)

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp2.177.997.335,00 merupakan rugi tahun berjalan PDAM sebesar Rp2.113.345.906,00 dan rugi tahun berjalan Perseroda sebesar Rp64.651.429,00.

Tabel 7.164 Daftar Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	2.177.997.335,00	2.313.215.572,42
2	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	250.906.877,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	Jumlah	2.177.997.335,00	2.564.122.449,42

5.4.2.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional- LO	TA 2023	TA 2022
	<u>(Rp2.177.997.335,00)</u>	<u>(Rp2.564.122.449,42)</u>

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 sebesar (Rp2.177.997.335,00).

5.4.3 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa – LO	TA 2023	TA 2022
	<u>(Rp2.177.997.335,00)</u>	<u>(Rp2.564.122.449,42)</u>

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa per 31 Desember 2023 sebesar (Rp2.177.997.335,00).

5.4.4 Pos Luar Biasa

5.4.4.1 Pendapatan Luar Biasa – LO	TA 2023	TA 2022
	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Pendapatan Luar Biasa per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.4.2 Beban Luar Biasa – LO	TA 2023	TA 2022
	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Beban Luar Biasa per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.5 Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa – LO

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa – LO	TA 2023	TA 2022
	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.6 Surplus/Defisit- LO

Surplus (Defisit) – LO	TA 2023	TA 2022
	<u>(Rp54.415.556.894,32)</u>	<u>Rp246.806.675.148,03)</u>



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Surplus (Defisit)-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama Tahun 2023, setelah memperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus (Defisit) pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023 adalah surplus sebesar (Rp54.415.556.894,32).

5.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Sisa kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan dan maupun Pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara SKPD merupakan bagian dari Kas Daerah, dimana sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke BUD. Arus Kas Bersih Pemerintah Daerah Barru tahun anggaran 2023 sebagai berikut.

5.5.1 Arus Kas dari	TA 2023	TA 2022
Aktivitas	Rp129.688.028.867,17	Rp144.566.527.122,46
Operasi		

Arus Kas Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Barru dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dalam Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp129.688.028.867,17 dengan rincian sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Kas Masuk

Rincian arus kas masuk dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 7.165 Daftar Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2023	2022
1	Penerimaan Pajak Daerah	25.785.922.730,01	24.325.109.079,54
2	Penerimaan Retribusi Daerah	3.844.587.603,00	7.194.962.118,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.922.742.013,00	10.027.692.032,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	69.116.653.237,74	54.077.823.550,22
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	13.115.486.792,00	25.029.785.533,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	499.391.128.979,00	479.792.789.690,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik	38.885.902.382,00	63.475.906.509,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2023	2022
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	111.331.854.778,00	84.752.420.987,00
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	38.739.622.000,00	52.842.733.000,00
10	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Propinsi	61.253.240.366,00	49.829.122.855,00
11	Penerimaan Bantuan Keuangan	17.038.285.875,00	8.125.246.561,70
12	Penerimaan Hibah	0,00	0,00
13	Penerimaan Lainnya	0,00	33.430.213.891,00
Jumlah Arus Kas Masuk		888.425.426.755,75	892.903.805.806,46

5.5.1.2 Arus Kas Keluar

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 7.166 Daftar Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2023	2022
1	Pembayaran Pegawai	380.173.392.967,00	383.900.225.528,00
2	Pembayaran Barang Dan Jasa	258.845.601.745,10	250.638.718.839,00
3	Pembayaran Bunga	2.088.449.782,00	1.374.006.968,00
4	Pembayaran Subsidi	313.026.525,00	0,00
5	Pembayaran Hibah	23.636.904.037,00	9.699.655.057,00
6	Pembayaran Bantuan Sosial	0,00	1.569.300.000,00
7	Pembayaran Tidak Terduga	839.982.105,48	5.498.981.654,00
8	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	92.840.040.727,00	95.656.390.638,00
9	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		758.737.397.888,58	748.337.278.684,00
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi		129.688.028.867,17	144.566.527.122,46

5.5.2 Arus Kas dari	TA 2023	TA 2022
Aktivitas	(Rp148.016.364.234,00)	(Rp146.652.719.665,00)
Investasi		

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kabupaten Barru di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp148.016.364.234,00) dengan rincian sebagai berikut:

5.5.2.1 Arus Kas Masuk

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi adalah sebagai berikut:

Tabel 7.167 Daftar Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2023	2022
1	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
2	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
3	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
4	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2023	2022
5	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
6	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
7	Penjualan atas Aset Lainnya	0,00	0,00
8	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
9	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00

5.5.2.2 Arus Kas Keluar

Rincian arus kas keluar dari aktivitas investasi adalah sebagai berikut:

Tabel 7.168 Daftar Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2023	2022
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
2	Perolehan atas Tanah	7.100.823.000,00	0,00
3	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	21.357.154.752,00	38.094.991.086,00
4	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	53.248.357.339,00	43.887.170.944,00
5	Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	65.926.169.143,00	63.617.630.635,00
6	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	383.860.000,00	52.927.000,00
7	Perolehan atas Aset Lainnya	0,00	0,00
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	1.000.000.000,00
9	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		148.016.364.234,00	146.652.719.665,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(148.016.364.234,00)	(146.652.719.665,00)

5.5.3 Arus Kas dari	TA 2023	TA 2022
Aktivitas	(Rp3.053.031.264,52)	(Rp3.053.031.264,00)
Pendanaan		

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan mencerminkan penerimaan kas dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar (Rp3.053.031.264,52), dengan rincian sebagai berikut:

5.5.3.1 Arus Kas Masuk

Rincian arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.169 Daftar Arus Kas Masuk Aktivitas Pembiayaan

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2023	2022
1	Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	0,00	0,00
2	Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
3	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2023	2022
4	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
5	Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	0,00	0,00
6	Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	0,00	0,00
7	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
8	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
9	Penerimaan Kembali Dana Kemitraan dengan Pihak ketiga	0,00	0,00
10	Penerimaan Kembali Pinjaman Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00

5.5.3.2 Arus Kas Keluar

Rincian arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.170 Daftar Arus Kas Keluar Aktivitas Pembiayaan

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2023	2022
1	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	3.053.031.264,52	3.053.031.264,00
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
4	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
5	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	0,00	0,00
6	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	0,00	0,00
7	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
8	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
9	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		3.053.031.264,52	3.053.031.264,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		(3.053.031.264,52)	(3.053.631.264,00)

Arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan merupakan pembayaran Utang Jangka Panjang Dalam Negeri.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

TA 2023
(Rp8.371.496,70)

TA 2022
Rp12.974.996,00

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran berupa Penerimaan PFK Bendahara Pengeluaran tahun 2023, Pengeluaran PFK Bendahara Pengeluaran tahun 2023 dan potongan yang dipungut dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru terdiri dari Iuran Wajib Pajak (IWP), PPh Pasal 21, Potongan Askes, dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

Penyetoran sisa UYHD tahun sebelumnya dan sisa UP Tahun 2022 dan 2023 disajikan kembali dalam Aktivitas Transitoris untuk tujuan komparatif.

5.5.4.1 Arus Kas Masuk

Rincian arus kas masuk dari aktivitas non anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 7.171 Daftar Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2023	2022
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga			
1	Iuran Wajib Pajak	16.646.285.260,00	17.043.156.844,00
2	Pajak Penghasilan	16.132.365.942,00	14.749.864.154,00
3	Asuransi Kesehatan	8.413.837.984,00	8.354.717.660,00
4	Tabungan Perumahan (Taperum)	0,00	297.000,00
5	Pajak Pertambahan Nilai	15.764.218.746,00	15.859.301.809,00
6	Jaminan Kecelakaan Kerja	420.897.242,00	418.788.578,00
7	Jaminan Kematian	1.262.688.225,00	1.256.372.542,00
8	Lain-Lain (Kas Lainnya Disparpora)	0,00	0,00
9	PFK Tahun Lalu	0,00	0,00
10	Koreksi SiLPA Dana BOS	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		58.640.293.399,00	57.682.498.587,00

5.5.4.2 Arus Kas Keluar

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 7.172 Daftar Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2023	2022
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga			
1	Iuran Wajib Pajak	16.644.344.098,00	17.043.156.844,00
2	Pajak Penghasilan	16.128.423.784,00	14.741.622.104,00
3	Asuransi Kesehatan	8.413.837.984,00	8.354.717.660,00
4	Tabungan Perumahan (Taperum)	0,00	297.000,00
5	Pajak Pertambahan Nilai	15.764.218.746,00	15.854.149.959,00
6	Jaminan Kecelakaan Kerja	420.897.242,00	418.788.578,00
7	Jaminan Kematian	1.262.688.225,00	1.256.372.542,00
8	Lain-Lain (Koreksi Silpa Dana JKN dan Pajak Restoran)	860.916,70	0,00
9	PFK Tahun Lalu	13.393.900,00	418.904,00
Jumlah Arus Kas Keluar		58.648.664.895,70	57.669.523.591,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(8.371.496,70)	12.974.996,00

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas

Kenaikan/(penurunan) kas bersih selama Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp21.389.738.128,05).

5.5.6 Kas Lainnya di Bendahara Selain BUD

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Disparpora (Beasiswa) tahun 2023	Rp	754.300.000,00
Kas Lainnya di Bendahara Dana BOS	Rp	7.921.540,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

(Pajak Restoran SMPN 5 Barru) tahun 2023	
Kas di Bendahara Dana PAUD tahun 2022	(Rp 9.600.000,00)
Total	Rp 752.621.540,00

5.5.7 Saldo Awal Kas di Kas Daerah

Saldo awal Kas di Kas Daerah per 1 Januari 2023 sebesar Rp113.828.811.140,35, terdiri dari:

Kas di Kas Daerah/BUD	Rp103.949.293.775,35
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 200.747,00
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 0,00
Setara Kas	Rp 136.409.915,00
Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	Rp 95.501.446,00
Kas di Bendahara BLUD	Rp 9.554.281.135,00
Kas di Bendahara Dana BOS	Rp 83.524.122,00
Kas di Bendahara Dana PAUD	<u>Rp 9.600.000,00</u>
Total	Rp113.828.811.140,35

Setara Kas sebesar Rp136.409.915,00 merupakan akumulasi dari bunga giro rekening sisa dana sertifikasi Dinas Pendidikan (BNI) sebesar Rp4.250.015,00 ditambah hasil pungutan Pajak Restoran dan kelebihan pungut oleh Sekretariat Daerah Bagian Kesra dan Sekretariat DPRD sebesar Rp118.766.000,00 serta PPh dan PPN yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp13.393.900,00.

5.5.8 Saldo Akhir Kas di Kas Daerah

Saldo akhir kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp93.191.694.552,30, merupakan saldo awal Kas di Kas Daerah sebesar Rp113.828.811.140,35, ditambah dengan kenaikan (penurunan) bersih kas sebesar (Rp21.389.738.128,05) dan Saldo Kas Lainnya di Bendahara Selain BUD sebesar Rp752.621.540,00. Saldo Akhir Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp93.191.694.552,30 terdiri dari:

Kas di Kas Daerah/BUD	Rp 81.146.569.014,40
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 13.540.100,00
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 881.000,00
Setara Kas	Rp 4.250.015,00
Kas di Bendahara BLUD RSUD	Rp 7.437.532.406,00
Kas di Bendahara BLUD Puskesmas	Rp 3.746.058.000,90
Kas di Bendahara Dana BOS	Rp 85.968.786,00
Kas di Bendahara Dana PAUD-Kesetaraan	Rp 2.595.230,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	<u>Rp 754.300.000,00</u>
Total	Rp 93.191.694.552,30



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

5.6 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2023 menyajikan ekuitas awal dan ekuitas akhir tahun 2023. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Ekuitas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1	Uraian	TA 2023	TA 2022
	Ekuitas Awal	Rp2.242.358.873.838,92	Rp2.212.883.311.398,69

Ekuitas Awal tahun 2023 senilai Rp2.242.358.873.838,92 yang merupakan saldo akhir ekuitas di Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca per 31 Desember 2022 (Audited).

5.6.2	Uraian	TA 2023	TA 2022
	Surplus/Defisit- LO	(Rp54.415.556.894,32)	(Rp246.806.675.148,03)

Surplus/Defisit-LO senilai Rp 54.415.556.894,32 sesuai dengan Surplus/Defisit Laporan Operasional Tahun 2023.

5.6.3	Uraian	TA 2023	TA 2022
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	Rp37.461.615.258,83	Rp276.282.237.588,26

Koreksi Ekuitas karena perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar senilai Rp37.461.615.258,83 dapat dirinci sebagai berikut:

a. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas

No	Uraian	Nilai
1	Koreksi Kas Pada Kas PAUD Dinas Pendidikan	Rp.9.600.000,00
2	Koreksi Kas Pada Sekretariat Daerah	Rp. 805.530,00
	JUMLAH	Rp.8.794.470,00



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

b. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang

No	Uraian	Nilai
1	Koreksi Piutang Pada Dinas Komunikasi	Rp.2.566.119,00
2	Koreksi Piutang Retribusi Pasar Daerah Dinas Koperasi	Rp. 429.581.350,00
	JUMLAH	Rp.432.147.469,00

c. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Beban Dibayar Dimuka

No	Uraian	Nilai
1	Koreksi Beban Dibayar Dimuka Pada Kesbangpol (Beban Bea Pajak STNK)	(Rp.284.375,00)
2	Koreksi Beban Dibayar Dimuka Pada Dinas Tenaga Kerja (Beban Bea Pajak STNK)	Rp.948.333,00
	JUMLAH	Rp.663.958,00

d. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Persediaan

No	Uraian	Nilai
1	Koreksi Persediaan Obat Pada Dinas Kesehatan	(Rp.28.683.383,00)
2	Koreksi Beban Persediaan Pada Dinas PUPR	Rp. 4.096.286,00
3	Koreksi Beban Persediaan Pada Dinas pendidikan	(Rp.312.237.600,00)
	JUMLAH	(Rp.336.824.697,00)

e. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap

No	Uraian	Nilai
1	Koreksi Atas Penghapusan Aset Tetap 6 SKPD	(Rp.30.709.155.958,10)
2	Koreksi Tambah aset Tanah Rest Area Desa Lawallu yang belum dicatat (Dinas PU)	Rp 7.769.230.556,00
3	Koreksi Tambah Tanah Yang Belum Dicatat Sejak Tahun 2022 (Sekretariat Daerah)	Rp.241.300.000,00
	JUMLAH	(Rp 22.698.625.402,10)

f. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lainnya

No	Uraian	Nilai
1	Koreksi Atas Penghapusan Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya Pada 32 SKPD	Rp. 46.822.864.467,96
2	Koreksi Kurang Catat Beban Amortisasi ATB Bapenda	Rp22.053.900,00
3	Koreksi Atas Penghapusan Aset Lainnya Pada 4 SKPD	(Rp.493.493.200,00)
	JUMLAH	(Rp.46.351.425.167,60)



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

g. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kewajiban

No	Uraian	Nilai
1	Koreksi Atas Utang Pihak Ketiga Pada Dinas PU , Dinkes Dinas Pertanian	(Rp.167.414.710,37)
	JUMLAH	(Rp.167.414.710,37)

h. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Lainnya

No	Uraian	Nilai
1	Koreksi Atas Nilai ekuitas Awal Lainnya SKPKD	Rp. 13.907.566.245,77
2	Koreksi lebih catat pengakuan beban pajak TA 2023 Dinas Tenaga Kerja	(948.334,00)
3	Koreksi Kurang Catat Utang Beban Listrik TA 2023 Sekretariat DPRD	Rp23.298.031,00
4	Koreksi ekuitas utang belanja bunga (BKAD)	0,47
5	Kelebihan pengakuan pembayaran termin 100% pekerjaan konsultan perencanaan rehabilitasi Kajari (Dinas PUPR)	(25.300.000,00)
6	Kelebihan pengakuan pembayaran termin 100% pekerjaan konsultan perencanaan rehabilitasi Kantor Koramil (Dinas PUPR)	(Rp.15.578.000,00)
	JUMLAH	Rp.13.889.037.943,24

5.6.4 Uraian	TA 2023	TA 2022
Ekuitas Akhir	Rp2.225.404.932.203,44	Rp2.242.358.873.838,92

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 senilai Rp 2.225.404.932.203,44 sesuai dengan jumlah ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2023, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal	Rp2.242.358.873.838,92
2. Surplus/Defisit – LO	(Rp 54.415.556.894,31)
3. Koreksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	Rp 37.461.615.258,83
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp2.225.404.932.203,44

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Barru

Kabupaten Barru dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

6.2 Dasar Pelaksanaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru disahkan dengan Peraturan Daerah :

- a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021.
- b. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021.

6.3 Yang Mempengaruhi Penyusunan APBD Kabupaten Barru

APBD tahun 2023 dalam penyusunannya sangat dipengaruhi oleh beberapa asumsi-asumsi makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB, Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Tahun ini sebagai pijakan bagi Kabupaten Barru dalam melangkah berkarya memperbaiki sendi-sendi perekonomian dari dampak merebaknya wabah virus Covid-19. Alhasil, perekonomian kembali membaik dan pembangunan kembali meningkat.

6.4 Target Kinerja Tercapai

Target kinerja APBD tahun 2023 yang tercermin pada indikator keberhasilan program dan kegiatan secara garis besar dapat tercapai rata-rata diatas 80% dari target yang ditetapkan. Ini terlihat dari Pendapatan Daerah mencapai 97,98% dan Belanja Daerah mencapai 89,99% dari target yang ditetapkan. Meskipun demikian, penetapan target kinerja yang dilakukan dipengaruhi oleh situasi yang terjadi di Kabupaten Barru.

VII. PENUTUP

Dari uraian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023 pada bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang dituangkan dalam renstra sebagaimana yang diamanatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023, dibuat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.


BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH